

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 618/SEJARAH

Tema

: PSHP

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN SOSIAL, HUMANIORA DAN PENDIDIKAN

PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG
TEMA TERDAFTAR



: LAPORAN AKHIR PENELITIAN
SOSIAL, HUMANIORA DAN...

Dr. ERNIWATI, SS, M.HUM

LAPORAN PENELITIAN

SS / UN. 35.15 / PE / KI / 2019

17 SEPTEMBER 2019

KEPALA
Dr. ARDANI M Si
NIP. 19601104 196702 1 002

Dr. Erniwati, SS, M.Hum

0006047104

Hendra Naldi, SS, M. Hum

0030096904

Najmi, SS, M.Hum

0030128603

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DESEMBER 2017

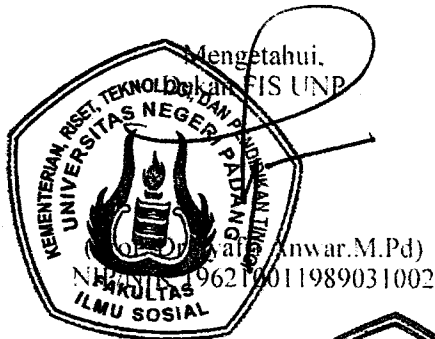
HALAMAN PENGESAHAN

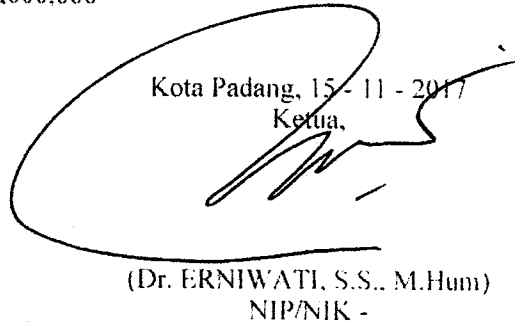
Judul : Etnis Tionghoa Padang: Identitas dalam dinamika Lokal dan Perubahan Politik (Kolonial Hingga Reformasi)

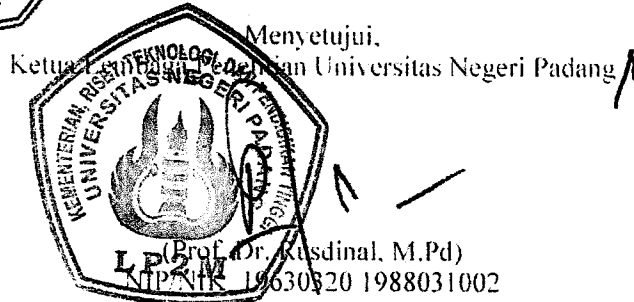
Peneliti/Pelaksana
Nama Lengkap : Dr. ERNIWATI, S.S., M.Hum
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Padang
NIDN : 0006047104
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Nomor HP : 08197512006
Alamat surel (e-mail) : erniwati_nur@ymail.com

Anggota (1)
Nama Lengkap : NAJMI S.S., M.Hum
NIDN : 0030128603
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Padang

Institusi Mitra (jika ada)
Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 3 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 70.000.000
Biaya Keseluruhan : Rp 210.000.000

Mengetahui,
Ketua LPPM FIS UNP

Prof. Dr. Anwar, M.Pd
NIP/NIK 196210011989031002

Kota Padang, 15 - 11 - 2017
Ketua,

(Dr. ERNIWATI, S.S., M.Hum)
NIP/NIK -

Menyetujui,
Ketua LPPM FIS dan Universitas Negeri Padang

Prof. Dr. Kardinal, M.Pd
NIP/NIK 196308201988031002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang permasalahan.....	1
B. Studi Pendahuluan.....	4
C. Metode Penelitian.....	12
BAB II PADANG DALAM KONTEKS RUANG	
A. Letak Geografis dan Keadaan Alam.....	15
B. Rantau dan dominasi Kebudayaan Minangkabau.....	18
C. Pusat Perdagangan.....	20
BAB III ETNIS TIONGHOA DI KOTA PADANG	
A. Sejarah kedatangan.....	29
B. Struktur Kolonial.....	40
C. Terbentuknya Pemukiman Tionghoa Padang.....	48
D. Organisasi Sosial dan Budaya.....	57
BAB IV IDENTITAS ETNIS TIONGHOA PADANG	
A. Identitas Historis.....	70
B. Identitas Budaya.....	76
C. Identitas Nasional.....	94
D. Identitas Ganda.....	99
BAB V PENUTUP.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pelabuhan Muara.....	17
Gambar 2. Pelabuhan Muara Padang.....	22
Gambar 3. Jalur Pelayaran dari Dermaga di Pulau Pisang menuju Pelabuhan Muara.....	23
Gambar 4. Pelabuhan di Muara Sungai Batang Arau (Muara Padang).....	24
Gambar 5. Bagan Penggolongan Penduduk di Hindia Belanda.....	41
Gambar 6. Kampung Tionghoa (wilayah Kampung Pondok).....	50
Gambar 7. Gudang dan Perkantoran di Sekitar Muara dan Kampung Tionghoa.....	52
Gambar 8. Toko di Sepanjang Jalan Kampung Tionghoa.....	52
Gambar 9. Altar Bagian Dalam Klenteng See Hien Kiong.....	55
Gambar 10. Klenteng See Hien Kiong Tahun 1860.....	56
Gambar 11. Gedung Himpunan Keluarga Lie-Kwee (Long See Tong).....	62
Gambar 12. Gedung Himpunan Keluarga Gho.....	62
Gambar 13. Gedung Himpunan Keluarga Marga Huang.....	63
Gambar 14. Gedung Himpunan Keluarga Lim.....	63
Gambar 15. Gedung Himpunan Keluarga Ong.....	64
Gambar 16. Gedung Himpunan Keluarga Tan.....	65
Gambar 17. Gedung Himpunan Keluarga Tjoa dan Kwa.....	65
Gambar 18. Meja Sembahyang Leluhur Keluarga Lie – Kwee.....	79
Gambar 19. Meja Sembahyang Leluhur Himpunan Keluarga Tan.....	82
Gambar 20. Meja Sembahyang Leluhur Keluarga Oei/Huang.....	84
Gambar 21. Meja Sembahyang Leluhur Keluarga Tjoa.....	85
Gambar 22. Meja Sembahyang Leluhur Marga Ong.....	86

Gambar 23. Meja Sembahyang Leluhur Himpunan Keluarga Lim.....	88
Gambar 24. Meja Sembahyang Leluhur Marga Gho.....	90
Gambar 25. Pengurus Tiong Hoa Hwe Konn (THHK).....	97

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang permasalahan

Menjadi sebuah kelompok minoritas dalam keberagaman etnis di Indonesia barangkali bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Berbagai kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia pasca runtuhnya rezim Orde Baru memperlihatkan bahwa etnis Tionghoa sebagai kelompok minoritas di Indonesia telah bertahan hidup di tengah sebuah kondisi yang dihimpit oleh berbagai potensi konflik. Leo Suryadinata menyebutkan bahwa konflik antara penduduk “asli” dengan Tionghoa paling sering terjadi di Indonesia, jika dibandingkan dengan negara di kawasan Asia Tenggara lainnya.¹ Perbedaan merupakan warna dalam keberagaman menjadi sebuah alasan untuk saling menyakiti dan melakukan berbagai hal yang tidak lagi relevan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Konflik yang disertai dengan berbagai tindakan kekerasan meninggalkan sejumlah ingatan pahit dan berbagai trauma yang melukai hati membuat beberapa etnis Tionghoa membuat pilihan untuk meninggalkan Indonesia.

Meskipun catatan sejarah di berbagai tempat di Indonesia berisi narasi tentang kekerasan terhadap etnis Tionghoa, namun dalam konteks kota Padang, hal serupa tidak ditemukan. Bagi penulis yang menarik, bukanlah fakta tidak adanya kasus kekerasan yang menimpa etnis Tionghoa, namun kenyataan yang memperlihatkan adanya kehidupan yang terjaga dan tanpa konflik di Padang lebih penting untuk difahami dan dijelaskan. Selain itu, meskipun dari segi jumlah, etnis Tionghoa seringkali disebut sebagai etnis yang minoritas, bukan berarti dominasi

¹ Dalam tulisannya Leo Suryadinata menyebut Cina untuk kelompok etnis Tionghoa, namun demi konsistensi dalam tulisan ini penulis menggunakan istilah Tionghoa. Leo Suryadinata, “Aksi Anti Cina di Asia Tenggara Upaya Mencari Penyebab dan Pemecahan” dalam Dewi Fortuna Anwar, dkk (eds.), *Konflik Kekerasan Internal Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik, dan Kebijakan Asia Pasifik*, Jakarta: YOI, LIPI, LASEMA-CNRS, KITLV, 2005, hlm. 181.

kelompok mayoritas seperti Minangkabau membuat etnis ini lebur dan kehilangan identitas mereka.²

Selain hal-hal di atas, ada sejumlah alasan yang membuat kajian tentang etnis Tionghoa Padang penting untuk didalami lebih jauh. Sejumlah stereotip dan prasangka seperti eksklusif, sulit berbaur, pelit, dsb, seringkali digeneralisasi sebagai karakteristik baku etnis Tionghoa di Indonesia. Dalam banyak kasus di Indonesia, hal tersebut seringkali dijadikan senjata untuk memusuhi dan melegalkan tindakan-tindakan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa. Selama etnis Tionghoa masih dianggap sebagai “asing” dan berbagai prasangka terus ada, itu artinya kelompok tersebut belumlah menjadi bagian dari keberagaman yang ada di negeri ini. Untuk itulah, maka kajian-kajian yang sifatnya membangun penjelasan yang objektif terhadap etnis ini penting untuk dilakukan. Harapannya adalah agar etnis Tionghoa yang ada di Indonesia tidak lagi dihimpit dengan berbagai prasangka negatif.

Selanjutnya, penelitian tentang etnis Tionghoa pada tingkat lokal penting dilakukan untuk melihat pengaruh lokalitas terhadap etnis Tionghoa dalam menjalankan dinamika sosial budaya mereka. Perlu dicermati bahwa etnis Tionghoa tidak bisa digeneralisasi begitu saja karena di masing-masing tempat mereka bermukim atau kearifan lokal akan mempengaruhi proses pembentukan identitas ke-Tionghoa-an tersebut. Hal ini menyebabkan terdapat perbedaan karakteristik antara Tionghoa Padang dengan Tionghoa Medan, Tionghoa Surabaya atau Tionghoa Bangka, dan Tionghoa yang tinggal di kota lainnya di Indonesia. Meski demikian, dari kajian-kajian yang sudah ada terlihat bahwa akan selalu ada hal yang berbeda, unik, dan spesifik dari etnis Tionghoa tersebut, karena ada peranan dan kearifan lokal

² Pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh negara sejak Indonesia merdeka merupakan perwujudan dari tindakan diskriminatif yang membuat etnis Tionghoa berada pada posisi yang dimarginalkan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pembentukan identitas diri dan kolektif etnis Tionghoa hingga rezim Orde Baru jatuh pada bulan Mei 1998. Abdul Wahid “Proses (Tidak) Menjadi Indonesia? Persepsi dan Memori Massa-Rakyat Cina di Yogyakarta”, dalam A. Budi Susanto (ed.), *Identitas dan Postkolonialitas di Indonesia* Yogyakarta: Kanisius, 2003, hlm. 70.

terhadap pembentukan identitas tersebut.³ Di samping itu, dinamika sosial budaya etnis Tionghoa juga dipengaruhi oleh perubahan politik negara sesuai dengan rezim yang berkuasa. Fluktuasi sikap pemerintah yang berkuasa menentukan respon etnis Tionghoa, baik di dalam kelompok sesama etnis Tionghoa, respon terhadap kelompok etnis lainnya, maupun dengan pemerintah itu sendiri. Lewat respon yang berbeda-beda tersebutlah etnis Tionghoa Padang mampu bertahan melewati perubahan zaman dan kokoh dengan identitas yang dibangun.

Sebagai sebuah komunitas dari etnis minoritas, etnis Tionghoa Padang mampu menjaga identitas mereka dan memiliki hubungan sesamanya. Penelitian ini difokuskan pada permasalahan pembentukan identitas etnis Tionghoa Padang pada masa Pemerintah Hindia Belanda (awal abad 19 – 1942). Untuk menjelaskan permasalahan penelitian di tahun pertama terkait fokus masalah pembentukan identitas etnis Tionghoa pada masa Pemerintah Hindia Belanda, maka penulis menjabarkannya dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana ruang Padang mempengaruhi proses pembentukan identitas etnis Tionghoa Padang?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas etnis Tionghoa Padang?
3. Bagaimana politik kolonial mempengaruhi pembentukan identitas etnis Tionghoa Padang pada masa Pemerintah Hindia Belanda?

Bangsa ini perlu belajar bahwa perubahan zaman dan modernisasi yang terus berkembang tidak selamanya mampu merubah identitas diri dan menghilangkan nilai-nilai yang telah menjadi jati diri seseorang. Dari pengalaman historis etnis Tionghoa Padang, terlihat bahwa sebuah identitas bisa dipertahankan oleh generasi mudanya

³ Lebih jauh lihat Rika Theo dan Fennie Lie, *Kisah, Kultur, dan Tradisi Tionghoa Bangka*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014; Nasrul Hamdani, *Komunitas Cina di Medan dalam Lintasan Tiga Kekuasaan 1930-1960*, Jakarta: LIPI Press, 2012; Andjarwati Noordjanah, *Komunitas Tionghoa di Surabaya (1910-1946)*, Semarang: Penerbit Mesias, 2004.

melalui upaya pewarisan yang secara terus menerus dilakukan. Untuk itu, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan:

1. Menjelaskan pengaruh ruang Padang terhadap proses pembentukan identitas etnis Tionghoa Padang?
2. Membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas etnis Tionghoa Padang?
3. Menjelaskan pengaruh politik kolonial dalam pembentukan identitas etnis Tionghoa Padang pada masa Pemerintah Hindia Belanda?

Melihat diskriminasi dan stereotip yang terus dialamatkan kepada etnis Tionghoa karena minimnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat umum tentang proses etnis Tionghoa menjadi bagian dari politik Pemerintahan Hindia Belanda, menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan. Secara akademis, penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangan intelektual tentang sejarah terbentuknya etnis Tionghoa Padang. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi masyarakat umum dalam membangun persepsi yang tepat terhadap keberagaman etnis di Indonesia sehingga prasangka dan sentimen yang berujung kekerasan kepada etnis minoritas tidak terus terjadi. Penelitian ini juga diharapkan bisa mengembangkan sebuah model yang membangun penjelasan tentang terbentuknya identitas lokal Tionghoa Indonesia.

B. Studi Pendahuluan

Untuk melihat dinamika etnis Tionghoa Padang sejak periode kolonial terdapat dalam karya Freek Colombijn, *Poco-Poco (Kota) Padang*.⁴ Dalam karyanya, Colombijn mengulas tentang keberadaan etnis Tionghoa sebagai bagian dari penduduk kota Padang. Colombijn melihat pentingnya kontribusi etnis Tionghoa pada bidang perdagangan, terutama dalam pemanfaatan ruang sebagai pasar. Untuk

⁴ Freek Colombijn, *Poco-Poco (Kota) Padang: Sejarah Sebuah Kota di Indonesia Pada Abad ke 20 dan Penggunaan Ruang Kota*, Yogyakarta: Ombak, 2006.

mengatasi konflik di antara pengguna ruang maka diperlukan *master plan*, sehingga ruang dapat digunakan untuk penggunaan umum dan penggunaan simbolik yang kemudian memberikan ciri khas bagi kota Padang. Penelitian Colombijn tersebut berguna dalam memahami Padang sebagai lokalitas yang dinamis, terutama dalam penggunaan konsep ruang. Untuk membahas mengenai posisi etnis Tionghoa dalam dinamika perubahan kota di tengah masyarakat kota Padang yang plural. Walaupun kelompok minoritas, etnis Tionghoa mampu mempertahankan eksistensinya tidak saja dalam dinamika sosial, budaya, tetapi juga dalam bidang perekonomian. Uraian Colombijn tentang peranan etnis Tionghoa dalam perekonomian kota Padang membantu penulis untuk menganalisis posisi ekonomi mereka dalam sejarah perubahan kota Padang dari periode kolonial hingga saat ini. Peranan etnis Tionghoa tersebut tidak dapat dilepaskan dari pembangunan pasar dan perkembangan perekonomian kota Padang. Meskipun di bidang perdagangan ditemukan kompetisi yang tinggi dengan pedagang Minangkabau, mereka mampu membangun eksistensi dan menempati posisi tersendiri dalam perekonomian kota Padang. Walaupun menguraikan tentang posisi etnis Tionghoa sebagai salah satu etnis yang berjuang untuk mendapatkan ruang di kota Padang, namun Colombijn tidak membahas secara mendalam tentang dinamika sosial budaya etnis Tionghoa dalam perubahan politik lokal maupun nasional. Hal inilah yang membedakan tulisan Colombijn dengan penelitian ini.

Selanjutnya, karya Rustopo, *Menjadi Jawa: Orang-Orang Cina dan Kebudayaan Jawa di Surakarta 1895–1998* merupakan sebuah publikasi yang berasal dari riset disertasi.⁵ Rustopo memberikan penjelasan dengan melihat masa lalu etnis Tionghoa di Jawa secara sosio-kultural dari perkembangan intelektual dan mentalitas yang manusiawi dalam kehidupan sehari-hari individu atau sekelompok orang biasa. Etnis Tionghoa digambarkan sebagai salah satu bagian yang secara kolektif membentuk identitas Jawa sebagai upaya mencari *jatidiri* dalam membangun

⁵ Rustopo, *Menjadi Jawa: Orang-Orang Tionghoa dan Kebudayaan Jawa di Surakarta 1895 – 1998*, Yogyakarta: Ombak, 2007.

identitas kejawaannya. Dalam tulisannya, Rustopo berhasil menempatkan orang Tionghoa, baik sebagai komunitas maupun sebagai individu menjadi satu kesatuan ke dalam masyarakat dan kebudayaan Jawa. Dengan menampilkan tokoh-tokoh Tionghoa sebagai contoh, tulisan ini menunjukkan adanya keinginan etnis Tionghoa untuk "menjadi" Jawa dan berharap agar dapat diterima oleh masyarakat Jawa.

Secara metodologi, tulisan Rustopo mampu membangun model penelitian sejarah yang merekonstruksi karya sejarah kebudayaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dengan menggunakan teori konvergensi dari William Stern, yaitu hasil pertemuan (*konvergensi*) antara faktor pribadi dan faktor lingkungan, Rustopo menggambarkan faktor-faktor pribadi orang Tionghoa yang menjadi Jawa dalam kurun waktu 1895 -1998. Rustopo melacak kajiannya melalui silsilah dan faktor lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga, tetangga hingga lingkungan budaya. Pola-pola kebudayaan Jawa yang disampaikan oleh Geertz dijadikan sebagai rujukan untuk mengamati simbol-simbol ke-Jawa-an mana yang diadopsi dan kuat di Surakarta.

Gambaran Rustopo mengenai integrasi budaya Jawa ke dalam identitas etnis Tionghoa berbeda dengan gambaran tentang identitas etnis Tionghoa yang tinggal di Padang. Integrasi budaya Jawa ke dalam identitas Tionghoa diserap secara individu maupun kelompok, sehingga ditemukan etnis Tionghoa yang menjadi Jawa setelah mengalami proses adaptasi melalui pribadi-pribadi yang kemudian menjadi Jawa di Surakarta. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh ruang lokal sangat kuat mempengaruhi kepribadian etnis Tionghoa yang kemudian mengikuti pola-pola lokal. Kasus Surakarta tidak ditemukan dalam dinamika sosial budaya etnis Tionghoa Padang. Walaupun ada pengaruh nilai-nilai lokal (budaya Minangkabau) terhadap kehidupan sehari-hari etnis Tionghoa Padang, terutama terhadap bahasa yang digunakan, namun keberadaan perkumpulan sosial, budaya, dan pemukiman Himpunan Bersatu Teguh (HBT) dan Himpunan Tjinta Teman (HTT) mampu menjaga dan mewariskan budaya dan adat istiadat leluhur seiring perubahan zaman.

Perkumpulan sosial, budaya, dan pemakaman HBT dan HTT berpusat di kota Padang dan memiliki cabang di beberapa kota di pedalaman Sumatera Barat dan Riau serta Sibolga. Perkumpulan sosial, budaya, dan pemakaman etnis Tionghoa ini memiliki peranan penting dalam melestarikan tatanan budaya dan memberikan bantuan pelaksanaan upacara kematian sesuai dengan tradisi leluhur, sehingga di kota Padang sampai saat ini masih ditemukan prosesi pemakaman dan kebudayaan Tionghoa yang tradisional. Seiring perjalanan sejarah, etnis Tionghoa Padang mampu mempertahankan jati dirinya sebagai etnis Tionghoa dengan karakteristik budaya tersendiri. Keberadaan etnis Tionghoa sebagai bagian dari penduduk kota Padang yang plural berhasil memberikan kontribusi terhadap khasanah budaya kota Padang.

Untuk menganalisis identitas Tionghoa Padang penulis akan menggunakan konsep etnisitas dan identitas. Kedua konsep tersebut dipakai karena objek yang diteliti adalah sebuah kelompok etnis yang memiliki identitas sendiri yang berbeda dengan etnis lainnya. Ada dua studi terdahulu yang dilakukan oleh Barth (1970) dan Wang Gungwu (1985) yang relevan dengan penelitian ini. Barth mendefinisikan kelompok etnis ke dalam dua aspek penting, yaitu sebagai suatu unit kebudayaan dan sebagai suatu tatanan sosial.⁶ Sebagai sebuah unit kebudayaan, penekanannya ditekankan pada sebuah kelompok etnis dalam berbagi sifat budaya yang mencirikan kelompok tersebut. Pencirian kelompok itu tergantung kepada kemampuan individu atau seseorang untuk mengekspresikan ciri-ciri atau sifat budaya kelompoknya. Sementara sebagai suatu tatanan sosial, ekspresi identitas dilakukan melalui hubungan sosial dengan kelompok budaya lainnya.¹¹

Pandangan pertama menekankan bahwa kemampuan untuk berbagi sifat budaya merupakan ciri utama dari kelompok, sehingga klasifikasi seseorang dalam keanggotaan suatu kelompok dipengaruhi oleh kemampuan seseorang atau kelompok tersebut untuk memperlihatkan sifat budaya dari kelompoknya. Pandangan kedua dari Barth menyebutkan bahwa kelompok-kelompok dilihat sebagai tatanan sosial,

⁶ Fredrik Barth (ed), *Ethnic Groups and Boundaries*, Boston: Little Brown, 1969, hlm 12-15.

sehingga ciri khas suatu kelompok ditentukan oleh kelompok lain. Dengan kata lain, kelompok etnis sebagai tatanan sosial terbentuk jika anggota kelompok tersebut menggunakan identitasnya untuk tujuan interaksi, maka dia akan membedakan dirinya sendiri dengan orang dari kelompok lainnya.¹¹ Meskipun perbedaan budaya menjadi salah satu dasar pembeda, tidak dapat diasumsikan adanya persamaan antara unit-unit dengan persamaan-persamaan budaya. Pembedaan tersebut tidak dilakukan berdasarkan pada faktor-faktor sosial.⁷ Faktor-faktor pembentuk kelompok etnis menurut Barth adalah interaksi kelompok etnis tersebut dengan kelompok lain dan bagaimana batas-batas antar kelompok etnis ini dibangun, dipertahankan, dan dilestarikan melalui proses interaksi.

Bagi Barth, etnisitas tidak hanya bergantung kepada ras atau warisan biologis, melainkan juga pada ekspresi identifikasi rasial atau sentimen-sentimen primordial. Dengan demikian, ada batas-batas antara kelompok etnis yang masing-masing membangun, mempertahankan, dan melestarikan identitas secara terus menerus melalui proses interaksi sosial. Pada prinsipnya identitas merupakan hasil dari sebuah konstruksi.⁸ Ketika sebuah kelompok membangun identitas diri, peranan unsur lokal tidak bisa dielakkan. Selanjutnya, Barth mengatakan bahwa perbedaan antar etnis lebih ditentukan oleh proses-proses sosial, baik pemisahan maupun penyatuan, sehingga perbedaan kategori tetap dipertahankan. Karakteristik kelompok etnis menurut Barth terdiri atas: (1) secara biologis mampu berkembangbiak dan bertahan, (2) mempunyai nilai-nilai budaya dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya, (3) mempunyai jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, (4) menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok lain.⁹ Walaupun demikian Barth sendiri masih memberikan

⁷ Fredrik Barth, "Introduction" dalam Fredrik Barth dkk, *Ethnic Group and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*, Bergen-Oslo: Universitets Forlaget, 1970, hlm.13.

⁸ *Ibid.*, 1969, hlm. 15-38.

⁹ Fredrik Barth, *Kelompok Etnik dan Batasannya*, terj, Nining I. Susilo, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988, hlm. 1.

pertimbangan pada pengaruh sistem politik pada hubungan antar etnis.¹⁰Selain itu, persoalan waktu, tempat, perkembangan politik lokal dan nasional perlu dipertimbangkan dalam kaitan sejauh mana kelompok etnis Tionghoa Padang membangun, mempertahankan, dan melestarikan identitasnya. Boleh jadi ketika sistem politik negara memberikan peluang bagi etnis Tionghoa untuk berpartisipasi dalam arena publik, ekspresi identitas mungkin dilestarikan dan bahkan diperkuat atau bahkan sebaliknya. Pembatasan dan kontrol dari otoritas yang berkuasa membuat mereka sulit untuk mengembangkan diri.

Mengikuti penjelasan yang diberikan oleh Barth, diketahui bahwa pembentukan identitas mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu serta bisa dipahami secara berbeda di tempat yang berbeda. Identitas pada akhirnya ada yang sifatnya permanen dan ada yang tidak permanen. Identitas permanen bisa terlihat dari konsistensi etnis Tionghoa dalam hal kepercayaan terhadap arwah nenek moyang dan pemeliharaan kebudayaan leluhur. Sementara, identitas yang tidak permanen ditunjukkan melalui perubahan-perubahan yang terjadi akibat pengaruh luar, seperti pendidikan, pengaruh barat, dan pengaruh lokalitas. Selanjutnya, identitas juga terbentuk melalui representasi budaya seperti pementasan berbagai kesenian.¹¹ Hal inilah yang membuat ekspos budaya menjadi sarana penting untuk menampilkan suatu identitas.

Sementara itu dalam studinya tentang identitas Tionghoa di Asia Tenggara, Wang Gungwu menekankan tentang konsep identitas Tionghoa dan identitas ganda. Dalam analisa Wang, kesadaran sebagai orang Tionghoa (rasa kecinaan) merupakan unsur inti etnisitas orang Tionghoa yang tidak saja memiliki sekaligus beberapa jenis identitas, melainkan identitas-identitas itu hadir secara bersama-sama, bahkan bisa tumpang tindih, saling memperkuat, dan saling bersaing dengan identitas yang

¹⁰*Ibid.*, hlm. 39.

¹¹Fredrik Barth (ed), *op. cit.*, 1969, hlm. 9-38.

lainnya.¹² Dengan memberi penekanan pada dimensi waktu, Wang Gungwu menyimpulkan bahwa perubahan identitas etnis Tionghoa di Asia Tenggara terjadi melalui berbagai tahapan, yaitu identitas historis yang diperoleh dari nilai-nilai masa lampau (identitas ini tercakup ke dalam identitas budaya yang lebih luas), identitas nasional Tionghoa, identitas nasional lokal, identitas etnis, dan identitas kelas. Masing-masing tahapan identitas di atas bisa tidak berdiri sendiri, karena suatu hal yang wajar bagi setiap individu atau kelompok menganut lebih dari satu identitas pada satu waktu yang bersamaan. Hal inilah yang dikembangkan oleh Wang dalam identitas gandanya.¹³

Berdasarkan kerangka yang dijelaskan oleh Barth dan Wang, untuk konteks etnis Tionghoa Padang penulis melihat bahwa menjadi bagian dari sebuah perkumpulan seperti HBT menjadi sebuah unsur penting bagi etnis Tionghoa untuk mengukuhkan identitasnya. Perkumpulan tidak saja penting sebagai sarana eksistensi diri sebagai individu dan bagian dari kelompok, namun memiliki makna penting dalam proses pemaknaan terhadap kebudayaan dan identitas diri. Untuk itu, penulis bermaksud untuk mengembangkan sebuah model dalam pembentukan identitas Tionghoa di Indonesia yang dipengaruhi oleh interaksi, relasi dan adaptasi yang panjang dengan masyarakat lokal menghasilkan identitas yang unik, baik di dalam kelompok mereka maupun di luar kelompok mereka yang memberi penekanan pada kemampuan etnis tersebut bersaing dengan dominasi etnis lain dan bagaimana pengaruh lokal memberi warna dalam pembentukan identitas Tionghoa Padang. Dalam proses rekonstruksi identitas tersebut perkumpulan memainkan peranan yang sangat penting. HBT maupun HTT dalam hal ini menjadi wadah sekaligus bagian dari identitas itu sendiri yang menjadikan Tionghoa Padang kokoh dalam komunitasnya dan menjadi kekuatan dalam membangun relasi dengan kelompok di luar mereka maupun kelompok sosial lainnya.

¹² Wang Gungwu, "Kajian Tentang Identitas Orang Cina Asia Tenggara", dalam Jennifer Cushman & Wang Gungwu (ed), *Perubahan Identitas Orang Cina di Asia Tenggara* (terj), Jakarta: PT. Temprint, 1991, hlm. 13-16.

¹³ *Ibid.*, hlm 13-23.

Penelitian tentang etnis Tionghoa di Indonesia sudah banyak dilakukan.¹⁴ Ini menunjukkan bahwa fenomena tentang etnis Tionghoa di Indonesia telah menarik begitu banyak peneliti, baik kajian lapangan maupun kepustakaan berupa buku, artikel, maupun laporan penelitian. Beberapa kajian terdahulu yang penulis kerjakan sejak tahun 1998 diawali dengan penulisan karya ilmiah Penulis berupa skripsi untuk studi sarjana di Jurusan Sejarah Universitas Andalas Padang yang diberi judul "*Himpunan Bersatu Teguh: Tinjauan terhadap Aktivitas Sosial Budaya 1965-1990*". Tindak lanjut dari karya tulis di tingkat sarjana tersebut dilanjutkan dengan mengembangkan kajian terhadap etnis Tionghoa dengan Penelitian Tesis S2 yang berjudul, "*Asap Hio di Ranah Minang Komunitas Tionghoa di Sumatera Barat dari Pertengahan Abad XIX sampai Awal Abad XX*". Karya tersebut sudah diterbitkan pada tahun 2006 oleh penerbit Ombak di Yogyakarta. Pengembangan terus dilakukan dalam penelitian tesis S3 yang berjudul "*Cina Padang Dalam Dinamika Masyarakat Minangkabau dari Revolusi sampai Reformasi*". Karya tersebut membahas secara menyeluruh tentang sejarah etnis Tionghoa di Kota Padang dan dinamika yang terjadi dalam konteks lokal. Di tahun 2006 atas kerjasama Jurusan Sejarah Universitas Negeri Padang dengan *Nederlands Instituut voor Oorlogdocumentatie* dilaksanakan sebuah Konferensi dan Workshop Internasional "*Indonesian Position on Decolonization 1930-1960*". Konferensi dan Workshop Internasional tersebut tidak saja melibatkan akademisi dalam dan luar negeri, namun juga melibatkan etnis Tionghoa yang menaruh perhatian terhadap penelitian tentang etnis Tionghoa di Indonesia. Selain itu juga telah dilakukan kerjasama dengan instansi di tingkat lokal seperti Dinas Pariwisata dan Pemerintah Kota Bukittinggi yang dilakukan di tahun 2006-2007 telah dipublikasikan di tahun 2007.

¹⁴Di antaranya adalah sejumlah karya para penulis seperti Leo Suryadinata, Mona Lohanda, Aime Darwis, J.A. Mackie, Donald E. Wilmot dan Melly G. Tan. Pada umumnya mereka menulis dalam konteks kolonial dan post-kolonial, yakni menelusuri perkembangan etnis Tionghoa dari era Pemerintahan Hindia Belanda sampai sekarang. Di samping yang berbentuk bunga rampai, karya-karya itu lebih banyak menggunakan metodologi naratif.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami gambaran secara lengkap tentang identitas etnis Tionghoa Padang. Pendekatan kualitatif didukung dengan data perpustakaan dan arsip. Ada beberapa alasan utama mengapa pendekatan kualitatif dianggap lebih tepat digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini.¹⁵ Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode sejarah, yaitu mencari, menemukan, dan menguji dan melakukan kritik terhadap sumber-sumber yang dikumpulkan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan fakta sejarah yang otentik dan dapat dipercaya. Sumber-sumber tertulis yang diteliti meliputi arsip berupa dokumen, surat kabar, artikel, majalah, laporan lembaga/organisasi Tionghoa, dokumentasi foto, dan buku-buku ilmiah.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan arsip.¹⁶ Studi pustaka dilakukan sebagai langkah awal dalam penelitian dengan mengumpulkan dan menelaah literatur berupa buku, artikel-artikel, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan topik. Studi pustaka dilakukan di Perpustakaan Nasional Jakarta, Perpustakaan Daerah Sumatera Barat, dan Perpustakaan Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Sementara, itu penelusuran terhadap dokumen dilakukan di Arsip Nasional Jakarta. Sumber tertulis berupa dokumen yang digunakan terdiri dari; pertama dokumen resmi negara, baik yang berasal dari dokumen Pemerintah Hindia Belanda maupun dokumen Pemerintah Indonesia, seperti *Staatsblad*, Keppres, Peraturan Presiden RI, Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera, Instruksi Presiden RI, serta Instruksi Pressidium Kabinet. Dokumen resmi tersebut menjadi khasanah Arsip Nasional RI (ANRI) Jakarta. Arsip lain yang digunakan adalah arsip lembaga social,

¹⁵ Matthew B. Miles and A. Michel Huberman, *Qualitative Data Analysis*, London: Sage Publication, 1994, hlm. 17.

¹⁶ Max Travers mengatakan bahwa teknik pengumpulan data yang menggunakan teknik pengumpulan data tertulis, observasi dan wawancara sekaligus dinamakan dengan teknik etnografi. Teknik ini membutuhkan keseriusan peneliti untuk mengamati sekelompok orang tertentu untuk mengetahui pandangan hidup (*way of life*) orang yang diteliti. Lihat lebih lanjut Max Travers, *Qualitative Research through Case Studies*, London: Sage Publication, 2001, hlm. 3.

budaya, dan pemakaman berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Marga, Himpunan Tjinta Teman, Himpunan Bersatu Teguh (HBT), PSKP-Santu Yusuf. Laporan tahunan, baik dari perkumpulan marga maupun perkumpulan sosial, budaya, dan pemakaman yang ada di Padang menjadi sumber primer bagi penulisan ini. Beberapa arsip perkumpulan yang telah didapatkan antara lain; *Huishoudelijk Reglement, Heng Beng Tong*, Padang, 4 Juni 1924, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Bersatu Teguh 1987, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Tjinta Teman 1967, dan catatan/ buku harian Keluarga Lie. Selain itu, penelitian dilengkapi dengan bahan publikasi dari koran dan majalah, seperti Harian Haluan, surat kabar Sin Po, Harian Singgalang, Buletin ISDB, publikasi Klenteng, bulletin perkumpulan, majalah Sentosa Himpunan Bersatu Teguh, dan dokumen lainnya.

Untuk melengkapi dokumen penelitian juga dilakukan Koninklijk Instituut voor Taal- Land en Volkenkunde (KITLV) di Kuningan Jakarta. Penelitian di lembaga ini penting dilakukan mengingat banyak dokumen Indonesia yang tersimpan di sana. Penelusuran dokumen HTT dan HBT, persoalan Warga Negara Timur Asing akan sangat membantu proses rekonstruksi dalam penelitian ini. Selain itu foto-foto juga menjadi dokumen penting yang dapat memberikan gambaran tentang kehidupan Tionghoa Padang pada masa Pemerintah Hindia Belanda.

Data yang sudah diperoleh dikritik secara interen maupun eksteren, setelah itu diklasifikasikan sesuai dengan kronologisnya.¹⁷ Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis prosesual dan struktural. Analisis prosesual digunakan untuk menguraikan dan menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya identitas etnis Tionghoa Padang. Selanjutnya analisis struktural digunakan untuk menganalisis pengaruh perkumpulan sosial, budaya, dan pemakaman HTT atau HBT, kebijakan lokal serta politik negara terhadap pembentukan identitas etnis Tionghoa di

¹⁷ Gilbert J. Garraghan, S.J, *A Guide to Historical Method*, New York: Fordham University Press, 1957, hlm. 108.

kota Padang.¹⁸ Analisis struktural juga diharapkan dapat menggambarkan peranan perkumpulan HTT dan HBT dalam menjaga eksistensi etnis Tionghoa dalam perubahan politik lokal dan negara. Fakta yang sudah diperoleh dari sumber-sumber sejarah bersama-sama dengan konsep yang digunakan disusun ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh, sehingga proses eksplanasi akan menghasilkan penulisan sejarah analitik.

¹⁸ Mengenai model analisis struktural lihat Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia, 1993, hlm. 100-101.

BAB II

PADANG DALAM KONTEKS RUANG

A. Letak Geografis dan Keadaan Alam

Defenisi mengenai Padang terdapat dalam banyak versi, di antaranya adalah versi Tambo dan versi Hofman¹. Hofman mengatakan bahwa Padang dulunya adalah daerah dataran rendah berupa lapangan besar dan luas yang dikelilingi oleh Bukit Barisan. Dataran rendah tersebut kemudian diketahui sebagai tempat bermukim bagi para penangkap ikan, pedagang, dan petani garam.² Selanjutnya pendapat Hofman didukung oleh Mardanas Safwan dkk juga mengatakan bahwa Padang merupakan suatu dataran rendah yang luas dengan bukit yang tidak begitu tinggi dan sebagian daerahnya berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. Wilayah Padang yang berada di pantai menyebabkan keadaan alam sangat membentuk kehidupan masyarakat dan sistem pemukimannya.³

Selanjutnya, Tambo mengatakan bahwa Padang merupakan hutan lebat yang masih didiami oleh orang Rupit (Tirau) dari pesisir. Selanjutnya Tambo mengatakan bahwa seorang Datuk Minangkabau belum pernah datang dan menemukan sebuah

¹ Hofman adalah seorang *Opper Koopman* pada tahun 1710, yaitu seorang wakil Belanda yang ditempatkan di daerah yang belum di taklukkan. Dalam bahasa Minangkabau, *Koopman* (*Commandeur*) yang berarti Tuanku Kemendur. *Opper Koopman* bertugas mengatur strategi dagang dan mengamankan pos-pos niaga di Air Hadji, Batang Kapas, Pulau Tjinkuk, Ulakan, Pariaman, Tiku, Air Bangis, Singkil, dan Barus. Dalam menjalankan tugasnya, *Opper Koopman* dibantu oleh *Onder-Koopman*, yaitu komandan pasukan dengan pangkat Letnan Muda "*Vandrig*". *Opper Koopman* dan *Onder-Koopman* tinggal didalam benteng di Muara Padang. Lihat lebih lanjut E. Netscheer, *Padang In Het Laatst Der XVIII*, Batavia: Bataviaasch Genootschap Van Kunsten En Wetenschappen, *Verhandelingen Van Het Bataviasch Genootschap Van Kunsten En Wetenschappen* 41, 1881, hal III-V.

² Freek Colombijk, *Paco-paco (Kota) Padang: Sejarah Sebuah Kota di Indonesia pada abad 20 dan Penggunaan Ruang Kota*, Jogjakarta: Ombak, 2006, hal 55.

³ Mardanas Safwan, dkk, *Sejarah Kota Padang*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan direktora Sejarah dan Nilai Tradisional, 1987, hal.1.

pisau (*pedang*) yang bertuliskan “*Lailahailallah Moehammad Rasoel Allah*” dalam bahasa Arab. Pedang tersebut kemudian dijadikan sebagai nama Padang.⁴

Secara geografis Padang terletak di tengah pulau Sumatera pada 0° 56° LS dan 100° BT dengan ketinggian 1 sampai 5 meter dari permukaan laut. Letak Padang di pinggir pantai menyebabkan suhu di daerah ini antara 20° C sampai 32° C. Padang memiliki luas daratan 694.96 km² atau 1,65% dari seluruh luas Provinsi Sumatera Barat. 60% wilayah Kota Padang merupakan perbukitan dan kawasan hutan lindung. Daerah perbukitan membentang dari arah timur ke selatan kota. Bukit-bukit tersebut di antaranya adalah Bukit Lampu, Gunung Padang, Bukit Gado-gado, Bukit Pegambiran, dan bukit lainnya. Selain itu Padang memiliki garis pantai sepanjang 19.800 meter dengan 19 pulau kecil yang berjejer di sepanjang Pantai Barat Sumatera.⁵ Pulau tersebut di antaranya Pulau Sikuai, Pulau Pisang (besar dan kecil), Pulau Cubadak, Pulau Sirandah, Pulau Sironjong, dan pulau lainnya.

Sebagai daerah pantai, Padang memiliki ombak yang cukup tinggi dibanding rata-rata ombak di seluruh wilayah Indonesia, yaitu dengan ketinggian 130 cm. Keganasan ombak pantai Padang yang dikenal dengan *Ombak Puruih* sering menyebabkan terjadi pengikisan pantai (abrasi) dengan rata-rata 20 cm/tahun. Akibatnya daratan pantai Padang sering mengalami penyempitan dan pengurangan lahan setiap tahun. Untuk mengatasi abrasi kemudian dibangun krip-krup (riol-riol) guna memecah ombak.⁶

⁴ Tanpa pengarang, *Padang Pintu Gerbang Pantai Barat Indonesia*, Padang: Sumatera Offset, 1989, hal 21.

⁵ Mardanas Sofwan dkk, *Sejarah Kota Padang*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1987, hal 41

⁶ Gusti Asnan, *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera*, Yogyakarta: Ombak, 2007, hal. 26-27. Untuk mengatasi pengikisan pantai, Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1911-1918 membuat *krip-krup* sebagai pemecah ombak. *Krip-krup* tersebut sangat bermanfaat untuk mengatasi abrasi (pengikisan pantai) sehingga bisa menghindari perluasan pantai. Pembangunan *krip-krup* dilakukan sekaligus dengan pembangunan banjir kanal untuk mengatasi banjir yang sering melanda Padang. Lihat lebih lanjut *Memorial Pelaksanaan Tugas Walikotamadya KHD. Tingkat II Padang H. Syahrul Ujud S.H 1983-1993*, Padang: Bung Hatta University Press, 1993, hal 7-14

Di Padang bermuara sebanyak 6 sungai besar dan 16 sungai kecil yang memiliki peran penting bagi penduduk Kota Padang. 6 sungai besar di antaranya adalah Sungai Batang Air Dingin, Sungai Batang Kandis, Sungai Pisang, Sungai Batang Arau, Sungai Batang Kuranji, dan Sungai Batang Timbunan. Dari keenam sungai tersebut, sungai Batang Arau yang juga sering disebut Sungai Padang merupakan sungai terpanjang, sekitar 25 km dari hulu di kaki Bukit Barisan hingga muara di pantai Samudera Indonesia. Muara sungai Batang Arau kemudian berkembang menjadi pemukiman penduduk dan pelabuhan.



Gambar 1. Pelabuhan Muara

Letak Padang yang strategis di tengah Pulau Sumatera menyebabkan daratan rendah ini kemudian menjadi tujuan bagi orang dari berbagai daerah. Pada mulanya, Padang dihuni oleh penduduk dari pesisir utara dan selatan pulau Sumatera. Pemukiman penduduk Padang mulanya berawal dari proses pertumbuhan Muara Padang dari perkampungan kecil yang terletak di pinggiran sungai Batang Arau menjadi pusat perdagangan. Perkembangan Muara Padang menjadi pemukiman tidak terlepas dari kebutuhan orang Minangkabau berhubungan dengan orang-orang yang

berada di luar Minangkabau untuk mendapatkan komoditi asing dan menambah pengetahuan.

Pelabuhan Muara muncul sebagai perkampungan di pinggiran selatan Batang Arau yang saat ini dinamakan dengan Seberang Padang. Seperti kawasan rantau Minangkabau lainnya, kawasan daerah pesisir pantai barat Sumatera berada di bawah pengaruh Kerajaan Pagaruyung yang berpusat di Tanah Datar. Pemukiman pendatang ini kemudian berkembang di bagian seberang Sungai Batang Arau. Sementara itu di bagian selatan sungai Batang Arau merupakan daerah perbukitan yang dinamakan dengan Gunung Padang untuk bukit yang tinggi dan Gunung Monyet untuk bukit yang lebih rendah, atau yang sering disebut bukit Siti Nurbaya. Gunung Monyet terletak di ujung mulut Muara dan berfungsi melindungi Muara dari angin laut.

B. Rantau dan dominasi Kebudayaan Minangkabau

Merantau merupakan proses migrasi orang Minangkabau untuk mencari tempat penghidupan. Rantau Minangkabau adalah daerah di luar dari "*luhak nan tigo*" sebagai daerah awal atau pusat kehidupan orang Minangkabau. Winstedt mengatakan bahwa merantau berasal dari istilah melayu dengan kata asal rantau yaitu dataran rendah atau daerah aliran sungai yang terletak di pesisir. Rantau yang mendapat awalan kata "me" memiliki arti "pergi kerantau". Dalam bahasa Minangkabau, merantau (*pai marantau*) merupakan sebuah proses meninggalkan *luhak nan tigo* menuju daerah rantau *nan tigo jurai* meliputi hulu Sungai Batanghari, hulu Sungai Batang Kuantan, hulu Sungai Kampar Kiri. Secara sosiokultural, merantau merupakan aktivitas keluar dari alam Minangkabau sebagai kampung halaman.⁷ Dari sudut sosiologi istilah merantau mengandung arti meninggalkan

⁷ Mina Elfira, "The Contributions of Minangkabau Women, Who Established Intercultural Marriages, in Creating A New Identity of The Minangkabau Diaspora", dalam Isbandi Rukminto Adi, Rochman Achman (ed), *Competition and Cooperation in Social and Political Science*, London: Routledge, 2017

kampung halaman; dengan kemauan sendiri; untuk jangka waktu lama atau tidak; dengan tujuan mencari penghidupan, menuntut ilmu atau mencari pengalaman; biasanya dengan maksud kembali pulang; dan rantau ialah lembaga yang membudaya.⁸ Rantau merupakan pintu gerbang bagi masuknya ide-ide baru yang berasal dari luar. Rantau Minangkabau terdiri atas Rantau Hilir dan Rantau Pesisir. Rantau Hilir terletak di kawasan timur, Rantau Pasaman di kawasan utara, Rantau Solok, Sungai Pagu, dan Sijunjung di kawasan selatan daerah *darek*.

Dari segi adat, kedudukan rantau sama dengan luhak. Rantau memiliki otonomi sendiri seperti halnya dengan luhak. Ibarat kata pepatah “*di darek bapanghulu, di rantau barajo*”. Maksudnya adalah bahwa rantau berhak mengurus dirinya sendiri, mengurus kekayaan rantaunya, membangun kehidupan ekonominya, dan menetapkan pemimpinya berlandaskan kepada adat Minangkabau. Perbedaannya terletak pada kewajiban rantau untuk membayar upeti kepada kerajaan. Selain itu rantau juga berkewajiban membayar bea penjualan barang ke luar negeri, biaya pelabuhan dan biaya masuk. Sebagai rantaunya Minangkabau, maka rantau Padangpun memiliki kewajiban yang sama dengan daerah rantau lainnya.

Sebagai rantaunya orang Minangkabau, maka 90% penduduknya adalah orang Minangkabau yang berasal dari *luhak nan tigo* dan dari daerah rantau Minangkabau lainnya. Tambo Minangkabau membagi alam Minangkabau menjadi dua, yaitu darek (*luhak nan tigo*) di pedalaman dengan rantau (daerah pinggiran termasuk pesisir barat). Jika nagari di darek (*luhak nan tigo*) diperintah oleh penghulu, maka rantau diperintah oleh raja. Pertumbuhan Padang sebagai pintu gerbang hubungan orang Minangkabau dengan bangsa asing menyebabkan penduduk Padang semakin ramai. Peningkatan jumlah orang Minangkabau diikuti oleh berkembangnya kebudayaan Minangkabau sebagai kebudayaan yang dominan dan untuk menjalankan system pemerintahan di rantau, maka di Padang kemudian dipimpin oleh *Delapan Suku*.

⁸ Mochtar Naim, *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013, hal 3.

C. Pusat Perdagangan

Perkembangan Sungai Batang Arau juga dipengaruhi oleh ekspansi Kesultanan Aceh yang sedang mengalami kejayaannya sejak abad ke-15. Pada masa itu, Kesultanan Aceh menguasai bandar-bandar dagang di sepanjang Pantai Barat Sumatera, di antaranya adalah Bandar Singkel, Barus, Sibolga, Natal, Air Bangis, Pariaman, Padang dan Indrapura.⁹ Bandar Padang dikunjungi para pedagang untuk mendapatkan emas, lada, pala dan hasil produksi Minangkabau lainnya setelah Bandar Pariaman dikuasai oleh Kesultanan Aceh. Seiring dengan kejatuhan Malaka ke tangan Portugis tahun 1511 terjadi pula perubahan rute pelayaran perdagangan pedagang-pedagang Muslim dari Arab, India, serta pedagang Asia lainnya seperti pedagang dari Tiongkok.

Perubahan rute perdagangan menuju Nusantara yang semula melalui Selat Malaka berubah ke pesisir Pantai Barat Sumatera. Perubahan rute perdagangan dari Teluk Benggala mendorong Aceh berkembang menjadi pelabuhan besar. Para saudagar dari berbagai bangsa, seperti Eropa, India, Tiongkok, Arab dan dari negara lainnya berusaha untuk mendapatkan hasil bumi langsung dari daerah penghasil. Sebagai penguasa Padang, Kesultanan Aceh mengontrol seluruh aktivitas perdagangan yang terjadi di Padang dengan memperkuat pengawasan dan menempatkan perwakilannya. Semua produk yang diperdagangkan di kawasan muara Sungai Batang Arau harus sepengetahuan raja atau wakil Kesultanan Aceh, terutama perdagangan lada dan emas. Di bawah kekuasaan Sultan Iskandar Muda, hasil bumi yang diperjualbelikan kepada pedagang asing mengalami kontrol yang ketat, sehingga pedagang dari Tiongkok, Eropa dan Gujarat dilarang berdagang langsung dengan pedagang lokal.¹⁰

Sebelum memasuki kawasan Pantai Barat Sumatera, setiap kapal harus melewati Aceh yang terletak di ujung Utara Pulau Sumatera. Ketika Sultan Iskandar

⁹ Christine Dobbin, terj, *Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah: Sumatera Tengah 1784-1847*, Jakarta: IMS, 1992, hlm. 57-58.

¹⁰ Christine Dobbin, *ibid.*, hlm. 86-89.

Muda naik tahta pada tahun 1607, hampir semua bandar dagang di Pantai Barat Sumatera dikuasai oleh Aceh.¹¹ Di bawah kekuasaan Aceh, Padang berkembang menjadi bandar dagang yang ramai dikunjungi oleh para pedagang, baik pedagang keliling Minangkabau maupun pedagang asing.¹² Pedagang keliling Minangkabau yang semula membawa barang dagangan mereka melalui jalur sungai menuju Pantai Timur Sumatera beralih ke Pantai Barat seiring dengan pertumbuhan Padang menjadi kota pelabuhan.

Akibat kontrol Aceh yang ketat terhadap perdagangan di Padang, tujuh dari penghulu Nan Delapan Suku di bawah pimpinan Rang Kayo Kaciek yang semula berfungsi sebagai pialang pantai, kemudian melakukan kerjasama dengan *Vereniging Oost- Indische Compagnie* (VOC) untuk menghadapi Aceh.¹³ Akhirnya, karena hanya didukung oleh satu kelompok pialang saja, Kesultanan Aceh berhasil diusir dari Padang pada tahun 1663. Sejak saat itu, penguasa Padang beralih dari Aceh

¹¹ Kekuasaan Aceh di wilayah Minangkabau tidak saja melakukan monopoli terhadap perdagangan hasil bumi, tetapi juga ikut campur mengatur adat istiadat Minangkabau dengan melakukan tindakan represif terhadap masyarakat melalui akulturasi dan asimilasi budaya Aceh ke dalam budaya dan adat istiadat Minangkabau. Gusti Asnan, *op. cit.*, 2007, hlm. 57-59; Christine Dobbin, *ibid.*, hlm. 88-89.

¹² Pembagian daerah Minangkabau atas darek dan rantau menyebabkan orang Minangkabau memiliki mobilitas yang tinggi, terutama mereka yang memiliki mata pencaharian sebagai pedagang. Setiap daerah memiliki pasar yang dibuka secara bergiliran. Pada umumnya setiap pasar dibuka secara bergantian dengan aturan yang disepakati bersama. Pasar tersebut kemudian dinamakan sesuai dengan harinya, seperti Pokan Sonoyan (pasar di hari Senin), Pokan Salasa (pasar di hari Selasa), Pokan Robu (pasar di hari Rabu), Pokan Komih (pasar di hari Kamis), Pokan Jumat (pasar di hari Jumat), Pokan Sotu (pasar hari Sabtu), dan Pokan Akad (pasar di hari Minggu). Sistem pasar ini menyebabkan para pedagang menjajakan barang dagangannya berkeliling dari pasar yang satu ke pasar berikutnya secara bergantian. Pedagang keliling inilah yang kemudian berkembang dari darek menuju pasar di pelabuhan tempat mereka mendapatkan barang-barang dari luar Minangkabau dan menjual komoditi ekspor kepada pedagang asing. Pedagang yang kembali ke kampung untuk mendapatkan barang dagangan sambil melihat keluarga kemudian dinamakan dengan pedagang keliling. Lihat lebih lanjut Amir Syafuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta : Gunung Agung, 1984, hlm. 78-83.

¹³ Faktor yang mendukung eksistensi para pialang pantai ini adalah dominasi mereka atas perdagangan lada sebagai komoditi utama yang memiliki daya tawar tinggi dalam pangsa pasar domestik maupun Internasional pada abad XVI-XVII. Lihat lebih lanjut Djoko Suryo, *Agama dan Perubahan Sosial: Studi Tentang Hubungan Antara Islam, Masyarakat dan Struktur Sosial Politik Indonesia*, Yogyakarta: LKPSM, 2001, hlm.160.

ke Bangsa Belanda di bawah perusahaan dagang VOC.¹⁴ Peralihan kekuasaan ini membawa perubahan terhadap perkembangan dan perluasan wilayah Padang di masa berikutnya.

Berdasarkan Perjanjian Painan VOC kemudian memberikan perlindungan dan menguasai daerah-daerah yang menjadi tempat penanaman dan perdagangan lada. Kedatangan Belanda tahun 1667 disertai pembangunan *loji* VOC di sekitar Batang Arau berdampak terhadap perkembangan Padang menjadi sebuah kota pelabuhan. VOC menjadikan Padang sebagai pusat perdagangan mereka di Pantai Barat Sumatera, di samping pelabuhan Tiku, Pariaman, Barus, Bandar Sepuluh, dan Painan.



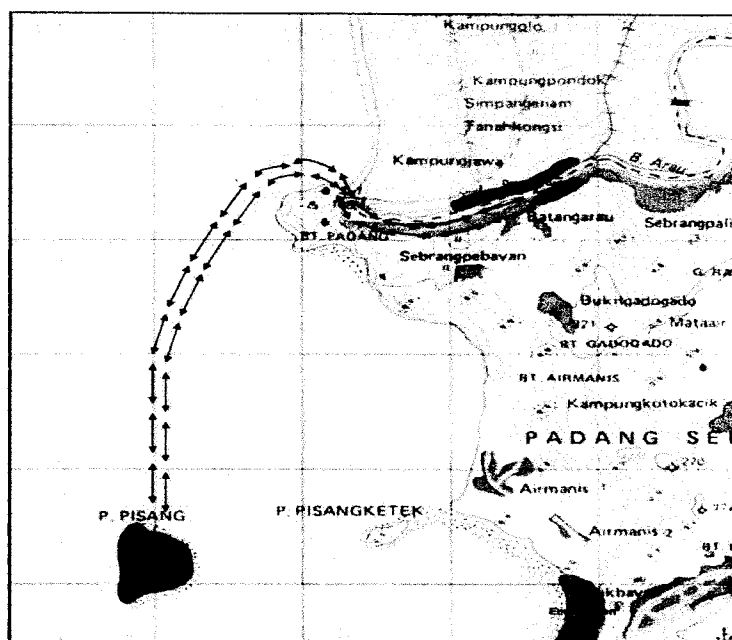
Gambar 2. Pelabuhan Muara Padang

Sumber:COLLECTIE_TROPENMUSEUM_De_Padangrivier_te_Padang_Sumatra's_Westkust_TMnr_60003520

¹⁴ Aceh secara resmi tidak lagi menguasai monopoli perdagangan di Padang melalui Perjanjian Painan yang diadakan pada tanggal 6 Juli 1663 antara VOC dengan Aceh. Perjanjian Painan menjadi awal kekuasaan VOC di Padang. Sebelum membuat *loji* di Padang, VOC pertama kali menguasai Bandar X, yakni di daerah Sungai Pagu. Daerah ini dipilih karena letaknya yang strategis untuk mengontrol jalur pelayaran baik keluar maupun ke dalam daerah Sumatra Barat. Lihat lebih lanjut Elizabeth E. Graves, *Asal Usul Elite Minangkabau Modern: Respons terhadap Pemerintah Hindia Belanda Abad XIX/XX*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 57.

Gambar di atas menunjukkan bahwa loji dan gudang-gudang VOC terletak berjejer di pinggir Sungai Batang Arau. Di hadapan loji dan gudang-gudang VOC tersebut terdapat Gunung Padang yang melindungi muara dari angin laut.

Secara geografis pelabuhan Muara Padang terlindung dari angin laut. Kondisi sungai yang dangkal serta adanya pertemuan arus sungai dan arus Laut Samudera Hindia di mulut muara menyebabkan kapal-kapal dagang yang berukuran besar tidak bisa memasuki dermaga pelabuhan di muara Sungai Batang Arau. Hal ini menyebabkan VOC menjadikan Pulau Pisang yang terletak di bagian Selatan Samudera Hindia sebagai dermaga untuk kapal-kapal besar berlabuh. Lihat gambar 4.

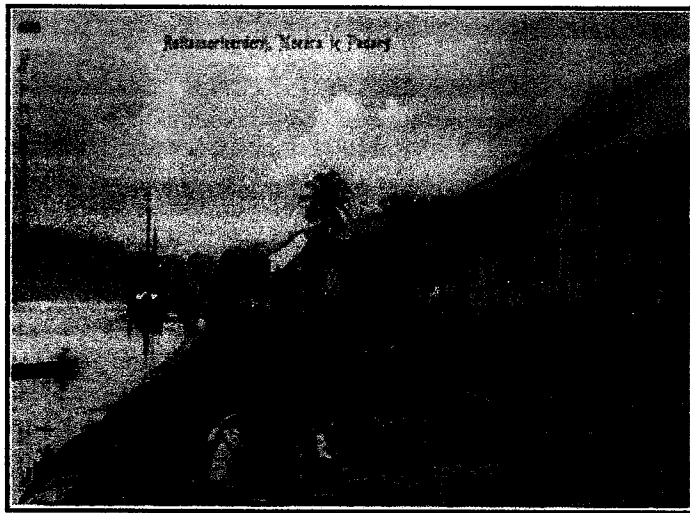


Gambar 3. Jalur Pelayaran dari Dermaga di Pulau Pisang menuju Pelabuhan Muara.

Sumber: Diolah dari Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional 1985.

Peta di atas menunjukkan bahwa Pulau Pisang yang terletak di Samudera Hindia menjadi tempat merapat bagi kapal-kapal asing yang berukuran besar karena

dermaga Pulau Pisang kecil membuat kapal-kapal besar tersebut merapat di dermaga Pulau Pisang mengikuti antrian sesuai dengan waktu kedatangan. Selanjutnya, kapal-kapal tersebut melakukan bongkar muat barang dagangan mereka untuk dibawa ke pelabuhan Muara di Sungai Batang Arau. Barang-barang tersebut dibawa dengan menggunakan perahu yang berukuran lebih kecil. Proses transportasi barang dari dermaga di Pulau Pisang menuju pelabuhan di Sungai Batang Arau membuka lahan kerja baru untuk ekspedisi laut yang banyak dikelola oleh perusahaan Belanda dan Tionghoa.¹⁵ Berikut adalah gambar dermaha di pelabuhan Muara Padang. Lihat gambar 5.



Gambar 4. Pelabuhan di Muara Sungai Batang Arau (Muara Padang)

Sumber: *Collectie Tropenmuseum Padang River Sumatra's te Westkust T.Mnr 60003520* & Reprint Boon Beheer BV o. boon@nemrud.nl.

Perang Eropa (1789-1815) yang mengakibatkan Belanda berada di bawah dominasi Perancis (1793-1795), ikut melemahkan kekuasaan VOC di Nusantara, termasuk di Padang. Secara Yuridis kerajaan-kerajaan di Nusantara waktu itu berada

¹⁵ Ekspedisi laut dengan menggunakan kapal kecil juga membawa hasil bumi dari pelabuhan Pariaman ke Muara Padang. Lihat lebih lanjut, Christine Dobbin, *loc. cit.*, hlm. 86-90.

di bawah pengaruh Perancis sebagai pemenang perang.¹⁶ Kekalahan Belanda dari Perancis menyebabkan terjadi kevakuman kekuasaan (*Vacuum of power*), sehingga dengan mudah Padang menjadi sasaran penjarahan bajak laut berdarah Perancis yang bernama Francois Le Meme pada tahun 1793. Le Meme melakukan penjarahan, perampokan dan penaklukan terhadap Padang.¹⁷ Selain merampok rumah-rumah mewah, Le Meme juga menjarah makam-makam Tionghoa yang terletak di Gunung Padang untuk mengambil harta benda yang terkubur bersama jenazah.¹⁸ Kevakuman kekuasaan juga memberikan peluang kepada pedagang perorangan untuk berdagang ke Padang. Bahkan perusahaan-perusahaan Belanda, pedagang Inggris, Tamil dari India, dan pedagang Tionghoa dari pelabuhan milik Inggris di Penang yang berdiri sejak tahun 1786 mulai memasuki Padang dan pelabuhan-pelabuhan lainnya di sepanjang Pantai Barat Sumatera.¹⁹

Perang Perancis dengan Inggris yang diikuti oleh Belanda tahun 1795 kemudian dimenangkan oleh Inggris. Sebagai pemenang, pihak Inggris memaksa Belanda menyerahkan beberapa daerah kekuasaannya di kepulauan Nusantara. Akibatnya pada tanggal 30 November 1795 beberapa daerah di Pantai Barat Sumatera diserahkan ke tangan Inggris.²⁰ Meskipun begitu, di sepanjang Pantai Barat Sumatera masih terdapat beberapa penduduk Belanda yang berdagang lada secara individu.

¹⁶ Di tahun 1781, lima kapal Inggris berhasil menduduki Padang tanpa perlawanan senjata yang berarti dari VOC, tetapi melalui perjanjian "Paris" tahun 1784 dan Traktat London pada tahun 1814 (Perang Napoleon) kemudian disepakati bahwa Belanda kembali menguasai Padang. Akibatnya Inggris mulai menarik diri dari daerah pesisir dan sejak bulan Mei 1819 Padang berada di bawah Pemerintah Hindia Belanda. Lihat lebih lanjut Freek Colombijn, *loc. cit.*, hlm. 56-57; Christine Dobbin, *loc. cit.*, hlm. 106.

¹⁷ Gusti Asnan, *Kamus Sejarah Minangkabau*, Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 2003, hal 159.

¹⁸ Freek Colombijn, *ibid.*, hlm.59-60.

¹⁹ Penang merupakan wilayah baru yang dibuka oleh Pemerintah Inggris di bawah pimpinan Francis Light tanggal 11 Agustus 1786. Daerah ini diperuntukkan sebagai tempat bermukim bagi orang Tionghoa yang dinilai berpotensi untuk mengembangkan perdagangan Inggris di Malaka. Victor Purcell, (terj) Nik Hasnaa Nik Mahmud, *Orang-orang Cina di Tanah Melayu*, Universiti Teknologi Malaysia: Cetak Ratu SDN, BHD, 1997, hlm. 43.

²⁰ Puncaknya pada tahun 1815, tentara Inggris memainkan peran penting dalam mengalahkan pasukan Napoleon pada pertempuran Waterloo.

Sejak orang Inggris berada di Padang, perdagangan menjadi lebih terbuka. Dipelopori oleh Thomas Stamford Raffles melalui *Indisch East Company* (IEC) berhasil masuk pada bulan Juli 1818 ke dataran tinggi Minangkabau sebagai orang Eropa pertama yang pernah ke sana. Raffles mengunjungi lembah Singkarak-Solok-Tanah Datar dan kemudian berhasil membuat kesepakatan dengan para penguasa di daerah lembah. Kesepakatan dibuat dengan menandatangani perjanjian dengan 13 Nagari yang terletak di lembah Solok. Akibat dari perjanjian tersebut, para Penghulu yang ada di Solok sepakat menyerahkan Tanah Pesisir di Pantai Barat Minangkabau kepada perusahaan Inggris. Para Penghulu Solok bersedia menandatangani perjanjian tersebut karena perasaan cemas akan kembalinya kekuasaan Belanda (VOC) ke Padang. Pada tanggal 24 Juli 1818, Raffles kembali menandatangani perjanjian dengan Pagaruyuang dan mengakui "*Rajah Minangkabau*" sebagai sahabat. Perjanjian persahabatan ini merupakan aliansi antara Raja Minangkabau dengan "*The Honble The English East India Company*". Isi perjanjian ini menerangkan bahwa keluarga Minangkabau dapat meminta dukungan militer Inggris dari serangan unsur-unsur luar yang ingin mendapat keuntungan dari perdagangan komoditi ekspor Minangkabau. Sebagai imbalannya, Kerajaan Minangkabau menyerahkan kepada perusahaan Inggris kedaulatan penuh atas semua tanah di sebelah Barat perbukitan sampai ke laut, termasuk pulau-pulau yang terletak sampai ke seberang Indrapura dan Natal. Perjanjian ini juga mengizinkan Inggris menguasai jalan tembus antara kerajaan Minangkabau dengan Pantai Timur yang dikenal sebagai Jalur Emas Minangkabau.²¹

Pada tahun 1814, Inggris mengembalikan Padang kepada Kerajaan Belanda dengan membentuk pemerintahan baru di bawah Pemerintah Hindia Belanda. Dampak peperangan Belanda dengan Inggris adalah dikuasainya loji-loji Belanda di Sumatera Barat oleh Inggris termasuk kantor dagang di Padang pada tahun 1811-1816. Baru pada tahun 1819 Belanda kembali masuk ke Padang, namun sudah dalam

²¹ Christine Dobbin, *loc.cit.*, hlm, 11-12.

bentuk Pemerintah Hindia Belanda.²² Sejak saat itu Padang tidak lagi dipertahankan sebagai pos perdagangan sebagaimana yang dilakukan oleh VOC sebelumnya, melainkan dibentuk sebagai daerah jajahan Pemerintah Hindia Belanda.²³

Secara perlahan-lahan wilayah Minangkabau satu persatu berhasil ditaklukkan dan masuk ke dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Untuk menguasai daerah pesisir Minangkabau, Pemerintah Hindia Belanda yang diwakili James Du Puy pada tanggal 10 Februari 1821 membuat perjanjian dengan kemenakan Raja Alam Minangkabau. Meskipun Padang sudah berada di bawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda, namun sampai tahun 1827 kapal-kapal Amerika dan Inggris masih sering mengunjungi Padang. Baru setelah terjadi gempa bumi yang besar pada tahun 1833 Padang mulai kurang diminati.²⁴ Padang yang awalnya masih kumuh, meski sudah dihuni oleh pedagang asing seperti Eropa dan Tionghoa, namun secara perlahan Padang berubah menjadi kota perdagangan yang ramai dan menjadi pusat administrasi Pemerintah Hindia Belanda.

Sementara itu, di pedalaman Minangkabau sedang terjadi pergolakan politik. Perang Paderi yang berkejolak antara tahun 1820-1830 ikut mempengaruhi mundurnya pelabuhan Padang.²⁵ Hanya ada dua pelabuhan yang berkembang di pesisir Pantai Barat Sumatera saat itu, yaitu Tiku di Utara dan Painan di Selatan. Pada tahun 1824, Komandan A.V Micheils berhasil menaklukkan beberapa daerah di pedalaman Minangkabau seperti Pagaruyung, Saruaso, Sungai Tarab, Lima Kaum dan Batipuh. Usaha penaklukan wilayah Minangkabau menjadi bagian wilayah kekuasaan Hindia Belanda mengalami kesuksesan di tahun 1838 ketika pimpinan Padri berhasil ditangkap dan kemudian diasingkan.

²² Lucas Partanda Koestoro, *Padang, Kota Andaleh di Pesisir Barat Sumatera*, Medan: Balai Arkeologi Medan, 2007, hal 2.

²³ Freek Colombijn, *loc.cit.*, hlm. 60-61.

²⁴ Terjadi dua kali gempa besar di Padang, yaitu pada tahun 1797 dan 1833. Kedua gempa tersebut melumpuhkan Padang dan Padang menjadi kota yang kumuh. Lihat lebih lanjut Christine Dobbin, *loc.cit.*, hlm.120-122.

²⁵ Muhammad Radjab, *Perang Paderi*, Jakarta: Balai Pustaka, 1964, hlm. 44.

Untuk menjalankan pemerintahan dan memudahkan kontrol terhadap daerah-daerah yang dikuasai, kemudian Pemerintah Hindia Belanda membagi Minangkabau atas dua wilayah administratif yaitu Padang Darat (*Padangsche Bovenlandden*) dan Padang Pesisir (*Padangsche Benenlandden*). Untuk menghubungkan daerah Padang Darat dengan Padang Pesisir, maka pada tahun 1841 Pemerintah Hindia Belanda membangun jalan untuk lalu lintas pedati. Jalan tersebut kemudian digunakan untuk transportasi kopi melewati Lembah Anai menuju pelabuhan Pariaman dan muara Sungai Batang Arau.²⁶

Pembentukan Residentie Padang En Onderhoorigheden pada tahun 1823 pada dasarnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses masuknya ide-ide baru ke Minangkabau. Pembentukan unit administratif merupakan bentuk lain dari ungkapan “adat menurun, syarak mendaki”. Maksudnya para penghulu dari Tanah Datar yang dipimpin oleh Sutan Bagagar Syah turun ke Padang meminta bantuan Belanda menghadapi Paderi. Selanjutnya Belanda naik atau mendaki ke *darek* untuk membantu kaum-kaum penghulu yang kemudian menanamkan kekuasaannya di sana.²⁷

Pada mulanya Belanda membentuk Residentie Padang En Onderhoorigheden (Residensi Padang dan daerah taklukannya). Pembagian daerah administratif ini menjadi dua distrik, yaitu distrik Padang dan distrik Minangkabau yang pada tahun 1823 kemudian menjadi Afdeeling Padangsche Benedenlanden dan Afdeeling Padangsche Bovenlanden pada tahun 1825. Pembagian antara kedua Afdeeling ini pada dasarnya mengacu pada pembagian tradisional daerah budaya Minangkabau yaitu daerah rantau (rantau pesisir) dan *darek* (luhak nan tigo).

²⁶ Sebelum kolonial nagari Minangkabau bukanlah sebuah nagari yang tertutup, tetapi nagari berdasarkan institusi sosial ekonomi yang siap untuk memasuki aktivitas ekonomi yang komersial. Lihat lebih lanjut Christine Dobbin, *op.cit.*, hlm. 55-70; Ahmad Dt. Batuah, *Tambo Minangkabau dan Adatnya*, Djakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1956, hlm. 64.

²⁷ Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regionalisme Sumatera Barat Tahun 1950-an*, Jakarta : Yayasan Obor, 2007, hal 8-9.

BAB III

ETNIS TIONGHOA DI KOTA PADANG

A. Sejarah kedatangan

Proses kedatangan Etnis Tionghoa ke Padang tidak dapat diketahui secara pasti, berangkat dari pendapat Victor Purcell, diketahui bahwa proses masuknya Etnis Tionghoa ke Nusantara dapat dibagi menjadi tiga fase. Fase pertama yaitu pada masa kerajaan Nusantara, hubungan ini didorong oleh adanya hubungan dagang antara kerajaan Tiongkok dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Fase kedua terjadi pada masa kedatangan Bangsa Eropa, terjadi ketika Malaka muncul sebagai bandar dagang terbesar di Asia Tenggara pada abad ke 16. Fase ketiga terjadi pada masa Nusantara di bawah Pemerintah Hindia Belanda.

Masuknya Etnis Tionghoa pada fase pertama ialah melalui hubungan perdagangan antara Tiongkok dengan Nusantara. Hubungan antara Tionghok dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara terbina dalam bentuk hubungan sebagai *Negara Vassal*, karena pada dasarnya Kerajaan Tiongkok tidak mengakui adanya *Negara Koloni*.¹ Atas dasar inilah, dapat dikatakan bahwa tidak benar jika kepulauan Nusantara atau Indonesia dulunya berada di bawah dominasi Tiongkok, terlihat dari bentuk hubungan yang terbina antara Tiongkok dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara dengan banyaknya dikirimkan duta-duta kerajaan baik dari Tiongkok ke kerajaan Nusantara ataupun dari kerajaan-kerajaan Nusantara ke Tiongkok. Secara teratur diketahui Raja-raja Jawa melakukan perdagangan dengan cara mengirimkan duta-duta kerajaannya ke Tiongkok. Begitu pula sebaliknya, kerajaan Tiongkok mengirimkan ekspedisi perdagangan mereka sebagai utusan dan untuk menunjukkan

¹ Sistem Negara Vassal yang dianut oleh Tiongkok tidak berbentuk negara koloni tetapi menerapkan sistem upeti untuk menunjukkan bahwa daerah yang telah ditaklukkan mengakui keberadaan Tiongkok. John Wang, *Politik Perdagangan Cina di Asia Tenggara*, Jakarta: Bumi Aksara, 1987, hlm. 14-15.

rasa hormat, Raja Tiongkok kemudian mengirimkan cendera mata berupa keramik, sutra, lukisan, maupun benda-benda berharga lainnya. Hubungan antara Kerajaan Tiongkok dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara tidak saja terjalin dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa, tetapi juga berkembang hingga ke Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera.²

Fase pertama ini menjadi awal terjalinnya hubungan antara orang-orang Tionghoa dengan masyarakat di kota-kota pelabuhan Nusantara. Etnis Tionghoa datang secara berkelompok dengan suatu ekspedisi yang dikelola langsung oleh Kerajaan Tiongkok, ekspedisi-ekspedisi tersebut berlangsung secara bertahap, seperti pengiriman ekspedisi Fa-Hsien (abad ke 4-5 M) dan ekspedisi Cheng Ho (abad ke 15 M).³ Kedatangan Etnis Tionghoa pada fase pertama ini bergantung kepada angin Muson, sehingga di beberapa bandar dagang di sepanjang pantai di kepulauan Nusantara ditemukan orang-orang Tionghoa yang merapat dengan perahu (*junk-junk*) mereka melakukan perdagangan sambil menunggu waktu untuk kembali ke kerajaan mereka.

Dari penemuan arkeologi dapat diketahui bahwa terdapat situs kuno di pedalaman Sumatera sekitar hulu Sungai Batanghari (Situs Rambahan) berupa barang-barang dagangan yang beragam dibawa dari Tiongkok, salah satunya adalah keramik Rajakula dari masa Dinasti Han (abad 5-6 M). Selain di Sungai Batanghari, barang-barang peninggalan dinasti yang berkuasa di Tiongkok juga ditemukan di Palembang dan Jambi, yaitu berupa keramik Rajakula pada masa Dinasti Tang (abad 7-8 M). Melalui jalur hilir Sungai Batanghari yang mengalir hingga ke wilayah Minangkabau juga banyak ditemukan peninggalan-peninggalan prasejarah berupa pecahan keramik Tiongkok dari masa Dinasti Song abad ke 12 sampai abad ke 14

² J.L. Vleming Jr, Terj, Bob Widayahartono, *Kongsi & Spekulasi: Jaringan Kerja Bisnis Cina*, Jakarta: PT. Temprint, 1988, hlm. 6-9.

³ Tan Ta Sen, *Cheng Ho Penyebar Islam dari China ke Nusantara*, Jakarta: Kompas, 2010, hlm. 83-213.

M.⁴ Ketika itu Pulau Sumatera dinamakan dengan *Cin-Cou* (benua emas) oleh para pedagang dari Tiongkok⁵ karena wilayah Sumatera terutama Sumatera Barat merupakan daerah penghasil emas, hal ini lah yang membuat banyak pedagang dari Tiongkok berdatangan ke Sumatra Barat atau Minangkabau. Perjalanan yang dilakukan oleh orang Tiongkok ialah melalui sungai dan disepanjang jalur sungai terdapat cabang-cabang anak sungai yang kemudian berkembang menjadi pos-pos (pasar) penampungan, tempat pertemuan dan transaksi jual beli atau saling tukar menukar barang (*barter*) produk komoditi ekspor antara pedagang Tionghoa dengan pedagang setempat. Barang yang berasal dari Tiongkok ditukar dengan barang milik pedagang Minang yang rata-rata terbuat dari emas. Penemuan Arkeologi menjadi salah satu pendukung adanya hubungan antara pedalaman Minangkabau dengan orang-orang (pedagang) dari Tiongkok melalui jalur Sungai Batang Kuantan, Sungai Batanghari, Sungai Kampar dan Sungai Siak yang mengalir dari pedalaman Minangkabau hingga bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan.⁶ Pos-pos

⁴ Tempat-tempat yang dikunjungi oleh utusan masing-masing Dinasti tidak dijelaskan secara rinci. Lihat lebih lanjut Sativa Sutan Azwar, *Antakusuma Suji Dalam Adat Minangkabau*, Jakarta: Djembatan, 1999, hlm.14-17.

⁵ Datuak Patih Karsani mengatakan bahwa Minangkabau (*darek* dan *rantau*) sudah didatangi oleh orang-orang dari Dataran Tiongkok sebelum kedatangan Bangsa Barat melalui Pantai Timur Sumatera. Pernyataan Datuak Patih Karsani ini didukung oleh tulisan H. Kern yang mengatakan bahwa sejak abad ke 5, Pulau Sumatera sudah sering dikunjungi oleh pendeta-pendeta Budha dari Tiongkok, di antaranya Fa Hian, Huen-Tsang dan I-Tsing. Kemana tujuan para pendeta Budha tersebut tidak dijelaskan, tetapi H. Kern kemudian menjelaskan bahwa pendeta Budha sering berkunjung ke Sumatera. Salah satunya ke Sriwijaya yang terletak di Pantai Timur di bagian Selatan Sumatera. Bagaimana perjalanan pelayaran pendeta-pendeta Budha sampai ke Sumatera, Kie-tja, Cri-Bodhja, Malajoe, dan kembali lagi ke Tiongkok diceritakan oleh Kern berdasarkan catatan-catatan perjalanan para pendeta Budha (Biksu) tersebut. Lihat lebih lanjut H. Kern, "Een Chineesch Reiziger op Sumatera", *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie, Tweede Nieuwe Serie*, Batavia: Bij G.Koolff & Co, 1897, hlm. 373-383.

⁶ Christine Dobbin, *Kebangkitan Islam Dalam Ekonomi Petani Yang Sedang Berubah: Sumatera Tengah 1784-1847*, Jakarta: INIS, 1992, hlm. 55-68.

penampungan tersebut kemudian berkembang menjadi tempat pemukiman baru dan rantau bagi orang Minangkabau, termasuk beberapa orang pedagang Tionghoa.

Hubungan antara Tiongkok dan Minangkabau sudah terjalin jauh sebelum keberadaan Kerajaan Pagaruyung dalam bentuk hubungan dagang lada. Peran Tiongkok antara Nusantara sebagai produsen dan Timur Tengah sebagai konsumen ialah sebagai pedagang perantara rempah-rempah.⁷ Selain membina hubungan dagang, kerajaan Tiongkok juga menjalin persahabatan antar kerajaan, termasuk dengan kerajaan Pagaruyung di pedalaman Minangkabau. Hubungan persahabatan terlihat dari adanya berita Cina yang menyatakan bahwa Adityawarman pernah mengirim utusan ke Cina sebanyak enam kali selama rentang waktu 1371-1377.⁸ Sumber Tiongkok lain mencatat tentang kedatangan utusan dari *Nan-yang* (Negeri Selatan) sekitar awal abad ke 6 M, yaitu ninik mamak Minangkabau Sultan Balun yang kemudian bergelar Datuk Perpatih Nan Sabatang, Pamuncak dari kelarasan Bodi Caniago. Datuk Perpatih dikabarkan merantau ke Siam, Indocina dan ke negeri Tiongkok.⁹

Dalam persembahan adat, ninik mamak Minangkabau sering disampaikan cerita dari H. Puti Alam Naisyah Erma Moeloek dan H. Limbak Tjahaja bahwa dahulu seorang Raja Tiongkok pernah meminang Bundo Kandung dengan mengirimkan seperangkat pelaminan sebagai tanda ikatan. Tanda ikatan yang dikirimkan sampai ke Minangkabau, namun raja tersebut tidak kunjung datang, akibatnya pernikahan tidak jadi terlaksana.¹⁰ Meskipun ungkapan tersebut belum

⁷ M. D. Mansoer, *Sedjarah Minangkabau*, Jakarta : Bhratara, 1970, hal 45-47

⁸ Kojok, U, *Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah : Naskah Melayu yang tertua*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006

⁹ Mengapa Datuk Perpatih berkunjung ke Siam tidak dijelaskan lebih lanjut di dalam konsepsi tersebut. Erniwati, *Asap Hio di Ranah Minang: Komunitas Tionghoa di Sumatera Barat*, Yogyakarta: Ombak, 2007, hlm. 45-46.

¹⁰ Tidak dijelaskan apa yang menyebabkan Raja Tiongkok meninggal dunia, tetapi untuk mengenang peristiwa tersebut mahar kiriman Raja Tiongkok kemudian dijadikan sebagai perlengkapan dalam setiap upacara adat di Minangkabau. Pendapat yang hampir sama, namun berbeda penjelasan tentang alasan pembatalan rencana

dapat dibuktikan secara akademis, namun ungkapan tersebut menjadi ingatan kolektif bagi masyarakat Minangkabau hingga saat ini bahwa terdapat hubungan yang terjalin dengan baik antara Tiongkok dan masyarakat Minangkabau.

Etnis Tionghoa merupakan salah satu kelompok masyarakat yang mendiami dan terlibat secara aktif dalam kegiatan perdagangan dan pelayaran di kawasan Pantai Barat Sumatra bersama dengan orang India dan Arab sumber-sumber kolonial menyebut mereka dengan *vreemde oosterlingen* (Orang Timur Asing).¹¹ Orang-orang Tionghoa mulai berdatangan ke kawasan Pantai Barat Sumatra ini sejak penghujung abad ke-16. Kedatangan mereka tidak terlepas dari kegiatan perdagangan dan pelayaran. Mereka datang untuk mencari lada dengan menggunakan kapal-kapal dagang. Memasuki dekade ke-4 abad ke-17, etnis Tionghoa telah bermukim di kota Pariaman, dan merupakan pemukiman pertama Etnis Tionghoa di kawasan Pantai Barat Sumatra.

Pada abad ke-17, ketika VOC menjadikan kota Padang sebagai pusat kegiatan politik dan ekonominya, orang Tionghoa juga ikut hadir di sana.¹² Pada mulanya, pedagang-pedagang Tionghoa singgah di daerah ini dengan tujuan menunggu datangnya angin untuk berlayar menuju daerah-daerah tujuan mereka. Kontak dagangpun terjadi antara orang Tionghoa dan penduduk asli Padang yang tinggal di pelabuhan. Kontak dagang yang terjalin tidak saja antara pedagang Tionghoa dengan pedagang asal Minangkabau saja tetapi juga dengan pedagang dari berbagai penjuru dunia.¹³

Meningkatnya jumlah orang Tionghoa yang menetap di Padang pada tahun 1682 menyebabkan diangkatnya seorang letnan Tionghoa Lie Pit. Pengangkatan ini bertujuan untuk mengontrol dan mengatur orang Tionghoa yang ada di Padang.

pernikahan antara Bundo Kandung dengan Raja Tiongkok dikarenakan pinangan Raja Tiongkok ditolak disebabkan karena berbeda negeri. Lihat lebih lanjut Sativa Sutan Aswar, *Antakusuma Suji Dalam Adat Minangkabau*, Jakarta : Djambatan, 1999, hlm.42.

¹¹ Asnan, *Op.Cit.*, hlm. 43

¹² *Ibid.*, hlm. 46.

¹³ *Ibid.*, hlm. 49.

Fungsi orang Tionghoa sebagai pedagang semakin kuat ketika perdagangan kain dan emas di kawasan Minangkabau mengalami kemerosotan. Etnis Tionghoa yang memiliki modal cukup banyak mendapatkan posisi penting, dan menjadi pialang serta mampu menggeser peranan para pialang tradisional (Minangkabau) hingga masuk ke daerah pedalaman. Akibatnya orang Minangkabau tergantung terhadap barang-barang pokok yang diperoleh dari pedagang pengecer di pasar-pasar tradisional, sedangkan pedagang pengecer juga tergantung kepada pedagang Belanda dan Tionghoa.¹⁴ Hal ini dikarenakan barang-barang yang berada di pasaran tersebut merupakan barang grosir yang berasal dari pedagang Belanda dan Tionghoa sedangkan pedagang asal Minangkabau hanya sebagai perantara saja. Kemajuan pedagang Tionghoa juga didorong oleh pemberian kontrak bea cukai ekspor kepada Kapten Tionghoa Lau Ch'uan-ko pada tahun 1785.¹⁵

Hubungan antara pedagang Tionghoa dengan pedagang Minangkabau semakin kuat saat terjadinya Perang Paderi. Pedagang Padri menerapkan pola perdagangan bebas, yaitu semua pedagang boleh berdagang di kawasan yang mereka kuasai.¹⁶ Dalam melakukan aktivitas perdagangan, pedagang Tionghoa yang telah lama bermukim di kawasan Pantai Barat Sumatra membuat kongsi dagang (*verbond* atau *handelvereniging*). Lie Gieng, Lie Matjiauw, Lie Sing, dan Hoi Atjouw tercatat sebagai saudagar-saudagar Tionghoa yang mempunyai pengaruh relatif besar di kawasan ini. Mereka juga tercatat sebagai pedagang perantara antara saudagar Minangkabau dengan saudagar besar Eropa. Pedagang-pedagang Tionghoa dapat ditemui hampir di semua kawasan pesisir dan sebagian besar daerah pedalaman.

Besarnya pengaruh Tionghoa dalam bidang perdagangan juga terlihat di kota Padang. Di sini, etnis Tionghoa bahkan memiliki pasar yang disewakan kepada para saudagar Tionghoa. Beberapa etnis Tionghoa sebagai pemilik pasar tersebut adalah

¹⁴ Kenneth R. Young, "Sistem Tanam Paksa di Sumatra Barat : Stagnasi Ekonomi dan Jalan Buntu Dalam Politik", Dalam Anne Bood, *Sejarah Ekonomi Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1988, hlm. 156.

¹⁵ Christine Dobbin, *loc. cit.*, hlm 105-106.

¹⁶ Asnan, *op.cit.*, hlm. 85.

Lie Saay, Go Lam San, Goan Hoat, dan Oei Soei Kiat. Mereka merupakan empat saudagar Tionghoa yang tercatat sebagai pemilik pasar di kota Padang. Di samping itu, kongsi dagang Tionghoa Padang juga pernah mendirikan pasar yang terkenal dengan nama pasar tanah kongsi.¹⁷

Pekerjaan sebagai pedagang telah dijalani oleh etnis Tionghoa dalam waktu yang sangat lama. Meskipun berkompetisi dengan pedagang Minangkabau, dalam menjalankan aktivitasnya, pedagang Tionghoa memiliki posisi yang khusus, bahkan di antara kedua pedagang tersebut terjalin hubungan yang baik dan saling menguntungkan. Distribusi dan pengumpulan barang dagangan pada umumnya dikuasai oleh pedagang Minangkabau, sementara agen-agen, eksportir, dan importirnya dipegang oleh pedagang Tionghoa. Kerjasama tersebut menyebabkan terbina hubungan yang saling menguntungkan dan membutuhkan di antara kedua etnis tersebut.¹⁸

Hubungan yang terjalin antara orang Tionghoa dan penduduk asli Minangkabau tidak saja di bidang perdagangan, tapi juga dalam perkawinan campuran. Tidak sedikit imigran Tiongkok yang datang pada fase pertama dan kedua melakukan perkawinan campuran dengan masyarakat setempat dan melahirkan kelompok Tionghoa yang dikenal dengan Tionghoa peranakan. Tionghoa Peranakan adalah kelompok Etnis Tionghoa yang lahir di Nusantara dan merupakan hasil pernikahan campuran antara imigran Tiongkok dengan penduduk setempat.¹⁹ Selanjutnya fase ketiga terjadi pada masa Pemerintahan Hindia Belanda. Pada fase ini Etnis Tionghoa yang datang ke Padang untuk bekerja sebagai kuli di perkebunan dan pertambangan yang dibuka oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pembukaan tambang batu bara Ombilin di Sawahlunto mendorong mereka datang secara berkelompok

¹⁷ Amran, *op.cit.*, hlm. 22-23.

¹⁸ Erniwati, *Op.Cit.*, hlm. 40-41.

¹⁹ Nio Joe Lan, *Peradaban Tionghoa Selayang Pandang*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013, hlm. 24; Mona Lohanda, *The Kapitan Cina of Batavia 1837-1942*, Jakarta: Djambatan, 1994, hlm. 11; Andjarwati Noordjanah, *Komunitas Tionghoa di Surabaya (1910-1946)*, Semarang: Mesiass, 2004, hlm. 41.

dengan sistem kuli kontrak. Sebelum mendatangkan kuli kontrak Tionghoa, pertambangan Batubara Ombilin Sawahlunto juga telah mendatangkan kuli dari kelompok narapidana, kuli bebas, dan kuli lepas. Pemerintah Hindia Belanda melalui Departemen kehakiman menugaskan para narapidana dari penjara-penjara di Batavia, terutama narapidana dari penjara di Glodok dan Cipinang untuk menjadi buruh paksa di tambang Batubara Ombilin Sawahlunto.²⁰ Perekrutan kuli dilakukan dari luar daerah pertambangan, sedangkan perekrutan kuli di daerah Minangkabau sangat sulit dilakukan karena budaya dan kepercayaan Minangkabau menyebutkan bahwa bekerja di bawah tanah bukan untuk manusia yang berarti bahwa bekerja sebagai kuli di pertambangan merupakan pekerjaan yang tidak layak dan merupakan penghinaan.

Pengiriman buruh paksa ke tambang Batubara Ombilin Sawahlunto dimulai pada awal tahun 1898 dengan jumlah penambang sekitar 2.405 buruh paksa. Pada bulan Mei 1898 jumlah buruh tersebut menurun menjadi 1.130 buruh paksa. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah meninggal karena sakit, melarikan diri dan berbagai penyebab lainnya. Pekerjaan yang berat dan kondisi pertambangan yang tidak kondusif menyebabkan terjadi krisis tenaga kerja di tahun 1899. Kekurangan pekerja ini menyebabkan Pemerintah Hindia Belanda kemudian mendatangkan buruh kontrak asal Tiongkok sebagai alternatif melalui Surat Keputusan Gubernur Jenderal yang mengizinkan pengerahan orang-orang Tionghoa sebagai kuli lepas. Pada permulaan tahun 1900 didatangkan pertama sekali sebanyak 600 orang kuli kontrak Tionghoa dari pusat pasar tenaga kerja Tionghoa di Singapura. Setelah diadakan pemeriksaan kesehatan, ternyata hanya 464 orang yang dinyatakan bisa bekerja di tambang Batubara Ombilin Sawahlunto. Pada tahun 1901 kembali didatangkan sekitar 136 orang kuli kontrak Tionghoa dari Singapura. Biaya kontrak kuli yang tinggi menyebabkan pimpinan perusahaan melirik buruh dari Jawa.

²⁰ Erwiza Erman, *Membaranya Batubara : Konflik Kelas dan Etnik Ombilin-Sawahlunto- Sumatera Barat 1892-1996*, Depok: Desantara Utama, 2005, hlm. 73-75.

Rekrutmen buruh dilakukan melalui kantor tenaga kerja, seperti *Algemeen Delisch Emigratie Kantoor* (ADEK) dari Semarang, Betawi dan Surabaya.²¹

Kedatangan Etnis Tionghoa selain secara berkelompok untuk menjadi kuli juga secara individu sebagai imigran. Hal ini disebabkan pada akhir abad ke-19 terjadi periode penting terkait kedatangan Etnis Tionghoa ke. Banyak faktor internal di Tiongkok yang mempengaruhi terjadi migrasi secara Nusantara besar-besaran seperti Perang Candu pada tahun 1839,²² Pemberontakan Boxer (Pak *Kun Tauw*) pada tahun 1897- 1900,²³ Revolusi Tiongkok tahun 1911 (*Xin Hai*)²⁴ dan Perang saudara

²¹ Erwiza Erman, *ibid.*, hlm. 78-79.

²² Banyaknya candu yang dibawa oleh bangsa Asing ke Tiongkok terutama Inggris berdampak buruk terhadap perilaku, kesehatan dan keamanan rakyat. Untuk mengatasi dampak buruk dari candu tersebut maka Tiongkok dibawah pimpinan Kaisar Daoguang tahun 1800 mengeluarkan mandat melarang candu masuk ke Tiongkok. Akan tetapi titah Kaisar tidak diindahkan sehingga meletuslah perang candu. Kekalahan Tiongkok dalam perang candu menyebabkan Tiongkok harus menandatangani perjanjian pada tahun 1842. Isi dari perjanjian tersebut adalah Tiongkok harus membuka Canton untuk perdagangan Internasional, menyerahkan Hongkong kepada Inggris, membayar \$12.000.000 sebagai pengganti biaya perang dan \$ 6.000.000 untuk mengganti candu yang telah dibakar habis. Lihat lebih lanjut Elizabeth Seeger, *Sedjarah Tiongkok Selajang Pandang*, Medan: Firma AMKA, 1951, hlm. 311-313.

²³ Pemberontakan Boxer (Tinjau Keadilan) merupakan pemberontakan untuk menyingkirkan kekuasaan Manchu dan mengusir bangsa asing dari Tiongkok. Pemberontakan ini juga mendapatkan bantuan dari Ratu Tze Syi. Pemberontakan meletus di Peking dan menyerang kedutaan asing yang ada di Tiongkok. Akibat serangan tersebut pasukan Internasional mengerahkan kemampuan mereka untuk menyerang para Boxer dan pemberontakan ini berhasil dihentikan. Setelah itu dibuatlah perjanjian *Boxer Protocol* pada tanggal 7 September 1901. Akibat dari perjanjian dan pemberontakan ini, Dinasti Manchu semakin melemah dan rakyat banyak yang menderita. Rakyat pun melakukan ke arah Selatan untuk mencari perlindungan dan memperbaiki ekonomi yang telah porak-poranda. Bustamam, *Sejarah Asia Timur*, Padang: UNP Press, 2011, hlm. 48-49.

²⁴ Revolusi tahun 1911 dikenal dengan *Xin Hai* atau Revolusi Tiongkok yang dimulai pada 10 Oktober 1911. Revolusi ini berhasil menggulingkan Dinasti Qing (1644-1912) dan melahirkan pemerintahan baru berbentuk Republik. Lihat lebih lanjut Jean Chesneaux, *Serikat Rahasia Cina*, Jakarta: Grafiki, 1991, hlm. 4.

hingga tahun 1949.²⁵ Peristiwa di atas mendorong terjadinya migrasi secara besar-besaran dari Dataran Tiongkok menuju Selatan Asia (sekarang Asia Tenggara). Semenanjung Malaya dan kepulauan di Nusantara merupakan tujuan utama rombongan imigran Tiongkok tersebut.

Victor Purcell mengatakan bahwa periode antara akhir abad ke-19 M hingga abad ke-20 M merupakan fase terakhir (ketiga) kedatangan Etnis Tionghoa ke Nusantara. Migrasi pada saat ini terjadi secara besar-besaran dan pada umumnya imigran laki-laki datang membawa istri dan keluarganya. Hal ini menyebabkan terjadi proses pemindahan potensi, kebudayaan dan kekayaan mereka ke daerah tujuan. Kelompok Tionghoa yang datang pada periode ini digolongkan ke dalam kelompok "*totok atau singkeh*" (tamu baru). Kelompok *totok* pada umumnya masih mempertahankan kebudayaan nenek moyang dari generasi ke generasi. Kelompok Tionghoa *totok* digambarkan sebagai generasi pertama atau generasi berikutnya yang tidak berasal dari pernikahan campuran dengan pribumi dan fasih berbahasa daerah asal masing-masing sebagai bahasa ibu yaitu bahasa Hokkian dan bahasa dari propinsi lainnya.²⁶ Kelompok *totok* tidak banyak lagi ditemukan di Padang karena sudah mengalami akulturasi dengan kelompok Tionghoa peranakan yang jumlahnya lebih dominan.

²⁵ Perang saudara 1945-1949 terjadi antara Kuomintang (Partai Nasionalis) di bawah pimpinan Chiang Kai Sek dengan Kuochantang (Partai Komunis) di bawah pimpinan Mao Zedong. Lihat dalam Maisir Thaib, *Tionghok Merah*, Bukittinggi: Nusantara, tanpa tahun, hlm. 69-78. Oey Hong Lee, *Naga Bangkit: Kisah Kemenangan Mao Tse Tung*, Jakarta: Lucky, 1959.

²⁶ Etnis Tionghoa di Indonesia terbagi atas dua kelompok yaitu Tionghoa *totok* dan Tionghoa peranakan. Tionghoa *totok* adalah orang-orang Tionghoa yang secara budaya masih berorientasi kepada kebudayaan Tiongkok, sedangkan Tionghoa peranakan adalah orang-orang Tionghoa yang merupakan generasi hasil perkawinan campur (amalgamasi) antara orang Tionghoa dengan pribumi dan dari etnis lainnya. Lihat lebih lanjut Twang Peck Yang, *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950*, Yogyakarta: Niagara, 2005, hlm. XXI; Nasrul Hamdani, *Komunitas Cina di Medan: dalam Lintasan Tiga Kekuasaan 1930-1960*, LIPI Press: Jakarta, 2012, hlm. 68-69.

Imigran Tionghoa yang datang ke Padang memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda, perbedaan mata pencaharian dipengaruhi oleh daerah asal mereka di Tiongkok dan proses masuknya serta kekayaan alam Padang. Etnis Tionghoa yang berasal dari Hokkian banyak bekerja sebagai pedagang dan pengumpul kredit profesional seperti kredit angsuran. Sementara Etnis Tionghoa yang berasal dari daerah Hupek memiliki mata pencaharian sebagai tukang gigi.²⁷ Sementara itu, Etnis Tionghoa dari daerah Kongfu bekerja di bidang pertanian, perkebunan, dan pertambangan, tukang kayu dan kelontong.²⁸

Mata pencaharian secara berangsur berkembang dan tidak terbatas kepada profesi di daerah asal saja, tetapi sudah bercampur sesuai dengan peluang yang ada. Meskipun berasal dari provinsi dan memiliki keahlian yang berbeda di daratan Tiongkok, namun Etnis Tionghoa yang datang ke Padang sebagian besar bekerja sebagai pialang pantai. Pada tahun 1630 kapal-kapal pedagang Tionghoa dari Jawa sudah berdatangan ke Pantai Barat Sumatera dan diketahui sudah mulai ada yang menetap di Pariaman sejak tahun 1663. Sebagian dari mereka adalah agen-agen Tionghoa dari Banten yang bekerja sebagai pedagang perantara yang menggunakan uang dan barang yang disediakan oleh pedagang-pedagang di Tiongkok dan orang-orang Eropa di Banten.²⁹ Pedagang Tionghoa tidak saja menjadi pialang di pantai, tetapi juga memodali pembelian beras dan pengiriman budak-budak dari Nias serta lada dari Indrapura.³⁰

²⁷ Twang Peck Yang, *op. cit.*, hlm. 64.

²⁸ The Netherlands Indies "A Review of The Country It's Economics and Commerce" Vol III 1935 Publisher: 6 Kolff & Co. Batavia, Java, N, 1 *Issued by the Departement of Economic Affair*, Editorial Committee Press: Schoolwey 8 Batavia c (JAVA)

²⁹ Christine Dobbin, *loc. cit.* hlm. 104.

³⁰ Christine Dobbin, *ibid.*, hlm. 97-98.

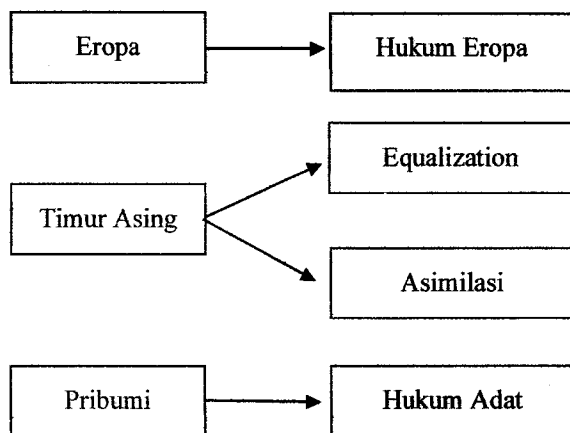
B. Struktur Kolonial

Untuk menata masyarakat di daerah koloni, Pemerintah Hindia Belanda menerapkan sistem *Passelstelsel* yang merupakan penarikan uang bagi siapa saja yang akan meninggalkan wilayah kelompoknya dan *Wijkenstelsel* yang merupakan pemukiman tempat di mana mereka harus tinggal serta pembagian masyarakat berdasarkan kepada ras, suku bangsa atau warna kulit. Pembagian masyarakat tersebut diatur melalui *Indische Staatsregeling* berdasarkan Undang-undang art. 163 tahun 1926. R. Kennedy dan Wertheim mengatakan bahwa pembagian masyarakat dilakukan untuk keperluan hukum dan pemberlakuan hukum adat pada orang Indonesia “asli” dan hukum Eropa untuk orang Eropa, serta hukum Timur Asing untuk orang Timur Asing.³¹ Pembagian masyarakat kolonial juga berkaitan dengan penetapan status kewarganegaraan berlandaskan “*semi apartheid*” yang membagi masyarakat atas tiga bagian. Pertama orang Eropa (*onderdaanschap*) dengan kewarganegaraan *Staatsburgerschap* dan sistem hukum Eropa *Staadsgemeente (niet-Nederlandsch onderdanen)*. Kedua kelompok Timur Asing dengan kewarganegaraan *Vreemde Oosterlingen* dengan sistem perkampungan dan perwira sebagai Kawula Belanda (*onderdanen*). Ketiga, golongan Pribumi yang tinggal di perkampungan memiliki hukum adat dengan sistem *Inlandsche Gemeente*.³² Lihat gambar 5.³³

³¹ Ongkhokham, *op. cit.*, hlm. 146.

³² Eddie Kusuma & S. Satya Dharma, *Etnis Tionghoa Dalam Politik Indonesia : Sebelum dan Sesudah Reformasi 1998*, Jakarta: Suara Kebangsaan Tionghoa Indonesia (SAKTI) dan Asosiasi Wartawan Muslim (AWAM) Indonesia, 2006, hlm. 33.

³³ Soewarsono, “Surabaya: Kota, Penduduk dan Hubungan Antar Kelompok”, Thung Ju Lan (ed), *Etnisitas dan Integrasi di Indonesia: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : PMB-LIPI, 2000, hlm. 145-148.



Gambar 5. Bagan Penggolongan Penduduk di Hindia Belanda

Pengelompokan masyarakat yang diberlakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda di atas bersifat horizontal. Masing-masing kelompok masyarakat mempunyai kekhususan tersendiri, baik secara hukum maupun secara sosial. Gambar di atas menunjukkan bahwa masing-masing kelompok masyarakat memiliki hukum tersendiri. Berdasarkan *Staadtsblad* tahun 1847 Nomor 23 dinyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Eropa, keturunan Eropa dan orang-orang yang statusnya disamakan dengan orang Eropa serta untuk orang-orang yang beragama Kristen akan berlaku hukum Eropa.³⁴ Berdasarkan pasal 11 AB akan diberikan kesempatan bagi golongan yang bukan Eropa untuk tunduk secara sukarela kepada hukum perdata Eropa, yaitu:

- a. Secara sukarela taat kepada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku bagi golongan hukum Eropa.
- b. Karena keperluan hukum, mereka yang memerlukannya tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang bagi golongan hukum Eropa.

³⁴ Natasya Yunita, *Tradisi Hukum Cina: Negara dan Masyarakat: Studi Mengenai Peristiwa-peristiwa Hukum di Pulau Jawa Zaman Kolonial (1870-1942)*, Universitas Indoensia: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, 2003, hlm.187.

c. Karena keperluan hukum, mereka yang memerlukannya tunduk pada hukum lain.³⁵

Kelompok Timur Asing (*Vreemde Ossterlingen*) terdiri dari Etnis Tionghoa, Arab dan India. Kelompok Timur Asing dapat menaikkan status hukum melalui proses hukum *equalization* dan modernisasi melalui pendidikan Barat dan menjadi Kristen, sedangkan untuk melebur ke dalam kelompok masyarakat yang lebih bawah dilakukan melalui proses asimilasi. Bagan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Hindia Belanda telah melakukan diskriminasi secara terstruktur terhadap kelompok Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) termasuk Etnis Tionghoa.³⁶ Khusus untuk kelompok Timur Asing dari kalangan Etnis Tionghoa, Pemerintah Hindia Belanda menggunakan kelompok ini sebagai perantara (*middleman*) antara pemerintah dengan masyarakat pribumi, terutama dalam perdagangan dan pemungutan pajak. Struktur masyarakat selanjutnya adalah kelompok pribumi (*Inlanders*). Pada kelompok masyarakat pribumi diberlakukan Hukum Adat sebagai landasan hukumnya. Hukum Adat menjadi pedoman bagi tatanan masyarakat pribumi disamping hukum Barat yang berlaku untuk keseluruhan masyarakat kolonial.

Tionghoa Padang diberikan kewenangan dalam mengatur kelompoknya, sehingga Pemerintah Hindia Belanda memilih beberapa perwakilan Tionghoa berdasarkan kriteria tertentu untuk menempati posisi *Kapiten, Letnan, Mayor, dan Opsir* untuk

³⁵ Natasya Yunita, *ibid.*, hlm. 191.

³⁶ Theodorson & Theodorson mengatakan bahwa diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu. Biasanya diskriminasi bersifat kategori atau atribut-atribut yang khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, dan keanggotaan kelas-kelas sosial. Latar belakang munculnya diskriminasi rasial bisa sangat beragam, tergantung pada banyak faktor, diantaranya faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosio-kultural, faktor psikologis, faktor religius, faktor biologis. Ketentuan Yuridis pembagian masyarakat kolonial oleh Pemerintah Hindia Belanda adalah Eropa, Timur Asing dan Pribumi. Lihat lebih lanjut *Regering Reglement (RR) 1885 pasal 270; Nederlandsch Onderdansch van niet Nederlanders 1910 pasal 126; Indische Staatreglement (IS) tahun 1925; Dicky Lopulalan, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial*, Jakarta : LSPP, 1999, hlm. 15-18; Nasrul Hamdani, *Komunitas Cina di Medan : Dalam Lintasan Tiga Kekuasaan 1930-1960*, Jakarta: LIPI Press, 2012, hlm. 5; Goerge Theodorson & Achilles G. Theodorson, *A Modern Dictionary of Sociology*, New York, Hagerstown, San Fransisco, London : Bernes & Noble Books, 1979, hlm. 115-116.

memudahkan mengontrol etnis Tionghoa dan memungut pajak. Untuk memudahkan Pemerintah Hindia Belanda mengontrol penduduk asing, maka diberlakukan sistem pengelompokan masyarakat dengan sistem *Besture*. Sistem ini mengharuskan golongan Timur Asing memiliki struktur dan pemimpin berdasarkan etnis masing-masing. Etnis Tionghoa memiliki *Chinese Besture*, etnis Arab memiliki *Arab Besture*, dan etnis India memiliki *India Besture*. Di Hindia Belanda, *Chinese Besture* dibentuk sebagai bagian dari administrasi kolonial. Sistem *Besture* ini terdiri dari jabatan Letnan, Kapiten, dan Mayor. Jabatan-jabatan ini dimiliki oleh suatu komunitas etnis tergantung kepada jumlah dan kontribusi yang diberikan oleh komunitas tersebut kepada Pemerintah Hindia Belanda.

Jabatan *Kapiten* dalam struktur masyarakat Tionghoa bertugas untuk memberikan kontribusi berupa peningkatan pemasukan dari pungutan pajak bagi Pemerintah Hindia Belanda. Mereka yang memangku jabatan ini memperoleh keistimewaan berupa pembebasan pajak dan kemudahan akses di bidang pertanian dan perdagangan. *Kapiten* merupakan jabatan yang diberikan oleh Pemerintah Hindia Belanda kepada Tionghoa yang terkemuka untuk menjadi pemimpin bagi komunitasnya di perkampungan Tionghoa. Tugas-tugasnya yang lain adalah melakukan pendataan terhadap imigran Tionghoa yang baru datang, mengatur jalur perdagangan, dan urusan diplomatik. Jabatan ini lebih bernilai dari segi prestise dan fasilitas dibanding keuntungan finansial. Oleh karena itu, meskipun tidak diberi gaji oleh Pemerintah Hindia Belanda, jabatan *Kapiten* tetap menjadi rebutan di kalangan Tionghoa.

Letnan merupakan pemimpin yang langsung berhubungan dengan masyarakat dan lebih banyak mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam menjalankan tugasnya, *Letnan* dibantu oleh *Wijkmeester* (kepala kampung). Di kalangan masyarakat Tionghoa, kepala kampung dipanggil dengan sebutan *Incek Wijk*. Selanjutnya, *Letnan* bertugas menjadi pemimpin yang paling sering berhubungan dengan masyarakat sebangsanya dan mengawasi *Wijkmeesters* atau *Wardmeesters* di wilayah kekuasaannya. Setiap permasalahan yang berkaitan dengan

aktivitas kehidupan, diselesaikan secara hierarki dimulai dari *Wardmasteurs*, lalu *Wardmasteurs* akan melanjutkan laporan kepada *Letnan*. Jika *Letnan* tidak dapat menyelesaikan permasalahan, maka langsung dilaporkan kepada *Mayor* sebagai pemimpin tertinggi. Sementara itu, *Kapiten* adalah opsir menengah yang tugasnya bersifat protokoler dan lebih banyak memosisikan diri sebagai wakil *Mayor* dalam urusan-urusan tertentu. *Mayor* merupakan posisi yang paling bergengsi. Bukan saja karena merupakan jenjang kepemimpinan yang tertinggi, tetapi juga karena posisi dengan kewenangan yang lebih besar terhadap komunitasnya. Pentingnya jabatan *mayor* terlihat dari kesempatan ekonomi dan status sosial yang diberikan oleh Pemerintah Hindia Belanda dalam berbagai kesempatan.

Para *Besture*, atau yang sering disebut para *opsir*, pada dasarnya adalah bagian dari struktur Pemerintah Hindia Belanda yang bertugas sebagai “polisi” bagi bangsa mereka sendiri. Meskipun tidak termasuk dalam struktur pemerintahan resmi, para *opsir* tersebut secara tidak langsung menjadi agen pemerintah. Pada tahap awal, para *opsir* tidak mendapat gaji. Namun, setelah kinerja mereka menurun, mereka pun digaji sesuai dengan jabatannya.

Opsir ditunjuk dan diangkat oleh komunitasnya berdasarkan kekayaan dan posisinya di dalam komunitas tersebut. Setiap *opsir* dapat mewariskan jabatan mereka kepada keturunannya atas persetujuan pemerintah. Hal ini menyebabkan jabatan *opsir* sering memiliki ikatan persaudaraan antara satu generasi dengan generasi berikutnya. Keluarga *opsir* cenderung berusaha mempertahankan status sosial dan identitas diri mereka melalui lambang-lambang yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Lambang-lambang yang digunakan pada umumnya bercirikan budaya Eropa (Belanda). Hal ini terlihat dari lambang-lambang status sosial yang digunakan oleh Mayor Lie Maa Saay, seperti kereta kuda, dan teropong bintang yang kemudian disumbangkan cucunya Kapiten Lie Sim Tjoan ke observatorium *Bosccha* Lembang, Bandung, tahun 1926.

Masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap *opsir-opsir* yang telah mereka pilih. Adanya harapan akan perlindungan dan bantuan ekonomi,

menempatkan jabatan *opsir* memiliki posisi yang sangat strategis. Posisi sebagai *opsir* menjadi jabatan yang diminati siapa saja, sehingga menimbulkan kompetisi dan bahkan konflik diantara mereka yang bersaing. Dalam perkembangan selanjutnya, jabatan (*Opsir, Mayor, Kapiten, dan Letnan*) diperebutkan oleh etnis Tionghoa di Padang. Di kalangan masyarakat Tionghoa Padang, berkembang secara turun temurun cerita tentang persaingan antaran Mayor Lie Maa Saay dengan Kapiten Gho Tjong yang berujung pada perang *feng sui*. Untuk menghadapi pengaruh Mayor Lie Maa Saay dan kekuasaannya yang semakin besar, Kapiten Gho Tjong kemudian membangun gedung (*Padang Sparkbank*) pada tahun 1908 yang letaknya berhadapan langsung dengan Klenteng See Hien Kiong. Pembangunan gedung tersebut bertujuan untuk menutup *Feng Sui* dari Klenteng See Hien Kiong yang diyakini telah menjadi sumber rezeki bagi kebesaran Mayor Lie Maa Saay dan keturunannya.³⁷

Perubahan terpenting dalam sejarah pertumbuhan Padang sebagai kota administratif dimulai sejak awal abad ke-20, ialah perubahan dari keresidenan Padang Barat dan Padang Pesisir menjadi *Kotapraja (Gemeente)*. Sebagaimana yang tercatat dalam Lembaran Negara (*Staatblad*) No. 151 tertanggal 1 Maret 1906, Padang secara resmi menjadi *Kotapraja (Gemeente)*. Dengan status baru itu, pemerintah kota Padang memiliki hak untuk mengurus daerahnya sendiri. Perubahan status itu menjadi penting, bukan saja karena diperkenalkannya pengaturan administratif yang lebih bersungguh-sungguh, melainkan juga diperhatikannya pembangunan fasilitas kota seperti pelistrikan, *waterleiding*, prasarana dan sarana transportasi. Keputusan ini secara efektif baru mulai dijalankan sejak 1 April 1906. Jabatan walikota atau *Burgemeester* Padang dipegang oleh Asisten Residen.³⁸

Dalam rangka mewujudkan modernisasi pemerintahan Hindia Belanda, perlu diterapkan asas desentralisasi. Untuk itu, pemerintah membentuk *Local Raeden* atau Dewan Daerah. Berdasarkan artikel 7 Ordonantie tanggal 1 Maret 1906, yang tercantum dalam *Staatblad* No. 151 tahun 1906, maka *Gemeente* Padang mulai

³⁷ Erniwati, hlm.43-47.

³⁸ Safwan, *Op.Cit.*, hlm. 15.

membentuk *Local Raaden* yang bernama *Gemeente Raad van Padang*. Anggota dewan ini berjumlah 19 orang yang terdiri dari 13 orang wakil Eropa, 4 orang wakil Bumiputra, dan 2 orang wakil Tionghoa. Perwakilan setiap golongan ini sewaktu-waktu dapat dipanggil untuk membicarakan masalah-masalah umum, seperti soal pajak dan keamanan. Jabatan Ketua *Gemeente Raad van Padang* ini dirangkap oleh Asisten Residen.³⁹

Orang-orang yang duduk sebagai anggota *Gemeente Raad van Padang* lebih mewakili kekuasaan pemerintah dan bukan mewakili kepentingan rakyat. Hal ini tercermin dari komposisi anggotanya. Wakil-wakil Eropa umumnya adalah para pedagang besar dan pegawai kulit putih. Sementara itu, kalangan Tionghoa diwakili oleh pedagang Tionghoa kaya dan Tionghoa biasa. Wakil-wakil Bumiputra umumnya terdiri dari para kepala tradisional atau bangsawan yang dekat hubungannya dengan *regent* (bupati) Padang dan sebagian pegawai pemerintahan. Sampai tahun 1917, semua anggota dewan ini diangkat oleh pemerintah.⁴⁰

Selama dua dekade pertama sejak berdirinya *Gemeente Padang* (1906), pemerintahan kota dirangkap oleh Asisten Residen *Padangsche Ommelanden*, yang meliputi semua daerah dataran rendah pesisir dari utara sampai selatan. Hal ini berarti bahwa administrasi Padang masih digabungkan ke dalam birokrasi Keresidenan. Waktu itu Padang masih merupakan salah satu *onderafdeeling* yang terdapat di *Padangsche Ommelanden*.

Seperti halnya dengan setiap daerah *onderafdeeling*, yang biasanya dikepalai oleh seorang *coontroleur* (baca: kontrolir) kulit putih, Padang juga memiliki seorang *coontroleur*, mendampingi atau atasan dari pejabat tertinggi pribumi. Dalam hal ini, di Padang berkuasa seorang *regent* (setingkat bupati) keturunan bangsawan Padang. Jabatan *regent* dihapuskan tahun 1910. Sejak saat itu, delapan kampung berada langsung di bawah kontrol pejabat Belanda. Masing-masing kampung (*wijk*)—yang berasal dari kelompok delapan suku menurut struktur sosial Padang tempo dulu—

³⁹ *Ibid.*, hlm. 16. *Zed, Op.Cit.*, hlm. 19-20.

⁴⁰ *Zed, Op.Cit.*, hlm. 20.

dikepalai oleh seorang kepala kampung. Kedelapan kelompok kampung tersebut masing-masingnya adalah sebagai berikut:

<i>Wijk I</i>	Kampung Mata Air dan Durian
<i>Wijk II</i>	Kampung Purus, Damar, Olo, Ujung Pandan, dan Kaluang
<i>Wijk III</i>	Kampung Jawa, Sawahan, Belantug, Terandam, dan Jati
<i>Wijk IV</i>	Kampung Sebelah, Pondok, Kamp. Cina, dan Belakang Tangsi
<i>Wijk V</i>	Kampung Parak Gadang, Simpang Haru, dan Andalas
<i>Wijk VI</i>	Alang Laweh, Ganting, Ranah Binuang, Pasar Gadang, Kamp. Nias dan Palinggam
<i>Wijk VII</i>	Teluk Bayur, Air Manis, Seberang Padang, dan Kamp. Teleng
<i>Wijk VIII</i>	Ulak Karang dan Nanggalo

Setelah reorganisasi tahun 1913, pemerintahan *onder-afdeeling* Padang disederhanakan menjadi tujuh daerah distrik. Ketujuh distrik tersebut ialah: Tanah Tinggi, Batang Harau, Binuang, Koto Tangah, Pauh, Sungkai, dan V Lurah. Masing-masing dikepalai oleh seorang kepala distrik (*demang*). Sebelum di bawah kuasa *demang*, distrik-distrik ini berada di bawah kuasa langsung *gezag Regent* (*bupati*). *Bupati* yang terakhir, yang berkuasa hingga 1910, adalah Tuanku Panglima Marah Uyub gelar Marah Maharaja Besar. Walaupun demikian, wibawa dan pengaruh keturunan *regent* Padang di mata masyarakat tetap dipertahankan Belanda.⁴¹

Pada tahun 1917, jumlah anggota *Gemeente Raad van Padang* dikurangi menjadi 17 orang. Dalam *ordonantie* tanggal 25 Maret 1917 yang dimuat dalam *Staatblad* No. 587, ditetapkan bahwa jumlah anggota *Gemeente Raad van Padang* sebanyak 17 orang dengan komposisi: 10 orang wakil Eropa, 2 orang wakil Tionghoa, dan 5 orang wakil Bumiputra. Keadaan seperti ini berlangsung sampai Jepang menduduki Kota Padang tahun 1942.⁴² Namun, anggota dewan dari kelompok

⁴¹ Rusli Amran, *Padang Riwayatmu Dulu*, Jakarta: C.V. Yasaguna, (1988), hlm. 335.

⁴² Mardanas Safwan, *Op. Cit.*, hlm. 16.

kulit putih yang umumnya adalah wakil-wakil pengusaha dan pengusaha besar Eropa masih tetap dominan.

Dalam rangka penyempurnaan Pemerintah Kota Padang dan menampung masalah yang timbul sebagai akibat perkembangan kota, maka dirasa perlu kota Padang dikepalai oleh seorang walikota atau *Burgemeester*, tanpa jabatan rangkap dalam bidang eksekutif. Pada tanggal 7 Agustus 1928, diangkatlah *Burgemeester* yang pertama untuk kota Padang. Sejak saat itu, *Gemeente* Padang berada langsung di bawah Departemen *Binnelands Bestuur* (BB) sebagai bagian dari desentralisasi.⁴³ Pemerintahan kota lebih maju ketika diangkatnya walikota Padang yang pertama, yaitu W.M. Owerkerk pada tanggal 23 November 1928.⁴⁴

Dengan terbentuknya Provinsi Sumatera tahun 1936, status *Gemeente* Padang berada dan berhubungan langsung dengan Gubernur Sumatera di Medan. Dua tahun kemudian, yakni pada 1938, *Gemeente* Padang menjadi *Staatsgemeente* berdasarkan Staatsblad tahun 1938 No. 357. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1938. Keadaan seperti ini berlangsung hingga Maret 1942, saat Jepang menduduki kota Padang.⁴⁵

C. Terbentuknya Pemukiman Tionghoa Padang

Dengan dukungan modal serta jaringan regional dan internasional, menjadikan pedagang Tionghoa mudah berkembang menjadi agen bagi perdagangan barang-barang impor termasuk kain dan porselen dari Batavia, Penang, bahkan Singapura. Pedagang Cina tidak saja menguasai perdagangan barang impor yang dibutuhkan oleh masyarakat Minangkabau di pedalaman, tetapi juga menguasai jaringan perdagangan dan transportasi komoditi ekspor dari pedalaman Minangkabau ke pelabuhan. Tahun 1829 menjelang akhir kejayaan perdagangan kopi ditemukan

⁴³ Mardanas Safwan, *Ibid.*

⁴⁴ Mestika Zed, *Op.Cit.*, hlm. 21.

⁴⁵ Mardanas Safwan, *Op.Cit.*

empat orang pialang Cina yang terkemuka, yaitu Lie Heng, Lie Ma-ch'ao, Li Sing, dan Hu A-chiao.⁴⁶

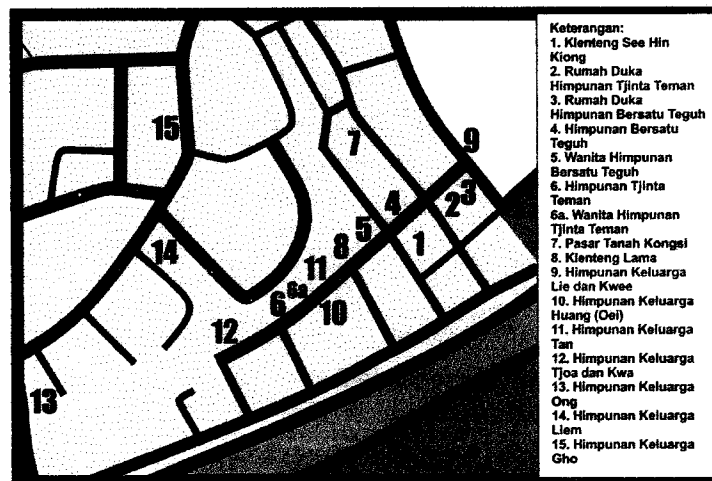
Gubernur Michiels mendorong orang asing untuk lebih banyak datang ke Padang dengan tujuan meningkatkan persaingan, sehingga Padang menjadi pelabuhan yang ramai dan dinamis. Berbagai kemudahan dan fasilitas diberikan kepada para pendatang, terutama kepada pedagang Cina yang dianggap mampu memajukan perekonomian. Untuk pertama kalinya pada tahun 1847 Lie Saay berhasil membuat kontrak dengan pemerintah kolonial Belanda untuk mengangkut kopi dari Padang Panjang ke Kayutanam dan mengangkut garam dan barang-barang lainnya dalam perjalanan baliknya.⁴⁷ Selanjutnya di tahun 1863, Gubernur Sumatera Barat Van den Bosch mengganti penghulu dengan agen-agen Tionghoa untuk penjualan candu dengan sistem "pachter".⁴⁸ Di samping memperoleh kemudahan ekonomi, di sisi lain

⁴⁶ Christine Dobbin, *Op. Cit.*, hlm. 127-128.

⁴⁷ Perusahaan ekspedisi Lie Saay membawa hasil bumi menggunakan pedati (gerobak) kuda melewati lereng Lembah Anai di bawah pengawalan kakaknya Lie Maa Toon yang bisa bela diri kungfu. Perusahaan ekspedisi ini berkembang hingga dibangun jalan darat dan jalur kereta api. Lihat lebih lanjut Majoer Titulair Der Chineezen Lie Saay, *Riwayat Ngkong Lie Saay, Jadi Kaya Sampai Harta Benda Habis Pada Tahun 1952*, Padang, 24 April 1953. Setelah transportasi darat (jalan dan jalur kereta) dibangun, Lie Saay pindah ke Padang dan diangkat menjadi Kapiten Cina pada tahun 1860. Dua kunci pertumbuhan Padang sebagai kota pelabuhan. Pertama Padang diberi hak sebagai eksportir tunggal produk kopi sebagai komoditi dagang utama melalui agen NHM sebagai pemegang monopoli ekspor-impor. Kedua, adanya fasilitas jalan dan jaringan kereta api yang menghubungkan Padang dengan pedalaman Sumatra. Lihat lebih lanjut Akira Nagazumi, *Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang*. Jakarta : Obor, 1991, hlm. 83; Christine Dobbin, *Ibid.*, hlm. 274.

⁴⁸ H.J.J.L. de Stuers, *De Vestiging en Uitbreiding der Nederlanders ter Westkust Sumatra, vol. 1*, Amsterdam : P.A. van Kampen, 1849, hlm. 110; *Staatsblad van Nederlandsch Indië no 170 dan 171 tahun 1870* berisi keputusan bahwa hanya pemerintah yang memegang penjualan candu secara resmi. Cara pemasaran dengan menjual hak-hak monopoli penjualan kepada orang-orang Cina yang memiliki banyak uang. Candu di Sumatera Barat sebetulnya bukan hal yang baru. Masyarakat sudah terbiasa memadat candu. Hal ini ditentang oleh kaum Padri yang mengharamkan candu bagi penganut Islam. Setelah Padri kalah, masyarakat yang menghisap candu mulai berkurang. Namun ketika pemerintah kolonial Belanda kembali membebaskan menghisap candu, rumah candu pun mulai berkembang lagi di kalangan masyarakat sampai ke pedesaan. Tahun 1862-1868 Gubernur Sumatera Barat van Den Bosch melakukan pelarangan menghisap candu karena dianggap merusak. Sejak itu pembelian dan menghisap candu dikontrol melalui rumah-rumah candu Cina yang mendapat ijin (pachter) dari pemerintah kolonial Belanda. Di Padang terdapat 24 rumah candu milik orang Cina yang dikunjungi masyarakat dari berbagai lapisan. Setiap *pachter* harus membayar komisi yang besar kepada pemerintah. Akibatnya muncul korupsi dan penyelundupan candu. Untuk mengatasi penyelundupan dan korupsi di kalangan pegawai pemerintah kolonial Belanda dibentuk *opium regie* sejak tahun 1897 sebagai pengganti sistem *pacht*. Sejak itu penjualan dan tempat madat langsung di

etnis Cina mendapatkan perlakuan khusus menyangkut hubungan sosial dan politik mereka di Hindia Belanda. Pemerintah kolonial penerapkan berbagai peraturan untuk mengatur kehidupan etnis Cina. Diawali dengan pemberlakuan *passenstelsel* di tahun 1816, kemudian dilanjutkan dengan sistem pemukiman terpusat pada satu tempat (*wijkenstelsel*) bagi penduduk pendatang sejak tahun 1820.⁴⁹



Gambar 6. Kampung Tionghoa (wilayah Kampung Pondok ditandai dengan warna kuning)

Sumber : Pemerintah Kota Padang

Warna hijau di dalam gambar 6. menunjukkan lokasi kampung Cina. Kawasan kampung Cina berada tidak jauh dari muara sungai Batang Arau. Etnis Cina memilih tempat tinggal di sekitar muara dengan tujuan supaya dekat dengan akses transportasi sungai dan laut yang merupakan sarana utama dalam perdagangan ekspor dan impor pada waktu itu. Kampung Cina yang tertelak di kecamatan Padang Selatan,

bawah pengawasan pemerintah kolonial Belanda dengan tetap menggunakan orang Cina sebagai patnernya. Lihat lebih lanjut Rusli Amran, *Sumatra Barat Plakat Panjang*, Jakarta : Sinar Harapan, 1981, hlm. 279-284.

⁴⁹ Tanah di sekitar pinggir aliran sungai Batang Arau ini cukup keras dan padat sehingga dari pelabuhan (Padang) bisa dipasang sambungan rel dan jaringan kawat telegram dari stasiun Padang ke Pulau Air. Hal ini memudahkan komunikasi dan juga meningkatkan intensitas interaksi. Lihat lebih lanjut Stanley Henry Beaver, *Netherlands East Indies, Volume 2*, London : Naval Intelligence Division, 1994, hlm. 383.

memiliki akses laut, sungai, dan darat. Akses laut dan sungai berjarak dekat sekali, bahkan beberapa gudang penyimpanan hasil bumi dan rumah Major Lie Saay halamannya berhadapan langsung ke sungai Batang Arau, sementara akses darat juga terletak pada jarak yang sangat dekat, sekitar 50 m menuju stasiun kereta api Pulau Air.

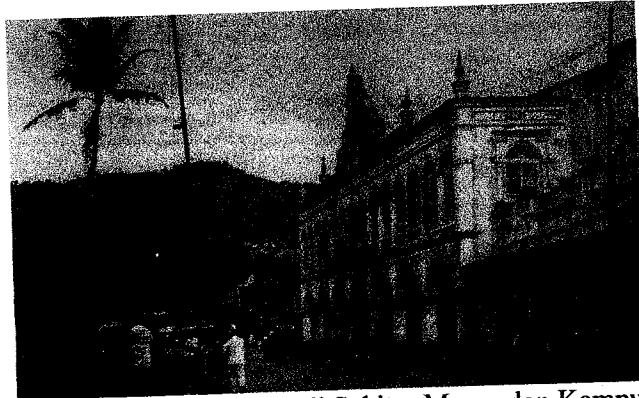
Jika dibandingkan dengan perkampungan etnis lainnya yang juga ditemukan di Padang, kampung Cina memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik ke-Cina-an sangat jelas terlihat di sekitar kampung Cina seperti orientasi rumah Cina Padang di latar belakang oleh *feng sui* menghadap ke sungai, gunung atau bukit dan laut. Posisi kampung Cina menghadap ke sungai Batang Arau, Bukit Gado-Gado dan Gunung Padang, serta laut Samudera Indonesia memiliki makna yang dalam. Pratiwo mengatakan bahwa orang Cina selalu memiliki pola tata ruang pemukiman yang strategis, karena itu perkampungan Cina (*Pecinan*) cenderung merupakan area perdagangan yang ideal jika dikaitkan dengan letak dan pola jalannya.⁵⁰ Hal ini juga ditemukan di Padang, lengkapnya perkampungan Cina dengan sarana transportasi dan pasar menyebabkan aktivitas kehidupan masyarakatnya pun lebih banyak berkaitan dengan perdagangan.

Di Padang masih banyak ditemukan bangunan ibadah berupa rumah marga, klenteng, perkumpulan sosial, budaya dan kematian berarsitektur Cina.⁵¹ Bangunan yang ada di sekitar kampung Cina berbentuk toko berjejer mengikuti alur jalan. Pada umumnya toko-toko tersebut bertingkat dua dan memiliki fungsi ganda, yaitu lantai dasar untuk toko (usaha) dan lantai dua untuk tempat tinggal. Ciri-ciri rumah took seperti di Padang sebetulnya juga ditemukan di kota-kota besar yang banyak dihuni

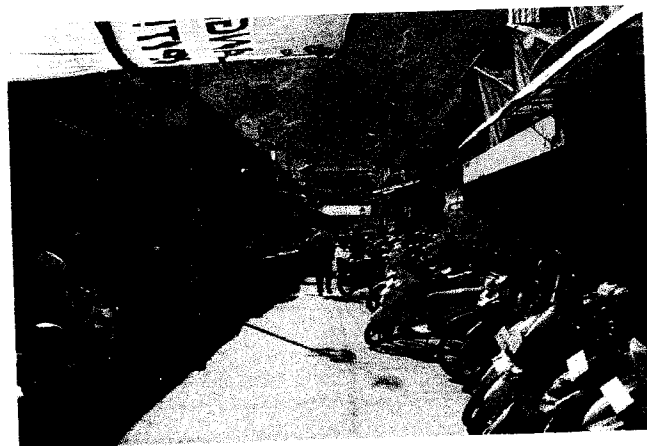
⁵⁰ Pratiwo, *Arsitektur Tradisional Cina Dan Perkembangan Kota*, Yogyakarta : Ombak, 2010, hlm. 49-50

⁵¹ Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa akar budaya yang mendasari pertumbuhan budaya dan tradisi Cina sangat kuat tertanam oleh sejarahnya. Kesamaan satu teritorial dan nilai-nilai leluhur yang tercermin dalam ajaran Tao dan Konfusius menjaga kelestarian adat dan tradisi Cina di perantauan termasuk di Asia Tenggara. Lihat lebih lanjut Yin Cheong Cheng, *New Paradigm for Reengineering Education : Globalization, Localization and Individualization*, Dordrecht : Springer, 2005, hlm. 79.

oleh etnis Cina, seperti di Batavia (Jakarta), Semarang, Surabaya, dan kota lainnya. Di samping rumah yang berfungsi sekaligus untuk tempat usaha, di kawasan kampung Cina juga ditemukan bangunan-bangunan besar yang digunakan untuk gudang penyimpanan sementara hasil bumi sebelum dibeli oleh pedagang asing.⁵²



Gambar 7. Gudang dan Perkantoran di Sekitar Muara dan Kampung Tionghoa
Sumber: Dokumen Padangsche Spaark Bank



Gambar 8. Toko di Sepanjang Jalan Kampung Tionghoa
Sumber : Dokumentasi Pribadi

⁵² Bagi orang Cina, pembangunan rumah-toko (ruko) dan rumah-usaha (rusa) yang mulai marak pada akhir 1980-an di Indonesia bukan merupakan hal baru. Selama ini mereka menyatukan tempat tinggal dan tempat usaha di kedai-kedai, warung, dan kios. Sementara itu fungsi loteng sebagai tempat tinggal dan bagian bawah sebagai toko telah dikenal dalam budaya kota Funnan. Lihat lebih lanjut Bernard Phillipe Groslier, *Indocina : Persilangan Kebudayaan*, Jakarta : KPG, 2007, hlm. 80.

Gambar 7 dan gambar 8 menunjukkan bahwa pola pemukiman etnis Cina Padang terlihat tersusun rapi. Berbeda halnya dengan pola pemukiman Cina yang pada umumnya berangkat dari kota pelabuhan yang berkembang dari bentukan kolonial dengan ciri-ciri yang sama, terutama mengenai gaya bangunan dan ornamen-ornamen yang menghiasinya. Pemukiman etnis Cina di beberapa kota besar hampir menyerupai perkampungan kumuh yang terletak di pinggiran sungai atau kali yang mengalir di tengah kota. Lokasi dan pola pemukiman menyebabkan perkampungan terlihat tidak teratur dan sumpek dengan barang-barang yang menumpuk di terasteras rumah.⁵³

Van Mourik mengatakan bahwa di Padang terdapat pasar yang terdiri dari toko-toko yang berjejer secara memanjang di sepanjang jalan. Ketika mengelilingi pasar, Van Mourik mengatakan bahwa toko milik pedagang Cina kelihatan lebih baik, jika dibandingkan dengan toko milik orang setempat. Bangunan toko Cina bertingkat dan tidak menggunakan jendela, tetapi terdapat sebuah lubang besar di tembok yang ditutupi dengan papan. Papan tersebut, jika dibuka pada siang hari akan menjadi tempat meletakkan barang-barang dagangan mereka, seperti limun, sirup, air mineral, bir, rokok, makanan kaleng, pernak pernik, alat tembak, dasi, barang-barang yang terbuat dari tanah (kendil), barang-barang bangunan (besi, paku), minyak wangi, dan barang-barang kebutuhan hidup lainnya.⁵⁴

Walaupun kondisi toko Cina isinya acak-acakan dan letak barang yang dijual berantakan, tetapi pedagang Cina tahu di mana mereka meletakkannya. Dalam waktu yang sangat cepat pedagang tersebut dapat mengambil apa yang diminta oleh pembelinya. Pedagang Cina tahu persis apa yang dibutuhkan oleh konsumennya. Biasanya harga jual barang-barang di toko Cina lebih tinggi dibandingkan dengan di toko pedagang Minangkabau. Jadi jika pembeli menawar barang sampai $\frac{3}{4}$ dari harga yang dibelikan, penjual Cina masih mendapat keuntungan. Untuk barang-barang

⁵³ Pratiwo, *op. cit.*,

⁵⁴ Justus Van Mourik, *Indrukken van een "Totok" Indische Type En Schetsen*, Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, 1897, hlm. 19.

tertentu, seperti sirup dan makanan kering biasanya dijual dengan harga yang pas dan tidak tinggi karena pedagang tersebut tahu barang seperti itu banyak dan jika dijual dengan harga yang tinggi, maka pedagang tersebut bisa kehilangan pelanggannya.⁵⁵

Di Padang masih banyak ditemukan bangunan ibadah berupa rumah marga, klenteng, dan perkumpulan sosial, budaya, dan kematian berarsitektur Cina.⁵⁶ Menghadap ke sungai Batang Arau dan Bukit Gado-Gado di Seberang Palinggam terdapat sebuah Klenteng yang bernama See Hien Kiong. Klenteng See Hien Kiong didirikan pada tahun 1841 oleh sekelompok pedagang Cina yang berasal dari orang-orang Tjiang dan Tjoan Tjioe.⁵⁷ "Se" berarti barat dan kependekan dari *Se Tjong*, "Hien" berarti timbul atau terbit, tempat agama dari *Se Tjong* terbit, dan "Kiong" berarti balaeirung atau tempat kedudukan. Jika digabungkan, itu berarti Baleirung tempat kedudukan keramat yang beragama Budha.⁵⁸ Sesuai dengan adat istiadat yang lazim dilakukan oleh para pendatang dari Cina, bahwa di mana pun mereka merantau, orang Cina akan mendirikan tempat beribadah yang dianggap

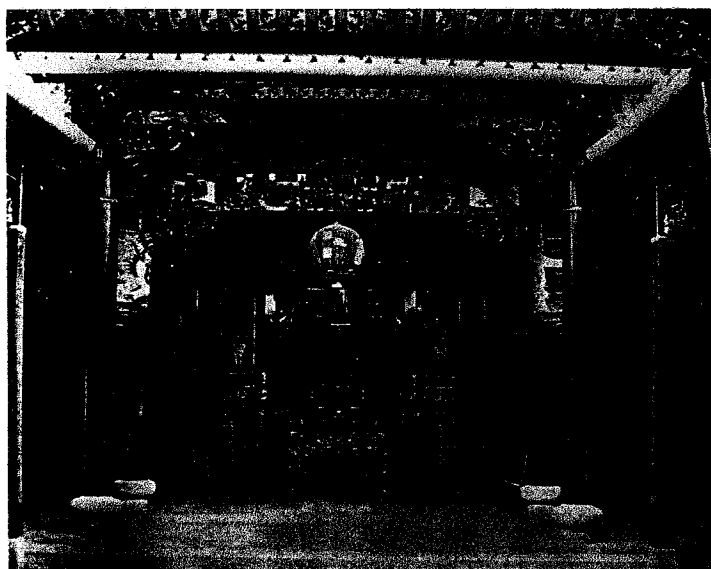
⁵⁵ Incek wat, wawancara, Padang 6 Oktober 2017.

⁵⁶ Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa akar budaya yang mendasari pertumbuhan budaya dan tradisi Cina sangat kuat tertanam oleh sejarahnya. Kesamaan satu teritorial dan nilai-nilai leluhur yang tercermin dalam ajaran Tao dan Konfusius menjaga kelestarian adat dan tradisi Cina di perantauan termasuk di Asia Tenggara. Lihat lebih lanjut Yin Cheong Cheng, *New Paradigm for Reengineering Education : Globalization, Localization and Individualization*, Dordrecht : Springer, 2005, hlm. 79.

⁵⁷ Indra, *Wawancara*, Padang, 6 Oktober 2017. Sekretaris Klenteng ini mengatakan bahwa Klenteng See Hien Kiong didirikan pada tahun 1841. Tahun tersebut diketahui dari tulisan tahun yang tertera di lonceng (*Genta*) pertama yang terletak di tengah-tengah Klenteng.

⁵⁸ Indra, *Wawancara*, Padang, 6 Oktober 2017. Lebih lanjut Indra menjelaskan bahwa berdasarkan feng sui, pembangunan Klenteng Sei Hien Kiong memberikan kehidupan yang makmur bagi masyarakatnya karena menghadap ke Bukit Gado-Gado (Gunung Padang) dan menghadap ke aliran air (sungai Batang Arau). Dari cerita leluhur yang berkembang secara turun temurun diketahui bahwa dari mulut naga yang ada di atap Klenteng dahulunya selalu menetes air yang tidak hentihentinya. Air yang mengalir diyakini sebagai air suci yang bisa menyembuhkan penyakit. Air tersebut menjadi kering setelah di pinggir sungai Batang Arau, tepatnya dihadapan Klenteng dibangun sebuah gedung oleh kapten Cina yang bernama Gho Tjong pada tahun 1906. Kehadiran gedung tersebut diyakini telah menutup feng sui Klenteng See Hien Kiong, sehingga sejak itu air suci tidak mengalir lagi. Gedung tersebut kemudian dijadikan sebagai *Padangsche Spaarbank* (Bank Tabungan Padang) oleh "*loge Matahari*". Klenteng See Hien Kiong merupakan satu-satunya yang terdapat di Sumatera Barat. Berbeda halnya dengan kota lainnya di Indonesia, seperti di Semarang terdapat banyak klenteng dengan perbedaan leluhur dan dewa yang disembah oleh etnis Cina Semarang.

keramat (*Tan Soe atau Hoet Tjo*). Klenteng See Hien Kiong menjadi tempat beribadat orang Cina secara turun temurun kepada *Kwan Im Teng* (klenteng Kwam Im).⁵⁹ Keberadaan klenteng See Hien Kiong sebagai satu-satunya klenteng bagi etnis Cina yang tinggal di Padang, bahkan di Sumatera Barat adalah fenomena yang menarik. Klenteng See Hien Kiong merupakan tempat untuk melakukan sembahyang terhadap dewa atau leluhur yang mereka sembah menunjukkan bahwa mayoritas etnis Cina Padang memiliki leluhur yang sama. Berbeda halnya dengan etnis Cina yang tinggal di beberapa kota di Indonesia, misalnya di Jakarta dan Semarang ditemukan banyak klenteng yang masing-masing memiliki spesifik tersendiri dengan leluhur dan dewa yang berbeda pula. Lihat gambar 9 dan gambar 10.



Gambar 9. Altar Bagian Dalam Klenteng See Hien Kiong
Sumber : File Collectie Tropenmuseum TMnr 60003313

⁵⁹ Dalam batu peringatan tidak disebutkan bahasa yang digunakan oleh orang Tjiang dan Tjoan yang mendirikan dan mengeluarkan uang untuk pembangunan Klenteng See Hien Kiong, namun dikatakan bahwa Kwam Im Teng adalah milik bangsa "Hok Hwa" saja. Lihat lebih lanjut *Batoe Peringatan Dari Bangsa Hock Kian afd. Tjiang dan Tjoan Tjioe Tinggal di Padang, Membaharoei Se Hien Kion*, Padang : Majoer Titulair Lie Goan Hoat, Khong Soe 23 Tahoen Theng Joe Tahoen Belanda 1897. Batu peringatan ini dialih bahasakan ke bahasa Indonesia ejaan lama pada tanggal 1 November 1905.



Gambar 10. Klenteng See Hien Kiong Tahun 1860
Sumber : File Collectie Tropenmuseum TMnr 60003311.

Sebagai komplek pemukiman, kampung Cina juga dilengkapi dengan pasar yang berawal dari kios-kios bambu di sekitar halaman klenteng. Untuk membayar cicilan pinjaman pembangunan klenteng setelah mengalami kebakaran di tahun 1861, kios-kios bambu tersebut disewakan kepada para pedagang. Lama kelamaan kios-kios bambu berkembang menjadi pasar yang dikenal dengan nama pasar Tanah Kongsí.⁶⁰ Pasar Tanah Kongsí terletak di tengah-tengah kampung Cina. Pedagang yang berjualan di pasar Tanah Kongsí tidak hanya berasal dari etnis Cina, melainkan juga ditemukan pedagang Minangkabau. Pedagang Minangkabau yang berdagang di pasar Tanah Kongsí sebagian besar petani atau nelayan yang langsung membawa barang dagangannya berupa sayuran, telur, buah-buahan, dan kebutuhan hidup lainnya dari daerah pesisir, seperti dari Painan, Kambang, Muko-Muko, dan dari daerah lainnya. Pasar Tanah Kongsí ramai dikunjungi pembeli sejak Subuh sampai siang hari (sekitar jam 12). Pembeli yang datang ke pasar Tanah Kongsí berasal dari etnis Cina, Indo, bangsawan Minangkabau, dan wanita-wanita Eropa.⁶¹

⁶⁰ Tanah Kongsí memiliki pengertian sebagai tanah yang diperoleh dari hasil kerjasama. Lihat lebih lanjut Batoe Peringatan Dari Bangsa Hock Kian, *op. cit.*

⁶¹ Batoe Peringatan Dari Bangsa Hock Kian, *Ibid.*, hlm. 20 - 21.

Di samping memiliki klenteng See Hien Kiong dan pasar Tanah Kongs, Pondok juga dilengkapi dengan komponen-komponen kehidupan lainnya, seperti rumah marga, sarana budaya, sosial, dan ritual yang berkaitan dengan perkumpulan sosial yang biasa disebut dengan kongs. Secara berkelompok di sekitar klenteng terdapat rumah marga-rumah marga, yaitu di sebelah timur klenteng terdapat rumah marga Tan, rumah marga Oei, rumah marga Ong, dan rumah marga Choa, sedangkan di sebelah barat klenteng terdapat rumah marga Lie & Kwee. Rumah marga Gho dan Lim terletak di sekitar daerah Pulau Karam. Sementara itu rumah marga Kho belum didirikan karena marga Kho baru berdiri sekitar dua tahun belakangan.⁶²

D. Organisasi Sosial dan Budaya

Keberadaan etnis Tionghoa sebagai bagian dari masyarakat Kota Padang juga diikuti dengan berbagai aktivitas kehidupannya. Secara umum masyarakat selama ini cenderung mengeneralisasikan etnis Tionghoa sebagai komunitas yang homogen, padahal kenyataannya etnis Tionghoa merupakan suatu komunitas yang heterogen dengan berbagai perbedaannya.⁶³ Perbedaan yang krusial terlihat pada struktur sosial-budaya yang terdiri dari berbagai marga dengan berbagai perbedaan budaya dan karakteristiknya. Masing-masing marga terdiri dari sub-sub marga (marga kecil).⁶⁴

⁶² Bersama klenteng, rumah abu juga menjadi bagian dari ciri fisik dan institusi agama Konghucu. Lihat lebih lanjut Abdulah Dahana dan Nusron Wahid, *Telapak Sejarah Sam Po Kong : Menelusuri Perang Cina Dalam Penyebaran Islam di Indonesia*, Jakarta : DPP Golkar dan Suara Karya, 2005, hlm. 57.

⁶³ Menurut data Paguyuban Sosial Marga Indonesia (PSMTI) diperkirakan ada sekitar 300-an marga di Indonesia dan sekitar 160-an marga ada di Jakarta. Mayoritas marga di Indonesia dilafalkan dengan dialek Hokkian (*Minnan*). Hal ini tidak mengherankan karena mayoritas keturunan Indonesia berasal dari provinsi Fujian (provinsi Hokkian). Lihat lanjut David CL Ch'ng, *Suksus Bisnis Cina Perantauan : Latar Belakang, Praktek Bisnis dan Jaringan Internasional*, Stephen Suleeman, (penterjemah), Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1995, hal. 45

⁶⁴ Marga berasal dari kebudayaan Han. Marga menunjukkan identitas seseorang yang diletakkan di depan nama. Marga memiliki dua karakter, yaitu *xing* (yang muncul sekitar 6.000 tahun yang lalu) dan *shi* (muncul pada masa pemerintahan *Huangdi/Yellow Emperor*). Seiring semakin kompleksnya struktur sosial masyarakat kemudian *xing* merujuk kepada *marga*, sedangkan *shi* merujuk kepada *klan* (marga kecil). Satu marga bisa dibagi atas beberapa klan menurut garis keturunan yang berbeda. Lihat lebih lanjut Bersama klenteng, rumah abu juga menjadi bagian dari ciri fisik dan institusi agama Konghucu. Lihat lebih lanjut Abdulah Dahana dan Nusron Wahid, *Telapak Sejarah*

Heterogenitas kelompok etnis ini juga menyebabkan munculnya pengelompokan etnis atas dasar bentuk dan kepentingan, seperti pengelompokan yang dilakukan oleh David CL Ch'ng.

Dasar Pengelompokan Etnis

Jenis	Prinsip yang mempersatukan	Contoh
Perkumpulan klan	Kekerabatan berdasarkan marga	Perkumpulan marga Lie
Hui-kuan	Tempat tinggal	Perkumpulan See-Yap
Perkumpulan "bahasa"	Dialek	Perkumpulan Fujian
Gilda (asosiasi se profesi)	Keterampilan	Perhimpunan pengrajin emas

Sumber: David CL Ch'ng, *Suksus Bisnis Cina Perantauan : Latar Belakang, Praktek Bisnis dan Jaringan Internasional*, Stephen Suleeman, (penterjemah), Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1995, hal. 45.

Dari pembagian kelompok etnis di atas, perkumpulan klan berdasarkan hubungan kekerabatan ditemukan di Padang. Untuk kelompok lainnya, kemungkinan karena jumlahnya yang sedikit menyebabkan asosiasi berdasarkan tempat tinggal, dialek, dan keterampilan tidak ditemukan di Padang. Pada dasarnya etnis Cina Padang sudah terkelompok ke dalam perkumpulan-perkumpulan yang sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu, yaitu perkumpulan marga dan perkumpulan sosial, budaya, dan pemakaman Hok Teek Tong (HTT) atau Heng Beng Tong (HBT).

Perkumpulan marga dan perkumpulan kematian merupakan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang sosial, budaya, dan pemakaman. Perkumpulan menjadi institusi yang penting bagi etnis Cina, terutama perkumpulan persaudaraan berdasarkan daerah asal. Perkumpulan persaudaraan berkembang dari organisasi rahasia (*triad*) yang kemudian meluas menjadi organisasi sosial, budaya, dan

Sam Po Kong : Menelusuri Perang Tionghoa Dalam Penyebaran Islam di Indonesia, Jakarta : DPP Golkar dan Suara Karya, 2005, hlm. 57.

kematian di tahun 1851. Perubahan tersebut terjadi karena sejak tahun 1851 perkumpulan rahasia dilarang secara resmi oleh pemerintah kolonial Belanda.⁶⁵ Sampai tahun 1941 diketahui ada 16 perkumpulan etnis Cina yang ditemukan di Padang, namun tidak diketahui nama dan aktivitas perkumpulan secara jelas.⁶⁶ Untuk menghindari permasalahan dengan pihak pemerintah, banyak perkumpulan (*asosiasi*) etnis Cina yang ditutup. Bahkan sejak itu perkumpulan masyarakat cenderung untuk tidak melibatkan diri dengan politik negara yang berkuasa hingga saat ini.

Sistem marga dalam keluarga etnis Cina didasarkan pada asal usul keturunan dari leluhur yang sama. Pada mulanya marga hanya sebagai tempat penampungan bagi imigran sesuku yang baru datang ke Padang.⁶⁷ Rumah marga atau yang disebut kongsi oleh Cina Padang mengayomi etnis Cina berdasarkan suku yang sama, sehingga aktivitas utama rumah marga adalah membantu sesama anggota, menyelenggarakan sembahyang kepada leluhur dan dewa-dewa yang diyakini sebagai pelindung. Selain itu, rumah marga juga berperan dalam melestarikan kebudayaan dan tradisi leluhur, termasuk menyelenggarakan upacara-upacara yang bersifat kekeluargaan, seperti pesta perkawinan, menyelenggarakan sembahyang kepada leluhur dan dewa-dewa yang diyakini sebagai pelindung, serta prosesi pemakaman secara tradisional. Setiap rumah marga secara rutin akan mengadakan:

1. upacara sembahyang tiap cu-it
2. cap go di gedung pertemuan masing-masing rumah marga
3. rapat rutin (bulanan atau sesuai keperluan marga)
4. penerimaan dan pelantikan anggota baru

⁶⁵ Justian Suhandinata, *WNI Keturunan Dalam Stabilitas Ekonomi & Politik Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 119.

⁶⁶ *Sumatera Bode*, 19 Desember 1941.

⁶⁷ Kongsi memiliki arti yang sama dengan kerjasama. Kata kongsi sering digunakan dalam aktivitas perdagangan, karena orang cenderung berusaha secara bekerjasama atau yang biasa dikenal dengan perkongsian. Kata kongsi bagi etnis Cina Padang tidak saja digunakan dalam aktivitas ekonomi, namun dalam kehidupan sosial kata-kata kongsi sering ditujukan untuk menunjukkan tempat yang berkaitan dengan adanya kegiatan kerjasama, dan sosial, seperti untuk rumah marga dan himpunan sosial, budaya, dan kematian. Lihat J.L. Vleming, "The Chinese Business Community in Netherlands India", dalam M.R. Fernando, *Chinese Economic Activity in Netherlands India : Selected Translation from the Dutch*, Singapore : Institute of Southeast Asia Studies, 1992, hlm. 119.

5. ritual sembahyang sesuai tradisi
6. ciak ciu (makan bersama) dengan waktu yang ditetapkan
7. malam pertemuan secara bergilir antara satu rumah marga dengan rumah marga yang lainnya.
8. Perayaan-perayaan hari besar
9. Kegiatan sosial.⁶⁸

Secara hukum perdata Eropa, perkumpulan/kongsi adalah suatu badan hukum dan mirip dengan perseroan. Sejak semula kongsi tidak berafiliasi dengan politik karena tujuannya adalah untuk kegiatan sosial terutama memberikan perlindungan kepada anggotanya. Melalui perkumpulan marga, terbina solidaritas sosial yang tinggi di antara sesama anggotanya. Ibarat satu keluarga besar, sesama anggota marga terjalin hubungan kekerabatan yang menjadi dasar bagi hubungan sesama kelompok. Melalui kongsi, etnis Cina saling memperhatikan antara yang satu dengan yang lainnya. Diibaratkan filosofi "sapu lidi", "semakin banyak, semakin kuat ikatannya."⁶⁹

Sementara itu, menurut hukum tradisional Cina, kongsi memiliki arti kerjasama dalam bidang perdagangan. Kerjasama dapat dilakukan dengan membentuk perusahaan yang dinamakan dengan perkongsian dagang. Perkongsian dagang menurun setelah fasilitas bank sebagai penyedia modal berkembang di Hindia Belanda. Hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai tradisional yang semula loyal dan memiliki solidaritas yang tinggi terhadap kelompok menjadi

⁶⁸ Pada dasarnya kegiatan di atas menjadi kegiatan rutin bagi hampir semua rumah marga. Hal ini juga berkaitan erat dengan sistem patrimonial yang berlaku dalam masyarakat Cina, yaitu anak laki-laki sebagai penerus marga. Mengenai dewa yang digunakan sebagai pelindung, biasanya hal itu dikaitkan dengan mata pencaharian yang umumnya dianut oleh marga tersebut. Lihat lebih lanjut Pax Benedanto, *Kesusastraan Melayu dan Kebangsaan Indonesia, Jilid 10*, Jakarta : KGP, 2007, hlm. 52

⁶⁹ Di daerah lain kongsi mulai terafiliasi dengan aktivitas politik dan premanisme, seperti di Borneo Barat selama masa kolonial, kongsi juga menjadi simbol dominasi politik dan keamanan atas daerah kerja mereka yang diborong secara ekonomi (*pacthen*). Lihat lebih lanjut Bingling Yuan, *Chinese Democracies : a Study of The Kongsis of West Borneo (1776-1884)*, Leiden : Research School of Asian, 2000, hlm. 3.

mementingkan kepentingan individualisme atau dalam skala kelompok kecil (keluarga inti).⁷⁰

Etnis Cina di Padang berasal dari berbagai marga, namun dikarenakan jumlah mereka terbatas, hanya tujuh marga yang mendirikan rumah marga, yaitu marga Lie & Kweek, marga Tan (*Eng Cuan Ton*) didirikan pada tanggal 22 Maret 1888 oleh Tan Siang,⁷¹ marga Oei, marga Ong, marga Lim, marga Gho (*Jan Leng Tong*) Padang berdiri sejak 14 Januari 1888 (Tahun Imblek 2439) dengan ketua pertama bernama Gho Tjong, serta marga Huang. Hampir semua rumah marga di Padang terstruktur dengan rapi dan terorganisir secara profesional seperti rumah marga Tan dan rumah marga Gho. Struktur kepengurusan biasanya disesuaikan dengan pemerintah yang berkuasa.⁷² Lihat gambar marga-marga berikut,

⁷⁰ Kecenderungan individualistis mulai muncul ketika menyangkut pembagian keuntungan dan kerja yang tidak berimbang. Sifat ini melunturkan kerjasama dalam kongsi, tetapi ironisnya mendorong munculnya bentuk-bentuk kongsi baru. Lihat lebih lanjut Laurence K.L. Siaw, *Chinese Society in Rural Malaysia*, Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1983, hlm. 111

⁷¹ Marga Gho menghormati leluhur *Gho Kui Cak* dengan Tua Pe Kong tanah Hok Tek Peng Djin dan Kuan Tek Ya (Kuan Kong). Setiap Sha Gwee Cap Go diadakan perayaan dan penyembahan kepada para Tua Pe Kong dan dewa-dewa yang disembah. Gho Tjeng Li, Wawancara, Padang tanggal 6 Oktober 2017; ANRI, Besluit, 21 Juli 1918, no. 41, bundle Alg. Secretarie.

⁷² Struktur kepengurusan rumah marga biasanya terdiri dari ketua yang biasa dipanggil dengan Tuako, wakil ketua I (Jiko), Wakil ketua II (Shako), sekretaris, bendahara, komisaris, pembina, dan sub-sub bidang. Struktur kepengurusan pertama disahkan melalui akte pendirian yang disetujui oleh pemerintah yang berkuasa



Gambar 11. Gedung Himpunan Keluarga Marga Lie-Kwee (Long See Tong)
Sumber : Dokumentasi Pribadi



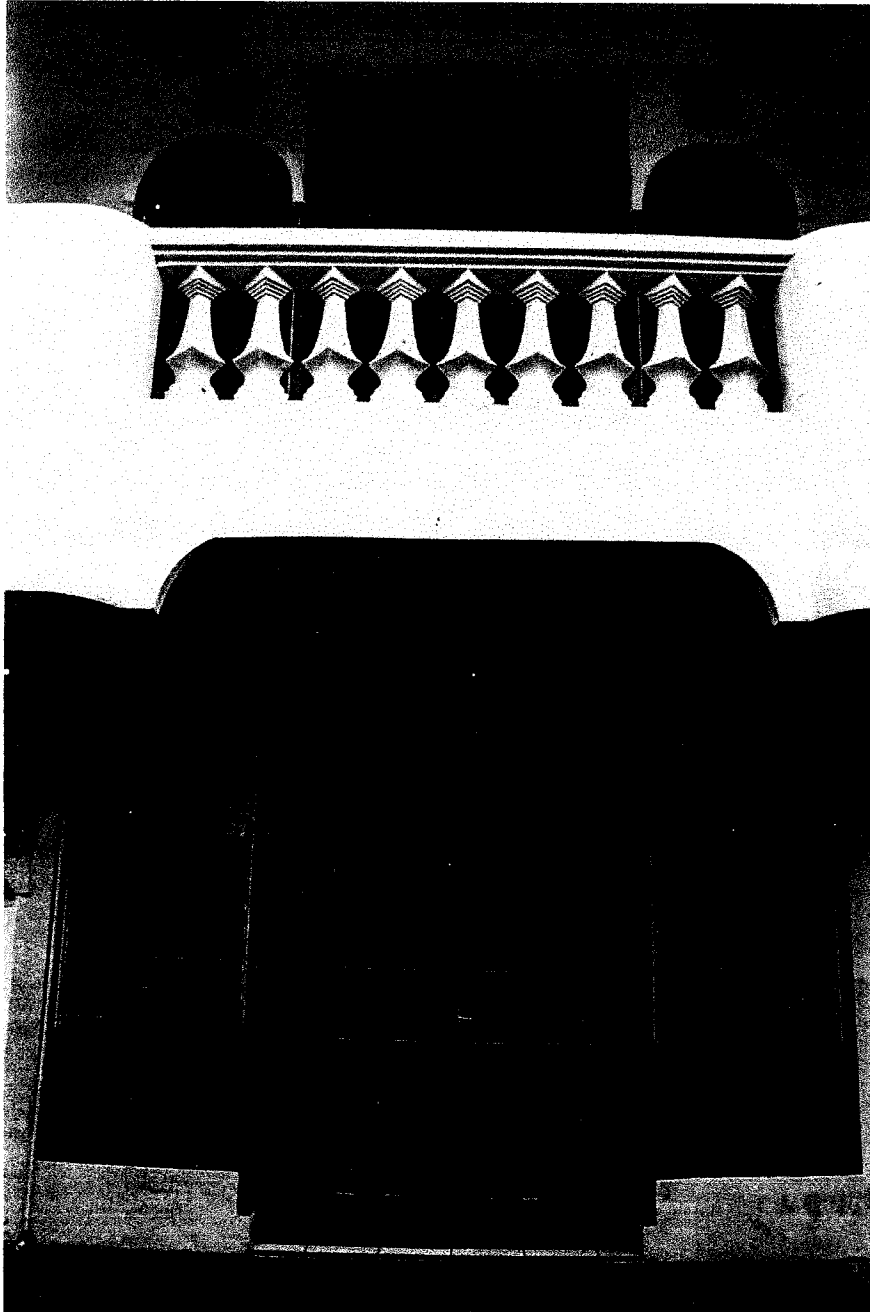
Gambar 12. Gedung Himpunan Keluarga Gho
Sumber : Dokumentasi Pribadi



**Gambar 13. Gedung Himpunan Keluarga Marga Huang
Sumber : Dokumentasi Pribadi**



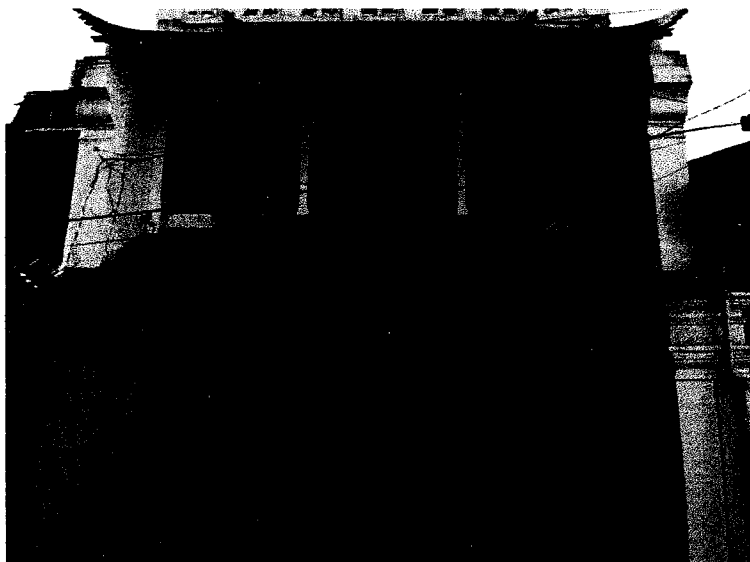
**Gambar 14. Gedung Himpunan Keluarga Lim
Sumber : Dokumentasi Pribadi**



Gambar 15. Gedung Himpunan Keluarga Ong
Sumber : Dokumentasi Pribadi



Gambar 16. Gedung Himpunan Keluarga Tan
Sumber : Dokumentasi Pribadi



Gambar 17. Gedung Himpunan Keluarga Tjoa dan Kwa
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Selain rumah marga, etnis Cina Padang juga bergabung ke dalam perkumpulan sosial, budaya, dan kematian yang bersifat heterogen, yaitu Hok Teek Tong (HTT) yang berdiri sejak tahun 1863 dengan Toako pertama Lee Po Keng⁷³ dan Heng Beng Tong (HBT) yang berdiri sejak tahun 1873 dengan Toako pertama Oei A King.⁷⁴ Meskipun sudah berdiri sejak lama, namun secara administrasi kedua perkumpulan sosial, budaya, dan kematian ini baru resmi terdaftar sejak tahun 1895.⁷⁵ Yang menjadi anggota HTT dan HBT adalah para laki-laki Cina (*Hiati*) yang telah berusia di atas 17 tahun.⁷⁶ Pemilihan untuk menjadi anggota HTT atau HBT didasari oleh pilihan hati nurani dengan konsekuensi mengikuti aturan budaya, yaitu penyembahan terhadap roh leluhur yang berbeda. Hal ini merupakan konsensus yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun yang telah melakukan pilihan perkumpulan HTT atau HBT. Bagi seseorang yang sudah masuk menjadi anggota HTT, maka orang tersebut tidak akan bisa pindah ke perkumpulan HBT. Begitu juga sebaliknya jika seseorang sudah masuk HBT, orang tersebut juga tidak akan diterima di HTT. Aturan

⁷³ Hok Tek Tjeng Sin merupakan Tua Pek Kong yang disembah oleh orang yang menjadi anggota HTT. Tua Pek Kong di zaman dahulu adalah seorang raja yang adil dan bijaksana. Lihat lebih lanjut Sejarah Hok Tek Tjeng Sin (Dewa Bumi), diterjemahkan dari terbitan bahasa Mandarin pada tahun 1866 dan Anggaran Dasar HTT yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tahun 1987. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Tjinta Teman Padang*, Padang : Pengurus Himpunan Tjinta Teman Padang, 12 Juni 1987, hlm. 3. Tokoh dan tahun kepengurusan HTT diketahui melalui foto yang ada di sekretariat HTT Padang. Ditemukan perbedaan cara penulisan nama Hok Tek Tong pada HTT Padang dengan HTT Penang. HTT Padang penulisannya dimulai dari kanan ke kiri, sedangkan HTT Penang ditulis dari kiri ke kanan. Arti tulisannya pada dasarnya sama. Perbedaan hanya pada arah penulisannya saja. Prof A. Dahana mengatakan bahwa perbedaan arah pada penulisan huruf disebabkan karena tulisan HTT yang dimulai dari kanan ke kiri masih merupakan tulisan kuno, sedangkan tulisan HTT yang dimulai dari kiri ke kanan sudah dipengaruhi oleh modernisasi akibat pengaruh dari Barat.

⁷⁴ Heng Beng Tong memiliki Tua Pek Kong Kwan Tee Koen dan dewa pelindung lainnya yang belum bias diungkapkan. Menurut Statuta kepengurusan HBT periode 1895-1901 diketahui bahwa Tuako pertama HBT bernama Lim A King, namun setelah dilakukan perbandingan data dengan *Huishoudelijk Reglement, Heng Beng Tong*, Padang, 4 Juni 1924, Reglement Peratoeran dari Kongtie Geng Beng Tong, Fort de Kock 17 April 1899, dan *Beshluit*, tanggal 31 December 1895, nomor 62 diketahui bahwa President (Tuako) pertama HBT bernama Oei A King

⁷⁵ Staatsblad no. 79 tahun 1895; Staatsblad no. 129 tahun 1917

⁷⁶ Aturan usia untuk menjadi anggota HTT atau HBT tercantum dengan jelas dalam pasal di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HTT dan HBT. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Tjinta Teman*, Padang 12 Juni 1987; *Huishoudelijk Reglement, Heng Beng Tong*, Padang 4 Juni 1924.

ini berjalan sesuai dengan kesepakatan lisan antara kedua perkumpulan tersebut dan hingga saat ini ditaati oleh etnis Cina yang tinggal di Padang. Selain di Padang, HTT dan HBT juga memiliki cabang di beberapa daerah di pedalaman Sumatera Barat, yaitu di Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh, bahkan sampai ke Pekanbaru dan Sibolga.

Kebutuhan terhadap adanya perkumpulan kematian bagi orang Cina disebabkan oleh faktor budaya dan adat istiadat tradisional Cina. Adanya dorongan dan kebutuhan orang Cina, jika mati harus memiliki peti mati dan membutuhkan biaya serta tenaga yang banyak untuk mengurus pemakaman menyebabkan kebersamaan dalam perkumpulan pemakaman sangat penting. Kebutuhan ritual setelah kematian menyebabkan setiap laki-laki yang sudah berumur di atas 17 tahun, merasa perlu untuk memilih masuk salah satu dari perkumpulan pemakaman budaya yang ada di Padang. Pada dasarnya HTT dan HBT adalah perkumpulan kematian yang memiliki aktivitas yang sama, namun kedua perkumpulan tersebut dibedakan oleh Tua Pek Kong yang mereka sembah. Perbedaan Tua Pek Kong yang disembah mempengaruhi terbentuknya karakter yang berbeda dari keanggotaan masing-masing perkumpulan. Bahkan di antara anggota HTT dan HBT terdapat benang merah yang seakan memisahkan kedua kelompok perkumpulan tersebut.

Jika ditinjau dari segi kegiatan yang telah dilakukan, HTT dan HBT hamper memiliki kegiatan yang sama. Kegiatan utama dari kedua perkumpulan ini adalah pertama secara budaya, menyelenggarakan upacara sembahyang kepada leluhur atau dewa pelindung, menyelenggarakan upacara-upacara yang berhubungan dengan ritual-ritual tradisi leluhur, seperti perayaan Cap Go, perayaan tahun baru Imlek, dan makan bersama (*Ciat Ciu*). Kedua kematian, yaitu menyediakan perlengkapan, melaksanakan upacara penghormatan jenazah, dan menyelenggarakan prosesi pemakaman secara tradisional. Ketiga kegiatan sosial, yaitu menyelenggarakan kegiatan sosial, baik untuk kalangan sendiri maupun untuk bakti sosial di daerah yang terkena bencana dalam berbagai bentuk kegiatan (donor darah, bantuan ke panti

jompo, sumbangan kebutuhan pokok, bantuan kesehatan, pengembangan pendidikan, dan sebagainya).

BAB IV

IDENTITAS ETNIS TIONGHOA PADANG

Kajian tentang etnis Tionghoa di Indonesia sudah banyak dilakukan, namun identitas etnis Tionghoa masih sulit untuk didefinisikan karena etnis Tionghoa memiliki banyak identitas dan cenderung berubah seiring perjalanan waktu. Sebagai etnis yang keberadaannya merupakan hasil dari proses migrasi yang dilakukan oleh leluhur pada beberapa dekade yang lalu, maka identitas etnis Tionghoa Padang sangat dipengaruhi oleh unsur *ke-Tionghoa-an* yang dibawa dari Tiongkok. Karena proses migrasi yang sudah berlangsung lama dan mengalami proses pewarisan dari generasi ke generasi, maka meskipun unsur *ke-Tionghoa-an* yang dibawa dari Tiongkok masih ada, namun akan sulit untuk didefinisikan karena identitas yang dimiliki oleh etnis Tionghoa pada saat ini bukanlah identitas seperti halnya dengan di Tiongkok.

Berangkat dari beberapa kajian terdahulu yang dilakukan oleh Wang Gungwu tentang identitas etnis Tionghoa di Asia Tenggara, maka diketahui bahwa pada dasarnya orang Tionghoa tidak memiliki konsep tentang identitas, kecuali tentang konsep *ke-Tionghoa-an*. Konsep *ke-Tionghoa-an* berkonotasi Tionghoa dan bukan Tionghoa.¹ Selanjutnya hasil kajian Wang menunjukkan bahwa etnis Tionghoa di Asia Tenggara memiliki banyak identitas disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya tempat tinggal, daerah asal, dialek bahasa yang digunakan, asal usul marga, pekerjaan, dan identitas lainnya yang terkadang dimiliki secara bersamaan yang dinamakan dengan identitas ganda.

Berangkat dari hasil kajian Wang Gungwu, maka bab ini akan membahas tentang beberapa identitas yang dominan dalam mempengaruhi etnis Tionghoa Padang pada periode Pemerintah Hindia Belanda. Periode Perintah Hindia Belanda menjadi penting mengingat pada masa ini banyak etnis Tionghoa yang datang sebagai migran pertama dan berperan dalam merintis serta membentuk komunitas Tionghoa Padang. Periode ini merupakan dasar pembentuk karakteristk

¹ Jennifer Cusgman & Wang Gungwu, *Perubahan Identitas Orang Cina Di Asia Tenggara*, Jakarta : Grafiti, 1991, hal. 1-2.

etnis Tionghoa yang masih berorientasi ke Tiongkok. Migran Tionghoa yang masih berorientasi ke Tiongkok akan menghasilkan identitas historis dengan penekanan pada nilai-nilai keluarga, asal usul marga di perantauan, loyalitas sub etnis, simbol-simbol yang akan *menopang ke Tionghoa-an* mereka di perantauan.² Bagaimana etnis Tionghoa menopang *ke-Tionghoa-annya* akan dikaji melalui identitas budaya yang diwariskan melalui warisan biologis dengan fokus perhatian terhadap nilai-nilai yang dikembangkan oleh setiap kelompok sub etnis. Kedua identitas ini dominan mempengaruhi pembentukan karakteristik etnis Tionghoa Padang di tengah dominasi etnis dan budaya Minangkabau.

Selanjutnya akibat pengaruh gejolak politik Tiongkok yang berdampak pada pecahnya Revolusi Tiongkok 1911 melahirkan identitas nasional di kalangan etnis Tionghoa Padang. Identitas nasional berkembang akibat politik Pemerintah Hindia Belanda yang memberikan ruang kepada etnis Tionghoa agar tetap menjadi Tionghoa (kelompok Timur asing) dalam struktur masyarakat kolonial. Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda ini memberi peluang kepada Tiongkok dalam mempengaruhi orientasi politik etnis Tionghoa di Indonesia, termasuk etnis Tionghoa Padang.

A. Identitas Historis

Tionghoa perantauan di manapun berada pada hakikatnya mewarisi peradaban leluhur yang dikembangkan saat mereka melakukan migrasi keluar dari Daratan Tiongkok. Kebudayaan leluhur menjadi identitas bagi etnis Tionghoa yang bermigrasi keluar dari Daratan Tiongkok bukanlah kelompok yang homogen, melainkan kelompok yang heterogen dengan berbagai perbedaannya. Pluralitas dalam berbagai hal dimulai dari marga-marga sebagai asal usul genetik hingga perbedaan budaya, bahasa, orientasi politik, dan perbedaan lainnya ternyata tidak menghilangkan sikap etnis Tionghoa dalam menghargai leluhur terutama dalam menumbuhkan kesadaran akan identitas historis.³ Pewarisan identitas *ke-tionghoa-an* dilakukan dengan penanaman nilai-nilai leluhur dan

² Jennifer Cushman & Wang Gungwu, *Ibid.*, hal. 2-3.

³ Charles A. Coppel, *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hal 31.

penggunaan simbol-simbol keyakinan dalam kehidupan di perantauan.⁴ Identitas historis dipertahankan melalui memori kolektif yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Melalui memori kolektif, budaya masa lalu dipertahankan di tengah tantangan, meskipun terkadang juga terjadi pembelokan-pembelokan.⁵

Tionghoa perantauan (*Hoakiao/Chinese Overseas*) adalah orang-orang berdarah Tionghoa yang tinggal di luar daratan Tiongkok. Tionghoa perantauan terbentuk karena terjadi proses migrasi penduduk keluar dari daratan Tiongkok. Proses migrasi Tionghoa perantauan sudah berlangsung lama. Victor Purcell membagi fase kedatangan migran Tionghoa ke Indonesia atas tiga fase seperti yang telah diuraikan pada bab 3.⁶ Berdasarkan kepada fase kedatangan, maka etnis Tionghoa yang ada di Indonesia kemudian dibagi atas dua kelompok. Kelompok pertama merupakan Tionghoa peranakan, yaitu keturunan campuran antara Tionghoa perantauan dengan penduduk setempat. Kelompok ini merupakan keturunan dari orang-orang Tionghoa yang datang pada fase kedatangan pertama dan kedua. Selanjutnya kelompok kedua dinamakan dengan kelompok Tionghoa totok, yaitu orang-orang Tionghoa dan keturunan yang datang pada fase ketiga saat Pemerintah Hindia Belanda mendatangkan tenaga kerja (buruh untuk pertambangan dan perkebunan) serta orang-orang Tionghoa yang datang secara mandiri.

Kelompok Tionghoa peranakan dan Tionghoa totok memiliki perbedaan dari waktu kedatangan, aspek budaya dan bahasa yang digunakan. Meskipun mereka sama-sama mengembangkan kebudayaan leluhur, namun implementasi di

⁴ Bahkan, Pemerintah Hindia Belanda juga mendukung tentang usaha mereka untuk tetap mempertahankan ke-Tionghoan mereka dan tetap memainkan peran ekonomi. Lebih jauh lihat Jeniffer Cushman dan Wang Gungwu, *Perubahan Identitas Orang Cina di Asia Tenggara*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991, hal 3.

⁵ Pembelokan yang dimaksud adalah kebudayaan yang pelaksanaan memiliki fungsi yang sama, namun agak berbeda dari segi praktiknya. Hal itu dilakukan agar pewarisan budaya lebih mudah dilaksanakan. Contoh sederhana, tidak mungkin melakukan sebuah pesta dengan memasak daging babi, padahal masyarakat yang akan hadir juga ada yang muslim, dan memakan babi itu dilarang untuk mereka. Maka pembelokan yang harus dilakukan adalah menyediakan makanan lain agar sama-sama bisa menikmati pesta, meskipun semuanya tetap dalam suasana ke-Tionghoan. *Ibid.*, hal 7

⁶ Nio Joe Lan, *Peradaban Tionghoa Selayang Pandang*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013, hlm. 24; Mona Lohanda, *The Kapitan Cina of Batavia 1837-1942*, Jakarta: Djambatan, 1994, hlm. 11; Andjarwati Noordjanah, *Komunitas Tionghoa di Surabaya (1910-1946)*, Semarang: Mesiass, 2004, hlm. 41.

perantauan berbeda. Kelompok Tionghoa peranakan sudah tidak bisa lagi berbahasa daerah asal di Tiongkok, namun dalam praktik kehidupan sehari-hari mereka masih melaksanakan kebudayaan leluhur yang diwarisi secara turun temurun. Identitas sebagai etnis Tionghoa tidak bisa dihilangkan begitu saja, baik dari ciri-ciri fisik, kebudayaan yang dikembangkan serta simbol-simbol yang masih dipelihara tidak membedakan antara etnis Tionghoa peranakan dengan Tionghoa totok. Latar belakang kesamaan berasal dari daratan Tiongkok menjadi memori yang menyatukan kedua kelompok ini dengan berbagai perbedaannya. Selain kesamaan memori berasal dari Daratan Tiongkok, kedua kelompok ini juga disatukan melalui tradisi berkumpul dan bekerjasama yang dilestarikan hingga ke daerah perantauan.

Dalam sejarah Tiongkok, berkumpul dan bekerjasama sudah menjadi tradisi yang dikenal dengan istilah "*serikat (hui)* dan *bekerjasama (kongsi)*". Secara harfiah, *serikat (hui)* berarti bersatu, berkumpul atau bersama-sama mengusahakan sesuatu. Dalam sejarah Tiongkok, tradisi berserikat muncul sebagai bentuk perlawanan masyarakat Tiongkok dalam menentang dominasi asing. Serikat-serikat yang berdiri sejak abad ke-19 umumnya merupakan kelompok pejuang dalam melawan kekuasaan Dinasti Manchu. Mereka mengobarkan semangat anti Ch'ing dan ingin mengembalikan kejayaan Ming dengan semboyan "*Fan Qing Fu Ming*" yang artinya "*membangkitkan kembali Ming dan menggulingkan Qing*". Keberadaan serikat-serikat ini menimbulkan respon positif untuk menggerakkan nasionalisme Tiongkok yang dipelopori oleh kelompok intelektual baru hasil dari pendidikan Barat.⁷

Selanjutnya J.L. Vleming J.r mengatakan bahwa kongsi adalah organisasi modal usaha bagi etnis Tionghoa. Kongsi merupakan penggabungan dari kata *kong* yang berarti usaha dan *si* yang berarti pengelolaan. Dari arti kata ini diketahui bahwa kongsi merupakan pengelolaan hak milik bersama yang disertai dengan modal untuk memulai atau mengembangkan sebuah usaha.⁸

⁷ Leon Comber, *Chinese Secret Societies in Malaya: A Survey of The Triad Society from 1800-1900*, Singapore: Singapore Heritage Society, 1959, hlm. 9.

⁸ Kelompok nasionalis bersama partai Kuomintang sukses mendirikan Pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 1 Januari 1912. J.L. Vleming, *Kongsi dan Spekulasi*:

Di daerah perantauan, sulit membedakan definisi antara serikat dengan kongsi karena etnis Tionghoa cenderung menyatukan aktivitas berserikat dan berkongsi dalam kehidupan mereka. Di Padang juga sudah terbentuk beberapa kongsi. Kongsi-kongsi tersebut didirikan sesuai dengan kebutuhan anggotanya dan bersifat tertutup bagi yang bukan anggotanya. Data pendirian kongsi-kongsi yang ada di Padang sulit dilacak karena tidak ditemukan data yang mendukung. Hal ini disebabkan karena kongsi-kongsi tersebut tidak terdaftar secara resmi di administrasi pemerintahan Hindia Belanda. Kongsi-kongsi tersebut memiliki peran yang penting bagi eksistensi etnis Tionghoa Padang dalam berbagai aspek kehidupan, terutama sebagai wadah tempat para imigran yang baru datang mendapatkan bantuan dan kerjasama ekonomi. Sebagai sebuah tradisi, munculnya kongsi-kongsi dalam bidang ekonomi ini memberi banyak keuntungan bagi etnis Tionghoa yang ingin mengembangkan usahanya. Kongsi tersebut dibentuk dalam berbagai rupa, baik secara terang-terangan maupun rahasia.

Pada tahun 1851, Pemerintah Hindia Belanda sebetulnya sudah melarang kongsi yang dibentuk secara rahasia. Aturan ini kemudian dipertegas setelah kongsi dinilai berbahaya pasca perang kongsi (Malaka dan Singapura) tahun 1854 dan ketika polisi Hindia Belanda pada tahun 1863 menemukan buku yang menginformasikan tentang adanya serikat rahasia di Padang. Buku tersebut berisikan anggaran dasar, hukum, sumpah, misteri inisiasi, katekisme (*catechism*), bendera (*flags description*), serta simbol-simbol rahasia di rumah seorang Tionghoa yang semula dicurigai sebagai maling. Saat dilakukan penggeledahan, polisi malah menemukan catatan tentang daftar 200 anggota serikat rahasia yang ada di Padang.⁹ Penemuan atribut dan simbol-simbol serikat rahasia tersebut menunjukkan bahwa anggota serikat rahasia telah menyebar

Jaringan Bisnis Cina, Jakarta: Pustaka Utama, 1988, hlm. 59-62; Nasrul Hamdan, *Komunitas Cina di Medan: Dalam Lintasan Tiga Kekuasaan 1930-1960*, LIPI Press: Jakarta, 2012, hlm.70; Mary Soomers Heidhues, *Penambang Emas, Petani, Pedagang di Distrik Tionghoa: Kalbar*, Jakarta: Nabil, 2008, hlm. 43.

⁹ Peristiwa yang sama juga ditemukan di Jepara pada tahun 1851. Saat menggeledah rumah seorang Tionghoa di Jepara, polisi menemukan sebuah buku yang penuh dengan tulisan atau gambar serta berisi UU atau Anggaran Dasar organisasi dari cabang Shantung. Lihat lebih lanjut Schlegel Gustave, *Thian Ti Hwui. The Hung Leagueoe, Heaven-Earth League: A Secret Society With The Chinese in China and India*, Batavia: Lange & Co, 1866, hlm. 5.

hingga ke berbagai tempat, termasuk di Padang. Seperti apa bentuk serikat rahasia tersebut tidak diketahui secara mendalam.

Saat kongsi dinilai sebagai organisasi yang membahayakan, maka untuk mengontrol kongsi-kongsi etnis Tionghoa yang semula ilegal kemudian pemerintah Hindia Belanda melakukan pendataan dan mentransformasi kongsi-kongsi tersebut menjadi perkumpulan yang resmi. Kemudian pada tahun 1895, serikat dan kongsi ditransformasi menjadi perkumpulan resmi yang bergerak dibidang sosial, budaya dan pemakaman. Seluruh perkumpulan wajib untuk melapor dan mendaftar sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1941 diketahui ada 16 perkumpulan etnis Tionghoa yang ada di Padang, namun tidak diketahui nama dan identitasnya secara jelas.¹⁰

Dalam menjalankan perannya sebagai tempat berkumpul dan bekerjasama, perkumpulan etnis Tionghoa Padang kemudian memiliki peran penting dalam melestarikan tradisi dan budaya leluhur. Memori kolektif menjadi media dalam pelestarian tradisi dan budaya leluhur tersebut, karena melalui memori kolektif tradisi dan budaya leluhur diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun tradisi dan kebudayaan Tiongkok masih menjadi identitas bagi etnis Tionghoa di perantauan, namun perwujudannya dalam bentuk identitas historis pada pelaksanaannya belum tentu sama dengan tradisi dan budaya yang berlaku di Tiongkok. Nilai-nilai tradisi dan budaya Tiongkok yang menjadi identitas historis bagi etnis Tionghoa di perantauan merupakan hasil dari segregasi nilai-nilai tradisi dan budaya Tiongkok sebagai proses adaptasi etnis Tionghoa di perantauan seiring perubahan waktu.

Secara resmi perkumpulan etnis Tionghoa Padang dapat dibagi atas perkumpulan marga dan perkumpulan berdasarkan atas keyakinan terhadap leluhur yang sama. Perkumpulan berdasarkan marga atau ikatan darah adalah perkumpulan yang terbentuk atas dasar asal usul keturunan dan garis kekerabatan berdasarkan leluhur mereka di Tiongkok. Perkumpulan marga yang ada di Padang

¹⁰ Tidak semua perkumpulan Tionghoa Padang yang disebutkan di atas ditemukan sumbernya. Lihat lebih lanjut *Sumatera Bode*, 19 Desember 1941.

adalah Marga Lie-Kwee, Marga Tan, Perkumpulan Marga Huang (Oei), Marga Gho, Himpunan Keluarga Lim, Marga Ong, Marga Tjoa&Kwa dan Marga Kho (Xu). Pembentukan perkumpulan berdasarkan marga ini mulai ada di Padang sejak akhir abad ke-19. Masing-masing perkumpulan marga memiliki leluhur yang berbeda, meskipun mereka sama-sama berasal dari daratan Tiongkok. Oleh karena itu, setiap perkumpulan marga akan memiliki karakteristik pelindung dan leluhur sesuai dengan keyakinan masing-masing.¹¹

Sementara itu, keberadaan perkumpulan berdasarkan daerah asal biasanya dilihat dari dialek bahasa yang digunakan oleh penuturnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa para imigran Tionghoa yang ada di Asia Tenggara dan Hindia Belanda berasal dari daerah Hokkian, Fujian, Hakka (*Khek*), Kongfu dan Teociu.¹² Sayangnya, perkumpulan atas dasar dialek bahasa ini tidak berkembang di Kota Padang dikarenakan mayoritas etnis Tionghoa yang ada berasal dari Hokkian.

Perkumpulan marga merupakan tempat bagi orang-orang yang berasal dari satu suku (*clan*) berkumpul dan bekerjasama. Perkumpulan marga menjadi tempat tujuan pertama yang dicari oleh para imigran saat datang ke suatu tempat yang baru.¹³ Melalui perkumpulan marga, ikatan persaudaraan mereka terbina. Meskipun mereka tersebar hampir ke seluruh penjuru dunia, namun melalui perkumpulan marga tersebut ikatan kekerabatan mereka tetap terbina.

Aktivitas utama perkumpulan marga adalah membantu sesama anggota, menyelenggarakan sembahyang kepada leluhur dan dewa-dewa yang diyakini sebagai pelindung. Upacara rutin yaitu menyelenggarakan tradisi leluhur, melaksanakan upacara-upacara yang bersifat kekeluargaan seperti pesta perkawinan, upacara pemakaman secara tradisional serta menjaga hubungan

¹¹ Mary Soomers Heidhues, *op. cit.*, hlm 47; H. Ran Dewall, "Opstand der Chinezen van Monteradoe, Weskust-Borneo 1853", *Manuskrip, koleksi KITLV H.83*.

¹² Soewarsono, "Orang Cina di Bandung: Sebuah Keterputusan Sejarah", dalam Mely G. Tan (ed), *Etnisitas dan Konflik Sosial*, Jakarta: PMB-LIPI, 1999, hlm. 40-41.

¹³ Yerry Wirawan, *Sejarah Masyarakat Tionghoa Makassar Dari Abad ke 17 Hingga Ke-20*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013, hlm 115-116.

dengan sesama anggota, dengan sesama etnis Tionghoa dan dengan masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari registrasi anggota perkumpulan sosial dan budaya diketahui bahwa etnis Tionghoa Padang berasal lebih dari seratus marga. Data ini menunjukkan bahwa pada dasarnya etnis Tionghoa Padang adalah komunitas yang heterogen. Heterogenitas etnis Tionghoa Padang terlihat dari keberagaman marga dengan perkumpulan serta budaya dan adat istiadat. Setiap marga memiliki ciri khas tersendiri yang diwujudkan melalui simbol-simbol, legenda dan leluhur. Dari seratus lebih marga etnis Tionghoa tersebut yang memiliki perkumpulan ada delapan marga, yaitu Marga Lie-Kwee, Himpunan Keluarga Tan, Perkumpulan Marga Huang (Oei), Himpunan Keluarga Lim, Marga Gho, Marga Ong, Marga Tjoa & Kwa serta Marga Kho (Xu).

B. Identitas Budaya

Identitas merupakan jati diri yang dimiliki seseorang sejak lahir hingga melalui proses kehidupan sampai membentuk diri, sedangkan budaya merupakan cara hidup yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jika identitas dan budaya digabungkan menjadi identitas budaya maka akan memiliki pengertian sebagai suatu karakter khusus dalam sebuah kebudayaan dan menjadi pembeda antara kebudayaan satu dengan kebudayaan lainnya.

Banyak faktor yang membentuk identitas budaya, diantaranya adalah kepercayaan, rasa aman, dan pola perilaku. Selain ketiga faktor di atas, identitas budaya dipengaruhi oleh proses asimilasi dan akulturasi dalam ruang dan waktu dimana budaya tersebut berkembang. Proses pembentukan identitas budaya dapat berlangsung secara tidak sengaja, melalui pencarian, diperoleh, resistensi, separatisme dan integrasi.

Meskipun etnis Tionghoa merupakan perantau dari Daratan Tiongkok, namun etnis Tionghoa bukanlah suatu komunitas yang homogen sebagaimana yang dipahami secara umum selama ini. Etnis Tionghoa merupakan etnis yang heterogen dengan beberapa subkelompok berdasarkan dialek, wilayah domisili,

asal usul nenek moyang, adat istiadat, karakteristik, dan nilai-nilai luhur masing-masing subkelompok. Berdasarkan dialek, maka etnis Tionghoa dapat dikelompokkan atas orang Tionghoa Hakka, orang Tionghoa Hokkian, orang Tionghoa Tiochiu, orang Tionghoa Kanton, orang Tionghoa Hainan dan dialek bahasa lainnya. Setiap kelompok dialek bahasa berasal dari wilayah yang berbeda-beda dengan perbedaan asal usul nenek moyang, adat istiadat yang dikembangkan, dan nilai-nilai luhur yang kemudian menjadi karakteristik dari masing-masing dialek bahasa.

Selanjutnya dari daerah domisili di perantauan, maka etnis Tionghoa di Hindia Belanda dapat dibagi menjadi orang Tionghoa Padang, Tionghoa Medan, orang Tionghoa Jawa, orang Tionghoa Kalimantan, orang Tionghoa Bangka, dan orang Tionghoa daerah lainnya. Pembagian etnis Tionghoa berdasarkan daerah domisili pada masa Pemerintah Hindia Belanda tidak menonjol karena etnis ini diposisikan sebagai kelompok Timur Asing dalam stratifikasi penduduk di Hindia Belanda. Meskipun daerah domisili ikut mempengaruhi identitas budaya etnis Tionghoa yang tinggal di suatu daerah, namun politik Pemerintah Hindia Belanda memposisikan mereka terpisah dengan sistem dan aturan tersendiri.

Identitas budaya etnis Tionghoa lebih mendalam akan dibahas melalui asal usul berdasarkan garis keturunan. Marga (*She*) atau nama keluarga adalah penanda identitas dari keluarga mana seorang Tionghoa berasal. Sebagai sebuah penanda, marga menjadi identitas genetik dalam silsilah keturunan seorang Tionghoa. Oleh karena itu, nama marga menjadi penting untuk dicantumkan pada sebuah nama. Jika nama marga dalam kebudayaan Barat berada di belakang nama kecil, sebaliknya bagi orang Tionghoa dan Asia Timur lainnya diletakkan di depan nama mereka. Marga menjadi identitas dalam masyarakat dan adat yang diturunkan dari ayah kepada anak-anaknya menurut garis keturunan *patrilineal*.¹⁴ Marga lebih sering digunakan sebagai identitas diri, sehingga dalam pergaulan sehari-hari marga sering dijadikan sebagai nama panggilan.

Setiap marga akan mendirikan perkumpulan sebagai wadah yang menunjukkan perbedaan karakteristik di antara masing-masing marga. Setiap

14

marga akan mengembangkan kebudayaan tersendiri sehingga kebudayaan yang dilaksanakan menjadi penciri dan identitas marga tersebut. Agar kebudayaan dapat dilestarikan kemudian marga-marga yang memiliki jumlah anggotanya lebih banyak akan membentuk perkumpulan.

Dalam sebuah perkumpulan marga, terdapat sejumlah aktivitas penting yang dilakukan secara rutin. Pada hari pertama perayaan tahun baru Imlek (*Cue-it*) maka setiap anggota perkumpulan marga melakukan upacara sembahyang di Klenteng, rumah perkumpulan sosial budaya kematian, *Heng Beng Tong* (HBT) dan *Hok Tek Tong* (HTT) dan di rumah marga. Upacara Sembahyang juga dilakukan pada hari ke lima belas penanggalan Imlek (*Cap Go*). Perayaan ini merupakan ritual akhir tahun dari penanggalan Imlek. Perayaan ini disertai dengan kemeriahan parade Barongsai dari perkumpulan HBT dan HTT Padang. Perayaan-perayaan yang menampilkan kemeriahan atraksi budaya juga terjadi saat perayaan hari-hari besar lainnya.

Selain berbagai acara perayaan, perkumpulan marga juga biasa menyelenggarakan rapat rutin anggota yang dilakukan setiap satu bulan sekali atau sesuai kebutuhan anggota. Agenda rutin lainnya dari perkumpulan marga yaitu dalam rangka penerimaan dan pelantikan anggota baru, makan bersama (*Ciak Ciu*) juga menjadi agenda penting dari perkumpulan marga. Salah satu acara makan bersama yang penting bagi anggota perkumpulan marga disebut Ciak Ciu. Ciak Ciu biasa dilakukan pada waktu ulang tahun leluhur, Tahun Baru Imlek, dan acara khusus perkumpulan marga lainnya. Sementara itu, untuk menggalang solidaritas antar perkumpulan marga maka secara bergilir diadakan pertemuan di masing-masing rumah marga yang ada di Padang. Agenda penting lainnya yang juga diagendakan perkumpulan marga berupa kegiatan-kegiatan sosial bagi sesama etnis Tionghoa dan masyarakat lainnya.¹⁵

Jika dilihat dari asal usul nenek moyang atau yang umumnya dikenal dengan marga, maka etnis Tionghoa Padang dapat dibagi menjadi etnis Tionghoa

¹⁵ Pada dasarnya kegiatan rutin dilakukan oleh perkumpulan marga. Hal ini juga berkaitan erat dengan sistem patrimonial yang berlaku dalam masyarakat Tionghoa, yaitu anak laki-laki sebagai penerus marga. Lihat lebih lanjut Pax Benedanto, *Kesusastraan Melayu dan Kebangsaan Indonesia, Jilid 10*, Jakarta: KGP, 2007, hlm. 52.

marga Lee/Lie, marga Gouw/Goh, marga Kang/Kong, marga Oey/Ng/Oei, marga Ong, marga Tan, marga Lim, marga Kho, dan marga lainnya.¹⁶ Setiap marga memiliki nenek moyang dan mengembangkan kebudayaan tersendiri yang menjadi pembeda dengan etnis Tionghoa yang berasal dari marga lainnya.

Marga Lie (*Lee*) adalah marga yang paling banyak anggotanya dan tersebar hampir di seluruh penjuru dunia. Perkumpulan Marga Lie (*Long Se Tong*) berdiri pada tahun 1878.¹⁷ Marga Lie bergabung dengan Marga Kwee sehingga di Padang dikenal dengan nama Marga Lie-Kwee. Penggabungan Marga Lie dan Kwee disebabkan karena nenek moyang kedua marga ini sama-sama berasal dari Hokkian, Kampung Leng Tiam.¹⁸ Pada tahun 1909 beberapa orang tokoh Marga Lie yang terdiri dari Lie Lian Seng, Lie Sim Tjoan dan Lie Pang Ko secara resmi mengajukan akte pendirian Long Se Tong kepada Pemerintah Hindia Belanda. Atas persetujuan sekretaris Gubernur Jenderal Hindia Belanda de Graeff, maka pada tanggal 21 September 1909 Perkumpulan *Long Se Tong* resmi berdiri dengan presiden pertamanya Lie Lian Seng.¹⁹ Berikut adalah meja leluhur keluarga Lie & Kwee.



Gambar 18. Meja Sembahyang Leluhur Keluarga Lie – Kwee
Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti

¹⁶ Padang Ekspres, tanggal 8 Februari 2009.

¹⁷ Register der Besluiten Guverneur General Hindia Belanda tanggal 21 September 1909 menyatakan bahwa pendirian Long Se Tong telah dilakukan sejak dua puluh sembilan tahun, sebelas bulan yang lalu.

¹⁸ Marga Lie dan Kwee, *Wawancara*, 21 Agustus 2017.

¹⁹ *Besluit* no. 38 tanggal 21 September 1909.

Berdasarkan *Reglement Ketjil Long Se Tong* diketahui bahwa yang menjadi anggotanya adalah orang Tionghoa yang bermarga Lie, harus memiliki kelakuan baik dan mendaftarkan diri dengan memberitahukan nama, umur, pekerjaan, dan tempat tinggal, membayar uang masuk sebanyak f.12 serta mengikuti aturan yang tertuang di dalam *Reglement Ketjil Long Se Tong*.²⁰ Leluhur yang disembahyangkan oleh Marga Lie adalah *Lie Tjeng, Ta Tek Tjeng Se, Ho Tek Tjeng Sin dan Kwan Tee Kong (Koan te Koan)* sedangkan Marga Kwee melakukan sembahyang kepada *Ta Tek Tjeng Se*.²¹ Meskipun kedua marga ini memiliki leluhur yang berbeda, namun seluruh leluhur yang disembahyangkan berada pada satu altar di bagian tertinggi gedung perkumpulan Marga Lie & Kwee.

Himpunan Keluarga Tan (*Chen*) berasal dari Negeri Tan di Provinsi Holam, Kabupaten Huai Yang, sekarang bernama Tan Chou. Negeri Tan merupakan hadiah dari Raja Tjiu Bu kepada Raja Sun (keturunan Chong Hoa) yang telah berjasa terhadap Negara. Keturunan Chong Hoa kemudian berhasil menumpas kejahatan dan membangun kerajaan yang makmur dan maju. Puncak kejayaan Kerajaan Tang dicapai saat Tan Goan Kong menjadi panglima perang (meninggal di Kuil Ta Cieh di Kota Sui An Si). Atas jasa-jasanya tersebut Tan Goan Kong mendapat anugerah anumerta dengan gelar kehormatan Kai Tjiang Seng Ong. Sejak saat itu, setiap musim semi pada tanggal 10 Februari (Jie Gwee Cap Go) yang merupakan tanggal dan bulan kelahiran Tan Goan Kong dirayakan dengan meriah. Kebesaran Tan Goan Kong menjadi harum dalam lembaran sejarah dan menjadi leluhur bagi keturunan Himpunan Keluarga Tan dimanapun berada, termasuk keturunan Tan yang ada di Padang.

Untuk menggalang kerjasama dan persaudaraan di antara etnis Tionghoa yang berasal dari Himpunan Keluarga Tan, maka pada tanggal 22 Maret 1888 bertempat di rumah Cinang Tan Siang di Muara Padang disepakati untuk mendirikan Himpunan Keluarga Tan. Meskipun telah berdiri sejak tahun 1888,

²⁰ *Statuten dan Huishoudelijk Reglement (Reglement Ketjil) dari Vereeniging Long Se Tong Padang, De Volharding Padang, 1932.*

²¹ Marga Lie & Kweek, *Wawancara*, 21 Agustus 2017.

namun Himpunan Keluarga Tan baru diresmikan oleh Seri Paduka Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Cipanas berdasarkan surat tertanggal 26 Agustus 1918.²² Untuk membantu kegiatan perkumpulan, Himpunan Keluarga Tan yang berkedudukan di Jl. Klenteng II no. 327 membentuk Wanita Himpunan Keluarga Tan (*Tan Ko So Ci Mei Hwee*).²³

Himpunan Keluarga Tan didirikan dengan tujuan untuk menggalang dan menghimpun orang Tionghoa dari Marga Tan yang tinggal di Padang dan kota-kota lainnya di pedalaman Sumatera Barat. Kegiatan utama perkumpulan Keluarga Tan adalah aktivitas sosial dan kemanusiaan yang bersifat gotong-royong, memberikan bantuan pelayanan baik jasmani maupun rohani kepada sesama anggota yang mengalami kesusahan, kematian, pemakaman/perabuan. Jumlah anggota Himpunan Keluarga Marga Tan di Padang yang masih aktif sampai sekarang lebih kurang 325 orang laki-laki. Sebagian anggota Himpunan Keluarga Tan ada yang berdomisili di luar Padang (Payakumbuh, Bukittinggi, Padang Panjang) yaitu sekitar 50 orang.

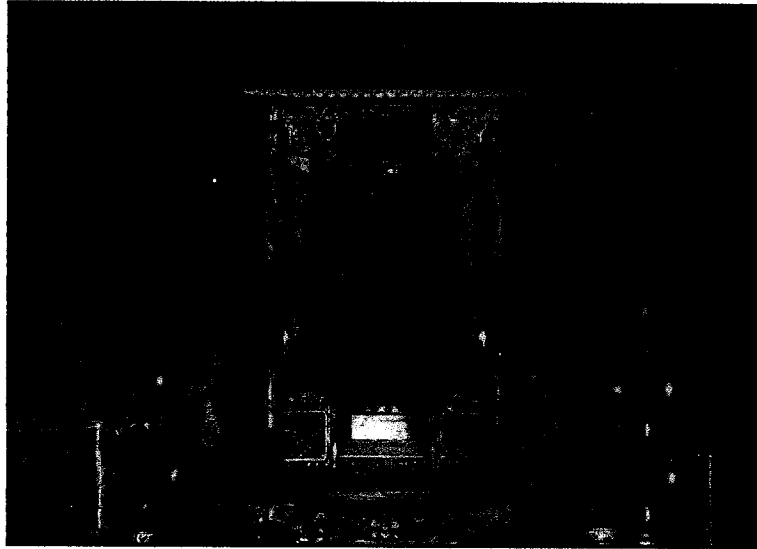
Perkumpulan marga Tan termasuk salah satu perkumpulan marga yang memiliki respon tinggi terhadap persoalan-persoalan anggotanya. Saat anggota terkena musibah sudah menjadi tanggungjawab perkumpulan untuk memberikan bantuan kepada anggota tersebut. Anggota biasanya diberi pertolongan saat mengalami kemalangan atau kesusahan karena kematian anggota yang bersangkutan, istri, dan orang tua kandung. Perkumpulan memberikan bantuan berupa pinjaman peralatan atau barang lain yang dimiliki perkumpulan dalam jangka waktu tertentu selama proses pemakaman/perabuan.

Sebagai sebuah perkumpulan marga, Himpunan Marga Tan mengadakan upacara-upacara sembahyang besar dua kali dalam setahun, yaitu *She Jiet Tjo Ong* pada *Jie Gwee Cap Go* dan *Tang Tjiek* (*hari onde dan sembahyang kepada leluhur*) yang ditetapkan setiap tanggal 22 Desember. Selain itu, upacara sembahyang rutin juga dilakukan dua kali dalam sebulan, yaitu setiap *Ce It* (*bulan*

²² *Besluit* no 2 tanggal 26 Agustus 1918.

²³ Sama halnya dengan perkumpulan lainnya, Himpunan Keluarga Tan juga terdiri dari para kaum laki-laki yang telah berumur di atas 17 tahun. Lihat lebih lanjut *Buku Kenangan 120 Tahun Himpunan Keluarga Tan Padang*, Padang 29 Maret 2008.

1) dan *Cap Go* (bulan 5). Setiap tanggal 13 Maret, mereka merayakan *She Jit Tjo Ong* (Ulang tahun Tan Goan Kong) pada tanggal 13 Maret.²⁴ Berikut adalah gambar meja sembahyang Keluarga Tan, Lihat gambar 19



Gambar 19. Meja Sembahyang Leluhur Himpunan Keluarga Tan
Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti

Perkumpulan Marga Huang sering disebut juga dengan *Ng, Oei, Wong/ Huang (Kang Ha Tong)*. Perkumpulan marga Huang diresmikan secara resmi pada tahun 1924. Perkumpulan Marga Huang melakukan penghormatan kepada *Koan Te Koen* dan leluhur *Laoco Oei Hoi Ho*. Secara rutin setiap tahun Perkumpulan Marga Huang melakukan sembahyang sebagai peringatan perayaan ulang tahun *Laoco Oei Hoi Ho* bulan 3 hari ke 28 setiap penanggalan Imlek. Selanjutnya, Perkumpulan Marga Huang juga secara rutin melakukan sembahyang *Ce-it* dan *Cap Go* pada penanggalan Imlek dan melakukan sembahyang hari *Tong Cup Pia (Kue Pia)*. Secara rutin Perkumpulan Marga Huang juga melakukan sembahyang kepada Tuhan dan menyelenggarakan upacara-upacara yang sama dengan perkumpulan marga lainnya.

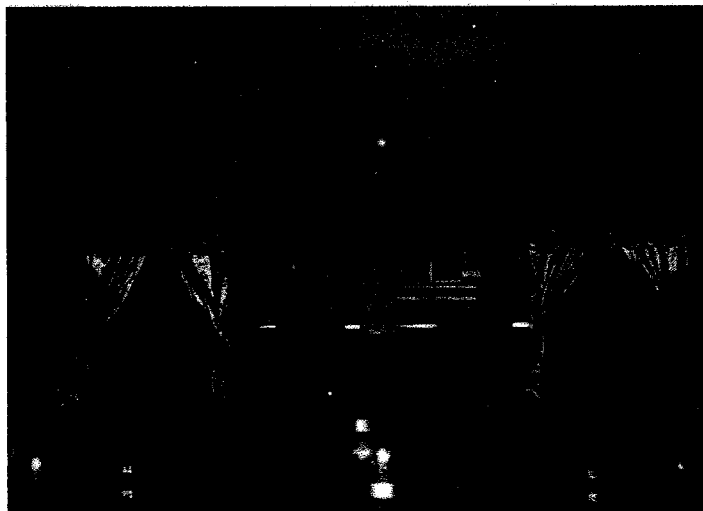
²⁴ *Buku Kenangan 120 Tahun Himpunan Keluarga Tan Padang*, Padang 29 Maret 2008.

Anggota Perkumpulan Marga Huang adalah laki-laki dan wanita yang berasal dari Marga Huang yang mendaftar ke perkumpulan. Setiap anggota Perkumpulan Marga Huang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Anggota Perkumpulan Marga Huang yang perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk dipilih menjadi pengurus harian. Selanjutnya, anggota Perkumpulan Marga Huang yang wanita juga bergabung dengan Wanita Perkumpulan Marga Huang dan menjalankan aktivitas sebagai institusi khusus bagi kaum wanita. Wanita Perkumpulan Marga Huang hanya beranggotakan para wanita yang memiliki Marga Huang.

Dalam perkumpulan, masing-masing anggota memiliki kewajiban seperti membayar iuran anggota atau dalam istilah mereka disebut iuran kongsi. Bagi anggota yang mendapatkan *pek toa* wajib untuk hadir pada acara pemakaman. Selain itu, anggota juga wajib memenuhi panggilan/ menghadiri acara saat mendapatkan *ang toa*.

Perkumpulan Marga Huang beralamat di Jl. Klenteng no 270 Padang. Perkumpulan Marga Huang telah berdiri di 24 kota di Indonesia. Masing-masing perkumpulan Marga Huang mengikuti pertemuan, baik tingkat Nasional maupun Internasional. Pertemuan dikoordinir langsung oleh Forum Komunikasi Keluarga Besar Perkumpulan Marga Huang yang berpusat di Jakarta. Pertemuan diselenggarakan setiap tahun secara bergantian di berbagai Negara.²⁵ Kegiatan berupa Kongres Nasional dan Internasional, istri dari anggota perkumpulan Marga Huang yang laki-laki atau yang biasa disebut dengan *cinang* diizinkan untuk menghadiri meskipun sebagai pendengar. Sebaliknya jika yang menjadi anggota Perkumpulan Marga Huang adalah wanita, maka suami mereka tidak diperbolehkan untuk mengikuti kongres. Berikut adalah gambar meja leluhur Marga Huang. Lihat gambar 20.

²⁵Perkumpulan Marga Huang Padang telah mengikuti kongres tingkat Internasional sejak tahun 2008 di Singapura, tahun 2009 di Tiongkok, tahun 2010 di Filipina, 2012 di Thailand, tahun 2013 di Serawak (Malaysia), dan tahun 2014 di Medan (Indonesia).

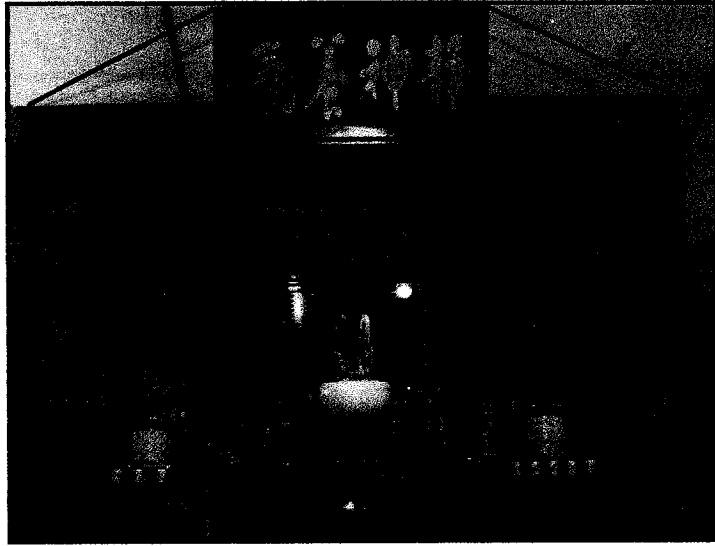


Gambar 20. Meja Sembahyang Leluhur Keluarga Oei/Huang
Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti

Selanjutnya adalah Marga Tjoa. Marga Tjoa atau yang dikenal dengan nama *Tjee Jang Tong (She Tjoa)* didirikan di Padang pada tanggal 3 September 1931. Pendirian perkumpulan ini bertujuan untuk memajukan pergaulan diantara Bangsa Tionghoa (*She Tjoa*), memberikan bantuan jika ada yang mengadakan pesta pernikahan, memberikan bantuan kepada yang mendapatkan musibah ataupun kesusahan yakni sakit, kematian dan menguburkan jenazah anggota dengan sepatutnya sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu, juga dilakukan sedekah dan sembahyang agama serta arak-arakan yang berhubungan dengan penghormatan untuk orang yang telah meninggal.²⁶

Pada tahun 1931, perkumpulan ini sudah membentuk struktur kepengurusan dengan *President* pertama yang bernama Tjoa Ka Tjoan dan *Vice-President* Tjoa Tjeng Gie. Syarat untuk menjadi anggota dari perkumpulan ini yaitu harus sudah berumur 16 tahun, mengajukan surat permohonan menjadi anggota juga diwajibkan membicarakannya dengan pengurus dari perkumpulan Tjoa. Calon anggota juga diwajibkan membayar uang masuk sebanyak f.12 serta menerima surat keterangan sudah menjadi anggota (*Bewijs van Lidmaatschap*). Berikut adalah gambar 21 meja leluhur Tjoa.

²⁶ Statuten dari Vereeniging Tjee Jang Tong Padang tahun 1930.

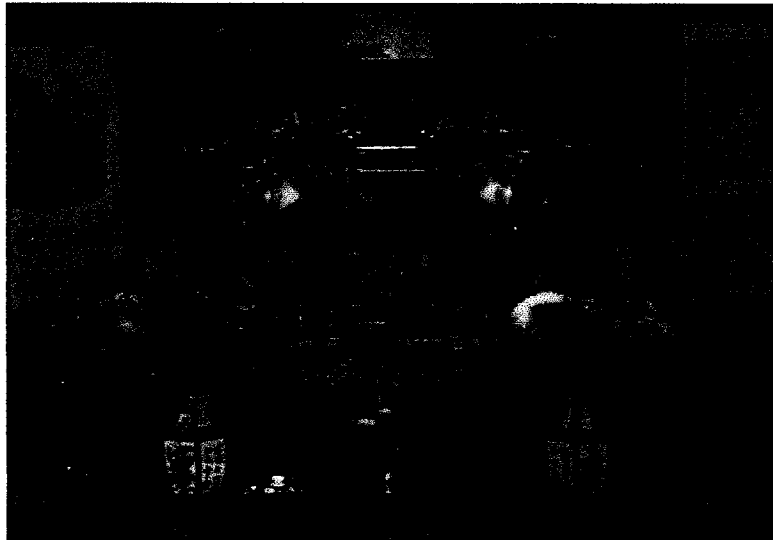


Gambar 21. Meja Sembahyang Leluhur Keluarga Tjoa
Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti

Marga Ong (marga Wang dalam bahasa Mandarin) adalah marga terbesar di daratan Tiongkok menduduki urutan keenam di Taiwan. Kata Ong atau Wang memiliki arti Raja. Keturunan Marga Ong (Wang) meyakini dari generasi ke generasi kalau mereka berasal dari keluarga kerajaan yang mendapat anugerah pada masa Dinasti Xia. Sebagai marga yang melakukan sembahyang kepada leluhur Ong Shien Tie, diyakini bahwa leluhur orang-orang yang bermarga Ong adalah keturunan Raja dari Thai Kuan (Tiongkok). Bagaimana Sejarah perkumpulan Marga Ong di Padang tidak diketahui secara rinci, namun dari sumber yang perlu ditelusuri lebih lanjut diketahui bahwa Marga Ong pertama kali dibentuk oleh seorang pedagang dari Singapura yang bernama Ong Kong Kiat. Ong Kong Kiat menjadikan rumah pribadinya sebagai tempat berkumpul bagi etnis Tionghoa yang berasal dari Marga Ong.

Perkumpulan Marga Ong Padang mulai membentuk struktur organisasi pada tahun 1983 dengan kepengurusan Tuako pertamanya Ong Seng Hwat dan Jiko Ong Tji Min. Meskipun jumlah anggota masih tergolong sedikit dibandingkan perkumpulan marga lainnya, namun perkumpulan Marga Ong juga telah memiliki organisasi wanita dengan nama Wanita Himpunan Keluarga Ong (WHKO). Wanita Himpunan Keluarga Ong didirikan pada tanggal 17 Oktober

2014 yang diketuai oleh Ong Keng Soan.²⁷ Berikut adalah gambar meja leluhur Marga Ong. Lihat gambar 22.



Gambar 22. Meja Sembahyang Leluhur Marga Ong
Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti

Himpunan Keluarga Lim/Liem (*Kioe Liong Tong*)²⁸ atau dalam bahasa Mandarin disebut Lin merupakan marga terbesar ke-2 di Taiwan dan menduduki urutan ke 17 (tujuh belas) di daratan Tiongkok. Leluhur Himpunan Keluarga Lim adalah Bi Gan yang juga merupakan paman Raja Shang Zhou Wang, sedangkan Bi Gan berasal dari Marga Zi. Bi Gan merupakan penasihat yang kharismatik dan setia kepada Raja Shang. Saat Raja Shang Zhou Wang tidak mau menerima kritikan dan masukannya dari Bi Gan, Raja Shang Zhou Wang menjadi marah dan membunuhnya. Setelah Raja Shang Zhou Wang digulingkan oleh pendiri Dinasti Zhou (Raja Zhou Wang), Putra Bi Gan yang bernama Jian kemudian dianugerahi Marga Lim.

Di Indonesia terdapat delapan Himpunan Keluarga Lim yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia, antara lain di Surabaya, Medan, Pekanbaru, Makasar, Pontianak, Batam, Semarang dan Padang. Pada dasarnya secara

²⁷ Pengurus Marga Ong, *Wawancara*, Padang 17 November 2017.

²⁸ *Kioe* artinya Naga, *Liong* artinya sembilan dan *Tong* artinya perkumpulan, jadi *Kioe Liong Tong* adalah perkumpulan sembilan naga.

struktural masing-masing perkumpulan bersifat independen dan tidak merupakan cabang di antaranya. Meskipun bersifat independen, akan tetapi pada waktu-waktu tertentu diadakan pertemuan antar Himpunan Keluarga Lim yang ada di Indonesia dan Himpunan Keluarga Lim sedunia.

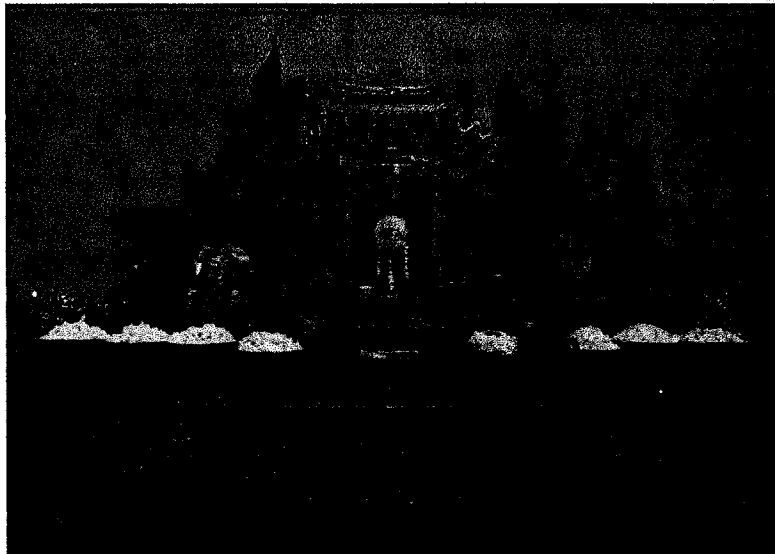
Himpunan Keluarga Lim (*Kioe Liong Tong*) Padang berdiri pada tanggal 28 Maret 1870 dengan President pertama bernama *Lim Ma Hie* dan Vice President *Lim Eng Tjiang*.²⁹ Pada mulanya sekretariat Himpunan Keluarga Lim berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Setelah pembangunan gedung tahap pertama selesai dan diresmikan pada tahun 1994, kegiatan dan sekretariat difokuskan di gedung yang terletak di Jalan Pulau Karam nomor 68 Padang.

Himpunan Keluarga Lim memiliki kebijakan yang khusus untuk anggotanya. Orang yang menjadi anggota adalah seluruh etnis Tionghoa yang memiliki garis keturunan dari Suku Lim. Hingga tahun 2013 diketahui anggota Himpunan Keluarga Lim terdiri dari 350 orang laki-laki dan 150 orang anggota perempuan.³⁰ Untuk membantu kegiatan perkumpulan, Himpunan Keluarga Lim mendirikan Wanita Himpunan Keluarga Lim (WHKL) Padang yang diresmikan pada 15 Februari 2013.

Sebagai perkumpulan marga, Himpunan Keluarga Lim Padang menjadikan Ma Tjo Po (Ma Zu) yaitu dewi laut sebagai leluhur yang dihormati sembah. Tujuan perkumpulan ini dibentuk adalah untuk membantu anggota mereka yang menghadapi musibah dan kematian serta meningkatkan rasa persaudaraan sesama anggota perkumpulan. Sejalan dengan tujuan mereka itu, perkumpulan melakukan kegiatan di bidang sosial, kesenian dan budaya. Himpunan Keluarga Lim menjadikan Ma Tjo Po (Ma Zu) yaitu Dewi Laut sebagai leluhur yang mereka hormati. Lihat lebih lanjut gambar 23.

²⁹ Statuten van de vereeniging "Kioe Liong Tong" te Padang (Sumatra's Weskust), *Javasche Courant*, No.86 tahun 1920.

³⁰ Laporan Kegiatan Himpunan Keluarga Lim (*Kioe Liong Tong*) Padang, 14 Maret 2013.



Gambar 23. Meja Sembahyang Leluhur Himpunan Keluarga Lim
Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti

Gambar di atas adalah meja sembahyang yang terdapat di Himpunan Keluarga Lim Padang. Di atas meja tersebut terdapat leluhur dan para pengawalnya yang diberi wewangian bunga melati segar. Bunga Melati ini akan diganti oleh anggota yang sedang melakukan sembahyang, ketika mereka menemukan melati tersebut sudah tidak segar lagi dan menginginkan ruang sembahyang menjadi harum. Namun demikian, ada waktu-waktu khusus dimana wewangian melati tersebut wajib diganti. Waktu-waktu tersebut adalah saat penyelenggaraan sembahyang besar pada hari ke-14 bulan pertama penanggalan Tionghoa dan pada hari ulang tahun Ma Tjo Po di hari ke-23 bulan tiga penanggalan Imlek. Kemudian saat upacara sembahyang pada hari ke-1 dan hari ke-15 setiap bulan dalam penanggalan Tionghoa.

Selain melakukan sembahyang kepada Ma Tjo Po, Himpunan Keluarga Lim juga memiliki kegiatan rutin yang diselenggarakan baik hanya untuk kalangan interen perkumpulan maupun untuk eksteren. Dalam lingkup internal Himpunan Keluarga Lim, mereka melaksanakan aktivitas seperti upacara sembahyang Cia Gwee Cap Shie (hari ke 14 bulan 1 Imlek) dan sembahyang Sha Gwee Jie Sha (Sejit Ma Tjo Po). Selain itu, ada juga penerimaan anggota baru (pada Sejit Ma Tjo Po), arisan bulanan ibu-ibu, panggilan ke rumah duka sewaktu

ada anggota/keluarga yang meninggal dan memberi penghiburan kepada anggota yang sakit. Kegiatan lainnya yang juga penting yaitu membagikan tanda kasih (Angpao) untuk sembahyang menyambut tahun baru Imlek bagi anggota yang kurang mampu. Terakhir yaitu, merayakan perarakan Dewi Pelindung Ma Tjo Po di sekitar kawasan Pecinan.³¹

Selain menyelenggarakan kegiatan khusus untuk kalangan internal anggota, Himpunan Keluarga Lim juga mengadakan kegiatan terbuka untuk umum (ekstren), seperti mengadakan kegiatan bazaar bekerjasama dengan perkumpulan lainnya dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek. Perhatian juga diberikan kepada generasi muda Tionghoa. Perkumpulan melakukan pembinaan terhadap generasi muda untuk saling menghormati suku bangsa yang berbeda melalui kegiatan budaya, kesenian dan olahraga (latihan tarian Naga dan Barongsai dan latihan senam bersama).³²

Perkumpulan marga selanjutnya yaitu Himpunan Keluarga Gho. Himpunan Keluarga Gho merupakan sepuluh marga terbesar di dunia dan dikenal dengan The Big Ten. Himpunan Keluarga Gho dikenal banyak memegang tampuk kekuasaan dan pemerintahan di berbagai negara, salah satunya Singapura. Himpunan Keluarga Gho juga terkenal sebagai orang yang pintar, paling hebat dan menepati janji dengan baik. Bahkan Kong Hu Tzu pernah memuji orang bermarga Gho dengan predikat baik. Contoh keturunan Himpunan Keluarga Gho adalah Hwang Tie dan Ibu Raja Jepang. Salah seorang Marga Gho yang pernah menjadi dokter pribadi kepercayaan Raja yang diberi gelar Ho Seng Thay Tee memiliki nama asli Gho Chin Djin. Ia merupakan keturunan ke-19 dari Gho Kui Cak, anak dari Gho Tiong Yong, anak kedua keturunan Raja yang termahsyur dan diberi gelar Lauco atau cukong atau U Ci.

Raja memiliki anak laki-laki bernama Gho Thay Pek dan Gho Tiong Yong. Keturunan Gho Tiong Yong ini menempati daerah yang dikenal dengan

³¹ Laporan Kegiatan Himpunan Keluarga Lim (*Kioe Liong Tong*) Padang, 14 Maret 2013.

³² Pengurus Himpunan Keluarga Lim, *Wawancara*, Padang 15 November 2017.

nama Yan Leng (Provinsi Jiang Xu, Tiongkok) dekat Su Chow, dan Wu Shi di dekat Shanghai. Daerah Wu Shi sendiri dibagi menjadi empat bagian yakni Kwangtung, Anchoi, Senghauw dan Mingchun.

Himpunan Keluarga Gho (*Yan Leng Tong*) Padang yang berdiri pada tanggal 14 Januari 1888 (Tahun Imlek 2439) dengan ketua pertama bernama Gho Tjong.³³ Himpunan Keluarga Gho baru diresmikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 14 Desember 1917 atau 2468 Imlek yang bertepatan dengan hari lahir Shejit Toapekongnya *Gho Kui Cak*. Selain itu Himpunan Keluarga Gho juga melakukan sembahyang kepada Ho Tek Peng Djin dan *Kuan Tek Ya (Kuan Kong)*.³⁴



Gambar 24. Meja Sembahyang Leluhur Marga Gho
Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti

³³ Marga Gho menghormati leluhur *Gho Kui Cak* dan Kuan Tek Ya (Kuan Kong). Setiap Sha Gwee Cap Go diadakan perayaan dan penyembahan kepada para Toa Pe Kong dan dewa-dewa yang disembah. Lihat lebih lanjut *Besluit* tanggal 21 Juli 1918, no. 41, bundle Algemeen Secretarie, Arsip Nasional Republik Indonesia.

³⁴ *Ibid.*

Keturunan Marga Gho juga terkenal dengan wanita-wanita yang cantik jelita di daerah asalnya Su Chow.³⁵ Perkumpulan Keluarga Gho diikuti oleh kaum pria dan wanita. Perkumpulan ini juga mendirikan perkumpulan wanita yang bernama Wanita Himpunan Keluarga Gho (WHKG) untuk para istri anggota. Kegiatan Wanita Himpunan Keluarga Gho antara lain demo masak, arisan bulanan Wanita Gho, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan wanita lainnya. Anggota Wanita Himpunan Keluarga Gho mencapai 300 orang, akan tetapi yang hadir pada pertemuan bulanan sekitar 40 orang. Penerimaan anggota baru bagi keluarga Gho berlangsung setahun sekali bertepatan dengan *She Jid Laoco* saat bulan tiga hari ke 15 (*Sha Gwee Cap Go*), sedangkan kalangan pengurus mengadakan pertemuan dua kali sebulan, pada hari pertama dan kelima belas penanggalan Imlek.

Selain perkumpulan marga dan pekerjaan, etnis Tionghoa Padang juga bergabung ke dalam perkumpulan sosial, budaya dan pemakaman yang bersifat heterogen. Perkumpulan tersebut adalah Hok Tek Tong (HTT) yang berdiri sejak tahun 1863 dengan Tuako pertama Lie Kaw Keng³⁶ dan Heng Beng Tong (HBT) yang berdiri sejak tahun 1876 dengan Tuako pertama Oei A King.³⁷

³⁵ Padang 21 April 1997 (Shangwee Capgo, 2548 Imlek), disusun oleh TN XVIII, berdasarkan kepada penuturan Lauw Tuako Gho Hun Tjeng pada pengurus dan anggota perkumpulan keluarga Gho.

³⁶ Hok Tek Tjeng Sin merupakan Toakpekong yang disembah oleh orang yang menjadi anggota Hok Tek Tong. Tua Pek Kong di zaman dahulu adalah seorang raja yang adil dan bijaksana. Lihat lebih lanjut Sejarah Hok Tek Tjeng Sin (Dewa Bumi), diterjemahkan dari terbitan bahasa Mandarin pada tahun 1866 dan Anggaran Dasar HTT yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tahun 1987. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Tjinta Teman Padang*, Padang : Pengurus Himpunan Tjinta Teman Padang, 12 Juni 1987, hlm. 3. Tokoh dan tahun kepengurusan HTT diketahui melalui foto yang ada di sekretariat HTT Padang.

³⁷ Heng Beng Tong memiliki Toakpekong Kwan Tee Koen dan dewa pelindung lainnya yang belum bisa diungkapkan. Menurut Statuta kepengurusan HBT periode 1895-1901 diketahui bahwa Tuako pertama HBT bernama Lim A King, namun setelah dilakukan perbandingan data dengan *Huishoudelijk Reglement, Heng Beng Tong*, Padang, 4 Juni 1924, *Reglement Peratoeran dari Kongtie Heng Beng Tong*, Fort de Kock 17 April 1899 dan *Besluit*, tanggal 31

Meskipun sudah berdiri sejak lama, namun secara administratif kedua perkumpulan sosial, budaya dan pemakaman ini baru resmi terdaftar sebagai perkumpulan Tionghoa di tahun 1895. Perkumpulan etnis Tionghoa mulai terstruktur secara organisatoris sejak Pemerintah Hindia Belanda melakukan penataan terhadap perkumpulan etnis Tionghoa Padang pada tahun 1894.³⁸

Perkumpulan sosial, budaya dan pemakaman Heng Beng Tong dan Hok Tek Tong memiliki keanggotaan yang terdiri dari laki-laki Tionghoa yang dipanggil *Hiati*. Syarat untuk menjadi anggota juga telah berusia minimal 16 tahun.³⁹ Pemilihan untuk menjadi anggota Heng Beng Tong atau Hok Tek Tong didasari oleh pilihan hati nurani dengan konsekuensi mengikuti aturan budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing perkumpulan yaitu penghormatan terhadap roh leluhur dan pelindung. Hal ini merupakan konsensus yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun yang telah melakukan pilihan untuk menjadi anggota perkumpulan Heng Beng Tong atau Hok Tek Tong. Jika seseorang yang sudah menjadi anggota Hok Tek Tong, maka orang tersebut tidak akan diterima oleh perkumpulan Heng Beng Tong. Begitu juga sebaliknya jika seseorang sudah menjadi anggota atau dikeluarkan dari keanggotaan Heng Beng Tong, maka orang tersebut juga tidak akan pernah diterima oleh perkumpulan Hok Tek Tong. Aturan ini berjalan sesuai dengan kesepakatan lisan antara kedua perkumpulan tersebut. Hingga saat ini aturan tersebut ditaati oleh kedua perkumpulan tersebut dan etnis Tionghoa yang tinggal di Padang. Selain di Padang, Heng Beng Tong dan Hok Tek Tong juga memiliki cabang di beberapa kota di daerah pedalaman Sumatera Barat, yaitu di Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh, bahkan sampai ke Pekanbaru dan Sibolga.

December 1895, nomor 62 diketahui bahwa President (Tuako) pertama HBT bernama Oei A King.

³⁸ *Staatsblad* no. 79 tahun 1895; *Staatsblad* no. 129 tahun 1917.

³⁹ Aturan usia untuk menjadi anggota HBT atau HTT tercantum dengan jelas dalam pasal di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HBT dan HTT. *Huishoudelijk Reglement, Heng Beng Tong*, Padang 4 Juni 1924. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Tjinta Teman*, Padang 12 Juni 1987.

Kegiatan utama dari kedua perkumpulan ini adalah pertama dalam bidang budaya, menyelenggarakan upacara sembahyang kepada leluhur atau dewa pelindung, menyelenggarakan upacara-upacara yang berhubungan dengan ritual-ritual tradisi leluhur, seperti sembahyang *Cue It Cap Go*, perayaan Tahun Baru Imlek dan makan bersama (*Ciak Ciu*). Kedua, di bidang pemakaman, yaitu menyediakan perlengkapan pemakaman dan perabuan, melaksanakan upacara penghormatan jenazah, dan menyelenggarakan prosesi pemakaman dan perabuan. Ketiga, dibidang sosial, yaitu menyelenggarakan kegiatan sosial untuk kalangan sendiri dan bakti sosial di daerah yang terkena bencana, kegiatan yang dilakukan adalah donor darah, bantuan ke panti jompo, sumbangan kebutuhan pokok, bantuan kesehatan, pengembangan pendidikan, dan sebagainya.

Hampir semua etnis Tionghoa yang tinggal di Padang menjadi anggota salah satu dari kedua perkumpulan sosial, budaya dan pemakaman. Hal tersebut disebabkan karena secara sosial dan budaya etnis Tionghoa yang tinggal di Padang telah terkondisi oleh lingkungan dan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat Padang. Faktor ekonomi terkadang juga menjadi salah satu motivasi mengapa seseorang memilih untuk menjadi anggota dari salah satu dari perkumpulan sosial, budaya dan pemakaman. Menjadi anggota suatu perkumpulan adalah suatu kebutuhan bagi etnis Tionghoa Padang. Perkumpulan menjadi sarana yang telah membudaya di kalangan etnis Tionghoa Padang. Oleh karena itu menjadi anggota salah satu dari perkumpulan sosial, budaya dan pemakaman adalah suatu pilihan yang harus diambil oleh etnis Tionghoa Padang.

Latar belakang sejarah, budaya, adat istiadat, wilayah domisili, karakteristik etnik Tionghoa ini mempengaruhi bagaimana etnik Tionghoa memposisikan dirinya dalam konteks identitas budaya. Atas dasar kesamaan latar belakang historis orang Tionghoa, dan pelbagai tindak tanduknya dalam membaur ke dalam masyarakat setempat, orang Tionghoa mampu berkembang termasuk dalam segi mempertahankan kebudayaan asalnya. Mereka tetap menjalankan aktivitas sebagai orang Tionghoa berdasarkan sistem yang mereka anut sejak awal kedatangan saat migrasi meninggalkan Daratan Tionghoa dilaksanakan.

C. Identitas Nasional

Identitas nasional adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi, golongan, kelompok, komunitas, atau bangsa. Mengacu kepada pengertian ini, maka identitas tidak terbatas pada individu semata, tetapi juga menerangkan tentang suatu kelompok. Jika identitas menerangkan kelompok yang lebih besar, maka akan terbentuk suatu komunitas. Dalam perkembangannya, komunitas yang lebih besar juga akan menerangkan tentang suatu bangsa dengan identitas Nasional. Identitas nasional akan menjadi penciri terhadap suatu bangsa dalam ruang dan waktu yang tidak terbatas.

Jika dilihat dari asal kata, maka identitas berasal dari kata *identity* yang artinya tanda-tanda, ciri-ciri, jati diri yang ada pada seseorang atau kelompok yang membedakannya dengan orang dan kelompok yang lain. Selanjutnya kata "*nasional*" adalah suatu identitas yang melekat pada kelompok atau organisasi yang lebih besar yang berkaitan oleh kesamaan-kesamaan fisik, baik itu fisik seperti budaya, agama serta bahasa ataupun nonfisik seperti contohnya cita-cita, keinginan serta tujuan. Dalam identitas budaya, mereka harus bisa pula memposisikan diri dan juga memiliki kemungkinan melakukan asimilasi serta beberapa perombakan bahkan secara lebih ekstrim, menerima identitas yang bukan bagian dari mereka untuk ikut ke dalam budaya.⁴⁰

Hakikat identitas nasional di dalam kehidupan diaktualisasikan melalui pandangan kehidupan yang dalam arti yang luas. Hal tersebut menyebabkan nilai-nilai budaya yang tercermin pada identitas nasional bukanlah barang jadi dalam kebakuan normatif dan juga dogmatis, melainkan sesuatu yang terbuka dan cenderung terus-menerus berubah karena adanya hasrat untuk kemajuan. Konsekuensi & implikasi identitas nasional adalah sesuatu yang terbuka untuk ditafsir, diberi makna dan berupaya tetap relevan serta berfungsi di dalam masyarakat.

Akhir abad ke-19 merupakan periode penting kedatangan etnis Tionghoa ke Nusantara. Banyak faktor internal di Tiongkok yang mempengaruhi terjadi

⁴⁰ Jeniffer Cushman dan Wang Gungwu, *Perubahan Identitas Orang Cina di Asia Tenggara*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991, hal 7

migrasi secara besar-besaran seperti diaspora yang terjadi akibat politik Tiongkok yang tidak berpihak kepada serikat-serikat rahasia. Serikat ini muncul akibat perjuangan bangsa Han untuk mengembalikan kejayaan leluhur di bawah pengaruh bangsa Han atas penindasan yang dilakukan oleh Manchu. Perjuangan ini melahirkan gerakan-gerakan serikat rahasia yang kemudian tersebar hingga ke seluruh dunia. Hampir di seluruh wilayah perantauan etnis Tionghoa seperti Indo Cina, Hawaii, Thailand, Malaka, Singapura, Indonesia, India, Australia, Amerika, bahkan sampai ke Inggris ditemukan serikat-serikat rahasia yang mengalami transformasi ke dalam berbagai bentuk lembaga bagi etnis Tionghoa di perantauan beraktivitas. Salah satu serikat rahasia yang menonjol dan berkembang hingga ke kawasan Malaya adalah dalam bentuk *triad society* (San Fan/serikat tiga unsur).⁴¹ Pada tahun 1824, di Singapura terdeteksi banyak *triad society*/serikat rahasia dengan ditemukannya simbol-simbol dan perlengkapan upacara inisiasi yang diselenggarakan oleh serikat rahasia tersebut.⁴²

Selain diaspora etnis Tionghoa yang tersebar ke seluruh dunia, berbagai perjuangan dan peperangan yang terjadi ikut memberikan peranan dalam proses

⁴¹ Triad merupakan suatu bentuk serikat rahasia (*secret society*) yang tumbuh pada akhir abad 18 di kalangan komunitas Kanton, Hakka, Tiochiu dan Minnan di daratan Tiongkok. Makna Triad sendiri adalah menyatukan Langit dan Bumi dan Manusia (penyatuan tiga unsur). Dengan demikian cakupan Triad sangat luas, yaitu bukan hanya bergerak di kalangan masyarakat tetapi juga melibatkan elite baik lokal, nasional, maupun internasional. Tujuan Triad sangat kompleks melibatkan bidang politik, ekonomi, sosial dan kekerabatan. Berbeda dengan perkumpulan serupa seperti mafia di Italia atau Yakuza di Jepang. Triad memiliki sistem ritual dan nilai-nilai tersendiri dengan latar belakang budaya dan kepercayaan. Akibatnya ada rutinitas di luar aktivitas lain yang berkaitan dengan program dan tujuannya. Lihat lebih lanjut, B.J. ter Haar, *Ritual and Mythology of the Chinese Triad: Creating an Identity*, Leiden: Koninklijk Brill. NV, 1997, hlm. 3; Leon Comber, *The Triads: Chinese Secret Societies In 1950's Malaya & Singapore*, Singapore: Singapore Heritage Society, 2009, hlm 21.

⁴² Serikat rahasia di Singapura sering juga dinamakan dengan kongsi. Lihat lebih lanjut Leon Comber, *op. cit.*, 1959, hlm. 27. Kongsi memiliki arti yang sama dengan kerjasama. Kata kongsi sering digunakan dalam aktivitas perdagangan, karena orang cenderung berusaha secara bekerjasama atau yang biasa dikenal dengan perkongsian. Kata kongsi bagi etnis Tionghoa Padang tidak saja digunakan dalam aktivitas ekonomi, namun memiliki arti yang lebih kompleks. Dalam kehidupan sosial kata-kata kongsi sering ditujukan untuk menunjukkan tempat yang berkaitan dengan adanya kegiatan kerjasama, sosial, dan budaya seperti untuk rumah marga dan perkumpulan sosial, budaya, dan kematian. Lihat J.L. Vleming, "The Chinese Business Community in Netherlands India", in M.R. Fernando, *Chinese Economic Activity in Netherlands India : Selected Translation from the Dutch*, Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, 1992, hlm. 119.

terjadinya diaspora tersebut, seperti Perang Candu pada tahun 1839,⁴³ Pemberontakan Boxer (*Pak Kun Tauw*) pada tahun 1897- 1900,⁴⁴ Revolusi Tiongkok tahun 1911 (*Xin Hai*)⁴⁵ dan Perang saudara hingga tahun 1949.⁴⁶ Migrasi secara besar-besaran dari Dataran Tiongkok tersebut dilakukan menuju bagian Selatan Asia (sekarang Asia Tenggara). Semenanjung Malaya dan kepulauan di Nusantara yang merupakan tujuan utama rombongan imigran Tiongkok. Para imigran yang dipengaruhi oleh situasi politik Tiongkok kemudian melakukan propaganda dalam rangka menggalang jiwa nasionalis di kalangan para etnis Tionghoa perantauan yang sudah ada sebelumnya di Padang. Propaganda dilakukan dengan sangat mudah mempengaruhi etnis Tionghoa Padang karena pada dasarnya komunitas tersebut masih mengembangkan identitas historis dan identitas budaya yang berorientasi kepada budaya leluhur.

Propaganda gerakan nasionalis kemudian dilaksanakan secara terorganisir melalui media pendidikan yang dikelola oleh organisasi sosial pendidikan Tiong Hwa Hwe Koan (THHK). Pembentukan THHK merupakan dampak langsung dari

⁴³ Banyaknya candu yang dibawa oleh bangsa Asing ke Tiongkok terutama Inggris berdampak buruk terhadap perilaku, kesehatan dan keamanan rakyat. Untuk mengatasi dampak buruk dari candu tersebut maka Tiongkok dibawah pimpinan Kaisar Daoguang tahun 1800 mengeluarkan mandat melarang candu masuk ke Tiongkok. Akan tetapi titah Kaisar tidak diindahkan sehingga meletuslah perang candu. Kekalahan Tiongkok dalam perang candu menyebabkan Tiongkok harus menandatangani perjanjian pada tahun 1842. Isi dari perjanjian tersebut adalah Tiongkok harus membuka Canton untuk perdagangan Internasional, menyerahkan Hongkong kepada Inggris, membayar \$12.000.000 sebagai pengganti biaya perang dan \$ 6.000.000 untuk mengganti candu yang telah dibakar habis. Lihat lebih lanjut Elizabeth Seeger, *Sedjarah Tiongkok Selajang Pandang*, Medan: Firma AMKA, 1951, hlm. 311-313.

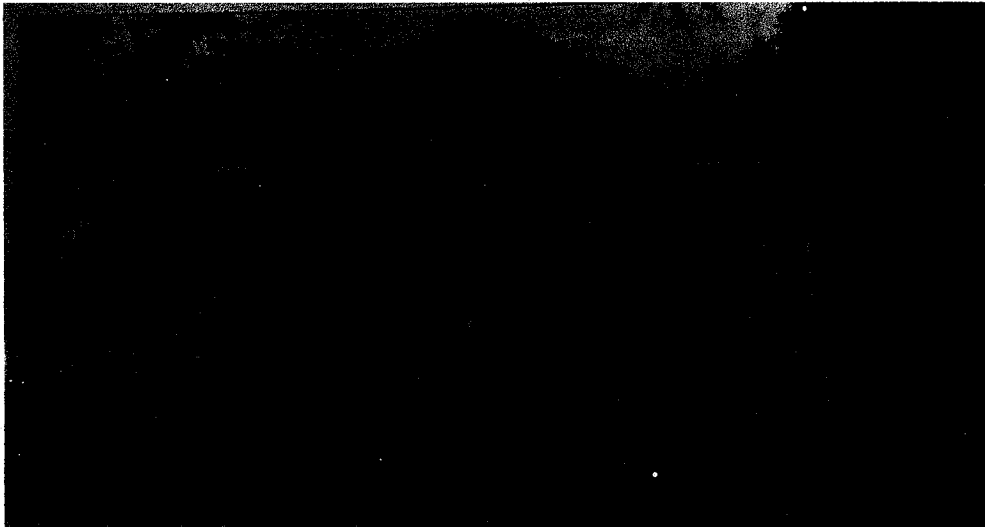
⁴⁴ Pemberontakan Boxer (Tinjau Keadilan) merupakan pemberontakan untuk menyingkirkan kekuasaan Manchu dan mengusir bangsa asing dari Tiongkok. Pemberontakan ini juga mendapatkan bantuan dari Ratu Tze Syi. Pemberontakan meletus di Peking dan menyerang kedutaan asing yang ada di Tiongkok. Akibat serangan tersebut pasukan Internasional mengerahkan kemampuan mereka untuk menyerang para Boxer dan pemberontakan ini berhasil dihentikan. Setelah itu dibuatlah perjanjian *Boxer Protocol* pada tanggal 7 September 1901. Akibat dari perjanjian dan pemberontakan ini, Dinasti Manchu semakin melemah dan rakyat banyak yang menderita. Rakyat pun melakukan ke arah Selatan untuk mencari perlindungan dan memperbaiki ekonomi yang telah porak-poranda. Bustamam, *Sejarah Asia Timur*, Padang: UNP Press, 2011, hlm. 48-49.

⁴⁵ Revolusi tahun 1911 dikenal dengan *Xin Hai* atau Revolusi Tiongkok yang dimulai pada 10 Oktober 1911. Revolusi ini berhasil menggulingkan Dinasti Qing (1644-1912) dan melahirkan pemerintahan baru berbentuk Republik. Lihat lebih lanjut Jean Chesneaux, *Serikat Rahasia Cina*, Jakarta: Grafiki, 1991, hlm. 4.

⁴⁶ Perang saudara 1945-1949 terjadi antara Kuomintang (Partai Nasionalis) di bawah pimpinan Chiang Kai Sek dengan Kuochantang (Partai Komunis) di bawah pimpinan Mao Zedong. Lihat dalam Maisir Thaib, *Tiongkok Merah*, Bukittinggi: Nusantara, tanpa tahun, hlm. 69-78. Oey Hong Lee, *Naga Bangkit: Kisah Kemenangan Mao Tse Tung*, Djakarta: Lucky, 1959.

gerakan nasionalis Tiongkok. Semangat nasionalis inilah yang disebarkan ke seluruh penjuru dunia termasuk di Hindia Belanda. THHK Padang didirikan tahun 1907 oleh Gho Goan Tee.⁴⁷

THHK



Gambar 25. Pengurus Tiong Hoa Hwe Konn (THHK)
Sumber : Bintang Hindia tahun ke 4 no. 22 1 Maart 1907 hlm. 280

Berdirinya THHK di Padang tidak terlepas dari situasi dan keadaan politik baik di Tiongkok maupun Hindia Belanda. THHK memberikan pelajaran terhadap para siswa dengan menggunakan bahasa Tionghoa. Selain itu, pelajaran yang diberikan adalah tentang bagaimana kebesaran dan keagungan para leluhur, serta beberapa pelajaran yang berkaitan dengan *ke-Tionghoa-an* lainnya. THHK menanamkan rasa malu jika sebagai orang Tionghoa tidak mengetahui kebudayaan dan tidak bisa berbahasa Tiongkok. Selain di bidang pendidikan dan kebudayaan yang berasal dari Tiongkok, THHK juga membakar semangat nasionalisme orang Tionghoa dalam bidang ekonomi. Semua itu bertujuan agar

⁴⁷ Dokumen THHK: Salinan no. 3, perjanjian pinjam pakai, 16 Agustus 1963; Dokumen ini juga menceritakan tentang pendirian THHK pada tanggal 16 Agustus 1907 yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Hindia Belanda no. 36 tahun 1907

orang Tionghoa yang sedang berada di perantauan memiliki semangat nasionalisme yang sama dengan revolusi yang sedang berlangsung di daratan Tiongkok.

Gerakan nasionalis yang dikumandangkan oleh Dr. Sun Yat Sen mendapat dukungan besar dari etnis Tionghoa Padang. Dukungan terlihat dari ikutsertanya etnis Tionghoa Padang melakukan propaganda melalui koran lokal dengan memuat foto Dr. Sun Yat Sen dan gerakan penggalangan dana yang dikelola secara terorganisir oleh perkumpulan-perkumpulan etnis Tionghoa yang ada di Padang. Penggalangan dana bertujuan untuk mengirimkan bantuan kepada Tiongkok yang mengalami banyak musibah mulai dari banjir hingga perjuangan nasionalis Tiongkok. Penggalangan dana dilakukan melalui pelaksanaan pameran maupun bazaar. Pada saat pelaksanaan pameran dan bazar, propaganda juga dikumandangkan tidak saja di Padang, tetapi menyebar hingga di kota-kota kecil di pedalaman Sumatera Barat (Padangpanjang, Bukittinggi dan Payakumbuh). Selanjutnya propaganda juga dikumandangkan oleh Kuo Min Tang cabang Padang dengan mengadakan peringatan insiden Lu Kai Chian, peringatan hari pengangkatan Dr. Sun Yat Sen menjadi Presiden Republik Tiongkok, dan peringatan kematian Dr. Sun Yat Sen setiap tanggal 20 Maret dengan cara mengibarkan bendera setengah tiang di depan rumah dan lembaga sosial budaya Tionghoa.⁴⁸

Setelah Kuo Min Tang berhasil menjadi pemegang otoritas di Tiongkok, namun partai ini gagal memegang kendali terhadap serikat-serikat yang ada. Aktivitas serikat-serikat rahasia yang ada di berbagai wilayah di Tiongkok tetap berjalan. Mereka berjuang untuk kepentingan masyarakat kelas bawah, seperti kaum buruh dan bergerak di bidang kriminal, seperti tukang pukul, pornografi, perdagangan manusia, korupsi, perjudian dan aktivitas lainnya. Faktor inilah yang menyebabkan aktivitas serikat mengalami transformasi dari kaum garis keras (*reaksioner*) ke kaum *gangsterisme* yang berkonotasi negatif. Kemudian,

⁴⁸ Politik Verslag Sumatra Westkust, Kwartal II tahun 1931, Mr. No 208/1931 (rahasia), hlm. 3; Politik Verslag Sumatra Westkust, Bulan Januari tahun 1939, Mr. No 244/1939 (rahasia), hlm. 13.

kelompok ini dianggap berbahaya serta dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT).⁴⁹

D. Identitas ganda

Identitas ganda adalah mengidentifikasi diri dengan wilayah tempat tinggal seraya sadar sebagai orang Tionghoa. Wilayah tempat tinggal yang dimaksud adalah Hindia Belanda dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan Belanda yang mengelompokkan etnis Tionghoa sebagai kelompok Timur Asing dalam stratifikasi penduduk di Hindia Belanda menyebabkan etnis Tionghoa tetap berada pada posisi bukan bagian dari Hindia Belanda. Maksudnya adalah etnis Tionghoa diberi posisi sebagai Timur Asing dan dikelompokkan sebagai orang asing di wilayah tempat tinggalnya. Hal ini berdampak tidak saja secara psikologis, tetapi juga secara ideologis. Secara ideologis, etnis Tionghoa tetap berorientasi kepada leluhur (Daratan Tiongkok) meskipun secara sosial, ekonomi, dan politik mereka menjadi bagian dari Hindia Belanda. Orientasi kepada leluhur menyebabkan etnis Tionghoa sadar dan bertanggungjawab secara moral untuk tetap melaksanakan dan melestarikan kebudayaan leluhur.

Berkembangnya kebudayaan Tionghoa di bawah politik Pemerintah Hindia Belanda menyebabkan kebudayaan Tionghoa dapat dilestarikan dari generasi ke generasi. Pelestarian mengalami segregasi seiring perubahan waktu. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh ketakutan Pemerintah Hindia Belanda atas menguatnya ideologi nasionalis Tiongkok yang dikembangkan oleh THHK. Untuk menghambat ideologi nasionalis Tiongkok mengakar di kalangan etnis Tionghoa Padang, maka Pemerintah Hindia Belanda mendirikan *Hollands Chineesche Scholen* (HCS) pada tanggal 1 Mei 1908. Selain itu tujuan HCS didirikan adalah hasil tanggapan Pemerintah Hindia Belanda atas permintaan orang Tionghoa untuk memperoleh pendidikan Eropa untuk anak-anaknya sesuai dengan pasal 14 dan menerapkan pola pemisahan serta pemberian sekat dengan penduduk

⁴⁹ Leon Comber, *ibid.*, 1959, hlm. 27.

pribumi.⁵⁰ Melalui pendidikan modern di HCS Tionghoa perantauan di Padang mulai dipengaruhi oleh kebudayaan barat, seperti mulainya etnis Tionghoa menganut agama Kristen.

Dengan bentuk dan pola yang demikian, Pemerintah Hindia Belanda berusaha memberikan simpati terhadap etnis Tionghoa dengan kesan bahwa Pemerintah Hindia Belanda juga memiliki perhatian lebih terhadap orang Tionghoa yang masa itu berada pada strata kedua di dalam struktur kehidupan masyarakat Hindia Belanda. Hal yang demikian memberi gambaran Pemerintahan Hindia Belanda masih tetap membutuhkan orang Tionghoa dalam kepentingan praktis dalam menjalani sistem pemerintahan yang sedang berlangsung. Keuntungan-keuntungan tersebut diharapkan agar memiliki dampak yang positif, baik dalam pihak Pemerintahan Hindia Belanda, maupun dari pihak etnis Tionghoa. Namun jika diperhatikan lebih lanjut, kebijakan Pemerintah Hindia Belanda tentang HCS hanya mempengaruhi sebagian kecil etnis Tionghoa karena semangat nasionalisme jauh lebih besar mempengaruhi mereka. Meskipun demikian bagi sebagian etnis Tionghoa Padang yang tergabung dalam struktur Pemerintah Hindia Belanda secara tidak langsung akan berorientasi ke barat pada satu sisi dan masih mempertahankan nilai-nilai dan budaya leluhur sebagai bagian identitas historis, identitas budaya, dan identitas nasional (Tionghoa).

Hal ini juga menyebabkan muncul loyalitas ganda dimana pada satu sisi mereka loyal kepada tanah leluhur disisi lain mereka juga loyal kepada tempat tinggalnya. Hal ini secara tidak langsung akan melahirkan loyalitas ganda yang berujung kepada identitas ganda. Wujud dari identitas ganda dapat terlihat dari penggunaan simbol-simbol yang mendukung *ke-Tionghoa-an* dan simbol-simbol sebagai bagian dari lokalitas yang terwujud melalui ketidakmampuan etnis Tionghoa Padang berbahasa Tionghoa. Ruang yang diberikan oleh pemerintah Hindia-Belanda memperkuat identitas *ke-Tionghoa-an* pada satu sisi dan penggunaan simbol-simbol Belanda disisi lain.

⁵⁰ Charles A. Coppel, *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hal 40; Donald Earl Willmott, *The Chinese of Semarang: A Changing Minority Community in Indonesia*, New York: Cornell University Press, 1960, hal 106-107; Laksmi Studio, *Buku Peringatan 100 Tahun Sekolah THHK/Pa Hoa*, Jakarta: Yayasan Pancaran Hidup, 2001, hal 76

BAB V

PENUTUP

Keberadaan etnis Tionghoa sebagai komunitas pendatang di Padang, disebabkan oleh banyak faktor, baik intern maupun ekstern. Faktor intern disebabkan oleh kondisi sosial, ekonomi dan politik Tiongkok yang mendorong terjadinya diaspora secara besar-besaran ke luar dari daratan Tiongkok. Sementara faktor ekstern dipengaruhi oleh peluang ekonomi dan politik Pemerintah Hindia Belanda khususnya di Padang.

Etnis Tionghoa yang berdiaspora ke Padang membentuk komunitas dan bermukim dalam satu kawasan yang dinamakan kampung Pondok. Kampung Pondok merupakan pemukiman etnis yang dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan tujuan agar tidak terjadi pembauran antara pendatang yang dikelompokkan dalam kelompok Timur Asing (Tionghoa, Arab, dan India) dengan penduduk pribumi. Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda tidak saja menyebabkan penduduk terkelompokkan berdasarkan etnis, tetapi juga memupuk rasa ke-etnisitas-an di antara masing-masing kelompok.

Pengelompokkan pemukiman berdasarkan etnis, kemudian menyebabkan masing-masing etnis memiliki sistem kepemimpinan yang dinamakan dengan *bestuur*. Etnis Tionghoa memiliki bestuur yang terdiri atas Mayor, Kapitan dan Letnan serta komponen pendukung bestuur lainnya (masteer dan wijkmasteer). Selain memiliki bestuur, sistem pemukiman juga menyebabkan terkelompoknya seluruh komponen masyarakat dalam satu areal pemukiman. Komponen tersebut meliputi Pasar Tanah Kongsi, Klenteng See Hien Kiong, Rumah Marga maupun perkumpulan sosial budaya dan kematian Hok Tek Tong dan Heng Beng Tong. Seluruh komponen masyarakat ini memainkan peran penting dalam pembentukan identitas etnis Tionghoa Padang dalam konteks waktu Pemerintahan Hindia Belanda.

Komponen masyarakat dan politik Pemerintah Hindia Belanda memberikan ruang kepada etnis Tionghoa dalam proses pembentukan identitas

mereka. Meskipun berada dalam ruang Padang, namun pola pemukiman memberikan ruang kepada etnis Tionghoa untuk mengembangkan identitas historis dan identitas budaya dalam kehidupan sehari-hari. Keterbatasan hubungan dengan ruang Padang akibat sistem pemukiman menyebabkan memori masa lalu (historical memory) menjadi identitas diri mereka. Asal-usul dari daratan Tiongkok, Nilai-nilai leluhur, dan kejayaan Tiongkok pada masa lalu tetap membangun memori kolektif yang terpatri dalam ingatan etnis Tionghoa Padang. Akibatnya pada periode ini identitas ketionghoan terpelihara melalui seluruh komponen yang ada di pemukiman Kampung Pondok. Komponen masyarakat berperan besar dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai leluhur melalui aktivitas perkumpulan dan program pendidikan. Identitas Etnis Tionghoa di Padang memiliki keragaman dan keunikan yang berasal dari perbedaan marga dan leluhur. Adanya perbedaan marga menyebabkan perbedaan warisan budaya yang diwarisi oleh keturunan berikutnya. Setiap perkumpulan marga di Padang pada masa Pemerintahan Hindia Belanda memiliki perlindungan secara hukum yang ditetapkan berdasarkan undang-undang oleh Pemerintahan Hindia Belanda. Salah satu alasan dari bertahannya Etnis Tionghoa di Padang ialah adanya ruang yang homogen dan strategis.

Setiap marga yang berbeda juga memiliki banyak perbedaan lain. Perbedaan tersebut bukan hanya dalam bentuk simbol-simbol yang diilustrasikan ke dalam bentuk seperti lukisan para leluhur, ataupun patung. Namun, perbedaan lain adalah pada sisi bahasa yang digunakan. Setiap provinsi di Daratan Tiongkok memiliki perbedaan bahasa. Para perantau yang berasal dari provinsi yang berbeda-beda itu akhirnya membentuk sebuah perkumpulan di tanah rantau berdasarkan marga. Perbedaan lain yang terlihat adalah perbedaan berdasarkan adat tertentu yang dilaksanakan berdasarkan ajaran leluhur dari provinsi atau marga asal. Marga kemudian menjadi sarana dalam pewarisan identitas kebudayaan Tionghoa di tanah perantauan.

Sistem politik yang diberlakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda memberikan peluang kepada politik Tiongkok untuk mempengaruhi orientasi politik etnis Tionghoa Padang. Hal ini terlihat dari dukungan yang diberikan oleh seluruh komponen masyarakat terhadap gerakan nasionalis Tiongkok. Orientasi tersebut bertambah besar saat munculnya nasionalisme Tiongkok berdasarkan propaganda-propaganda yang digencarkan oleh kaum Nasionalis. Propaganda tersebut dilakukan dengan menarik simpati etnis Tionghoa yang sedang berada di tanah perantauan untuk tetap menjadikan Daratan Tiongkok sebagai kiblat.

Gerakan nasionalis yang dikumandangkan oleh Dr. Sun Yat Sen berhasil mendapat dukungan dari perkumpulan yang ada di Padang. Dukungan yang diberikan tidak saja dalam bentuk moril tetapi juga materil. Gencarnya dukungan yang diberikan oleh etnis Tionghoa Padang terhadap gerakan nasionalis semakin memperkuat identitas nasionalis Tiongkok di kalangan etnis Tionghoa Padang. Untuk menghambat kuatnya pengaruh nasionalis Tiongkok, kemudian Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan baru tentang penyetaraan status warga negara dan memperkenalkan pola pendidikan barat. Akibatnya etnis Tionghoa Padang terbagi atas dua kelompok, yaitu yang masih mempertahankan identitas nasional Tiongkok dan sebagian kecil mulai terpecah antara mempertahankan identitas ke-tionghoa-an yang dipengaruhi oleh barat. Kelompok kecil ini kemudian memiliki identitas yang dikenal dengan identitas ganda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Budi Susanto (ed). 2003. *Identitas dan Postkolonialitas di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Abdulah Dahana dan Nusron Wahid. 2005. *Telapak Sejarah Sam Po Kong : Menelurusi Perang Cina Dalam Penyebaran Islam di Indonesia*. Jakarta: DPP Golkar dan Suara Karya
- Ahmad Dt. Batuah. 1956. *Tambo Minangkabau dan Adatnya*. Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka
- Akira Nagazumi. 1991. *Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang*. Jakarta : Obor
- Amir Syafuddin. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung
- Andjarwati Noordjanah. 2004. *Komunitas Tionghoa di Surabaya (1910-1946)*. Semarang: Penerbit Mesiass
- Anne Bood. 1988. *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- ANRI, Besluit, 21 Juli 1918, no. 41, bundle Alg. Secretarie
- B.J. ter Haar. 1997. *Ritual and Mythology of the Chinese Triad: Creating an Identity*. Leiden: Koninklijk Brill. NV
- Batoe Peringatan Dari Bangsa Hock Kian afd. Tjiang dan Tjoan Tjioe Tinggal di Padang, Membaharoei Se Hien Kion*, Padang : Majoor Titulair Lie Goan Hoat, Khong Soe 23 Tahoen Theng Joe Tahoen Belanda 1897
- Bernard Phillipe Groslier. 2007. *Indocina : Persilangan Kebudayaan*. Jakarta : KPG
- Besluit no. 38 tanggal 21 September 1909*
- Besluit tanggal 21 Juli 1918, no. 41, bundle Algemeen Secretarie, Arsip Nasional Republik Indonesia*
- Buku Kenangan 120 Tahun Himpunan Keluarga Tan Padang*, Padang 29 Maret 2008
- Bustamam. 2011. *Sejarah Asia Timur*. Padang: UNP Press
- Charles A. Coppel. 1994. *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Christine Dobbin. 1992. *Kebangkitan Islam Dalam Ekonomi Petani Yang Sedang Berubah: Sumatera Tengah 1784-1847*. Jakarta: INIS
- David CL Ch'ng. 1995. *Sukses Bisnis Cina Perantauan: Latar Belakang, Praktek Bisnis dan Jaringan Internasional*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti
- Dewi Fortuna Anwar, dkk (eds.). 2005. *Konflik Kekerasan Internal Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik, dan Kebijakan Asia Pasifik*. Jakarta: YOI, LIPI, LASEMA-CNRS, KITLV
- Dicky Lopulalan. 1999. *Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial*. Jakarta : LSPP
- Djoko Suryo. 2001. *Agama dan Perubahan Sosial: Studi Tentang Hubungan Antara Islam, Masyarakat dan Struktur Sosial Politik Indonesia*. Yogyakarta: LKPSM

- Donald Earl Willmott. 1960. *The Chinese of Semarang: A Changing Minority Community in Indonesia*. New York: Cornell University Press
- E. Netscheer. 1881. *Padang In Het Laatst Der XVIII*, Batavia: Bataviaasch Genootschap Van Kunsten En Wetenschappen, Verhandelingen Van Het Bataviaasch Genootschap Van Kunsten En Wetenschappen 41
- Eddie Kusuma & S. Satya Dharma. 2006. *Etnis Tionghoa Dalam Politik Indonesia : Sebelum dan Sesudah Reformasi 1998*. Jakarta: Suara Kebangsaan Tionghoa Indonesia (SAKTI) dan Asosiasi Wartawan Muslim (AWAM) Indonesia
- Elizabeth E. Graves. 2007. *Asal Usul Elite Minangkabau Modern: Respons terhadap Pemerintah Hindia Belanda Abad XIX/XX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Elizabeth Seeger. 1951. *Sedjarah Tiongkok Selajang Pandang*. Medan: Firma AMKA
- Erniwati. 2007. *Asap Hio di Ranah Minang: Komunitas Tionghoa di Sumatera Barat*. Yogyakarta: Ombak
- Erwiza Erman. 2005. *Membaranya Batubara : Konflik Kelas dan Etnik Ombilin-Sawahlunto- Sumatera Barat 1892-1996*. Depok: Desantara Utama
- Fredrik Barth (ed). 1969. *Ethnic Groups and Boundaries*. Boston: Little Brown
- Fredrik Barth dkk. 1970. *Ethnic Group and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*. Bergen-Oslo: Universitets Forlaget
- Fredrik Barth. 1988. *Kelompok Etnik dan Batasannya*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Freek Colombijn. 2006. *Paco-Paco (Kota) Padang: Sejarah Sebuah Kota di Indonesia Pada Abad ke 20 dan Penggunaan Ruang Kota*. Yogyakarta: Ombak
- Gilbert J. Garraghan S.J. 1957 *A Guide to Historical Method*. New York: Fordham University Press
- Gusti Asnan. 2003. *Kamus Sejarah Minangkabau*. Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau
- Gusti Asnan. 2007. *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera*. Yogyakarta: Ombak
- Gusti Asnan. 2007. *Memikir Ulang Regionalisme Sumatera Barat Tahun 1950-an*. Jakarta: Yayasan Obor
- H. Kern, "Een Chineesch Reiziger op Sumatera", *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie, Tweede Nieuwe Serie*, Batavia: Bij G.Koolff & Co, 1897,
- H. Ran Dewall, "Opstand der Chinezen van Monteradoe, Weskust-Borneo 1853", *Manuskrip, koleksi KITLV H.83*.
- J.L. Vleming Jr, Terj, Bob Widyahartono. 1988. *Kongsi & Spekulasi: Jaringan Kerja Bisnis Cina*. Jakarta: PT. Temprint
- J.L. Vleming, "The Chinese Business Community in Netherlands India", in M.R. Fernando, *Chinese Economic Activity in Netherlands India : Selected Translation from the Dutch*, Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, 1992
- Jean Chesneaux. 1991. *Serikat Rahasia Cina*. Jakarta: Grafiki
- Jennifer Cusgman & Wang Gungwu. 1991. *Perubahan Identitas Orang Cina Di Asia Tenggara*. Jakarta: Grafiti

- Jennifer Cushman & Wang Gungwu (ed). 1991. *Perubahan Identitas Orang Cina di Asia Tenggara* (terj). Jakarta: PT. Temprint
- John Wang. 1987. *Politik Perdagangan Cina di Asia Tenggara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Justian Suhandinata. 2009. *WNI Keturunan Dalam Stabilitas Ekonomi & Politik Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Justus Van Mourik. 1897. *Indrukken van een "Totok" Indische Type En Schetsen*. Amsterdam : Van Holkema & Warendorf
- Laksmi Studio. 2001. *Buku Peringatan 100 Tahun Sekolah THHK/Pa Hoa*. Jakarta: Yayasan Pancaran Hidup
- Laporan Kegiatan Himpunan Keluarga Lim (*Kioe Liong Tong*) Padang, 14 Maret 2013
- Laurence K.L. Siaw. 1983. *Chinese Society in Rural Malaysia*. Kuala Lumpur : Oxford University Press
- Leon Comber. 1959. *Chinese Secret Societies in Malaya: A Survey of The Triad Society from 1800-1900*. Singapore: Singapore Heritage Society
- Leon Comber. 2009. *The Triads: Chinese Secret Societies In 1950's Malaya & Singapore*. Singapore: Singapore Heritage Society
- Lucas Partanda Koestoro. 2007. *Padang, Kota Andaleh di Pesisir Barat Sumatera*. Medan: Balai Arkeologi Medan
- M. D. Mansoer. 1970. *Sedjarah Minangkabau*. Jakarta : Bhratara
- M.R. Fernando. 1992. *Chinese Economic Activity in Netherlands India : Selected Translation from the Dutch*. Singapore: Institute of Southeast Asia Studies
- Maisir Thaib. tanpa tahun. *Tiongkok Merah*. Bukittinggi: Nusantara
- Mardanas Sofwan dkk. 1987. *Sejarah Kota Padang*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional
- Matthew B. Miles and A. Michel Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis*, London: Sage Publication
- Max Travers. 2001. *Qualitative Research through Case Studies*. London: Sage Publication
- Mely G. Tan (ed). 1999. *Etnisitas dan Konflik Sosial*. Jakarta: PMB-LIPI
- Memorial Pelaksanaan Tugas Walikotamadya KHD. Tingkat II Padang H. Syahrul Ujud S.H 1983-1993*, Padang: Bung Hatta University Press, 1993
- Mochtar Naim. 2013. *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Mona Lohanda. 1994. *The Kapitan Cina of Batavia 1837-1942*. Jakarta: Djambatan
- Muhammad Radjab. 1964. *Perang Paderi*. Jakarta: Balai Pustaka
- Nasrul Hamdani. 2012. *Komunitas Cina di Medan : Dalam Lintasan Tiga Kekuasaan 1930-1960*. Jakarta: LIPI Press
- Natasya Yunita. 2003. *Tradisi Hukum Cina: Negara dan Masyarakat: Studi Mengenai Peristiwa-peristiwa Hukum di Pulau Jawa Zaman Kolonial (1870-1942)*. Universitas Indoensia: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum

- Nio Joe Lan. 2013. *Peradaban Tionghoa Selayang Pandang*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Oey Hong Lee. 1959. *Naga Bangkit: Kisah Kemenangan Mao Tse Tung*. Jakarta: Lucky
- Pax Benedanto. 2007. *Kesusastraan Melayu dan Kebangsaan Indonesia Jilid 10*. Jakarta: KGP
- Pratiwo. 2010. *Arsitektur Tradisional Cina Dan Perkembangan Kota*. Yogyakarta : Ombak
- Rika Theo dan Fennie Lie. 2014. *Kisah, Kultur, dan Tradisi Tionghoa Bangka*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Rusli Amran. 1981. *Sumatra Barat Plakat Panjang*. Jakarta : Sinar Harapan
- Rusli Amran. 1988. *Padang Riwayatmu Dulu*. Jakarta: C.V. Yasaguna
- Rustopo. 2007. *Menjadi Jawa: Orang-Orang Tionghoa dan Kebudayaan Jawa di Surakarta 1895 – 1998* Yogyakarta: Ombak
- Sartono Kartodirdjo. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia
- Sativa Sutan Aswar. 1999. *Antakusuma Suji Dalam Adat Minangkabau*. Jakarta : Djambatan
- Staatsblad* no. 129 tahun 1917
- Staatsblad* no. 79 tahun 1895
- Statuten dan Huishoudelijk Reglement (Reglement Ketjil) dari Vereeniging Long Se Tong Padang, De Volharding Padang, 1932*
- Statuten dari Vereeniging Tjee Jang Tong Padang* tahun 1930
- Statuten van de vereeniging "Kioe Liong Tong" te Padang (Sumatra's Weskust), Javasche Courant, No.86* tahun 1920.
- Tan Ta Sen. 2010. *Cheng Ho Penyebar Islam dari China ke Nusantara*. Jakarta: Kompas
- Tanpa pengarang. 1989. *Padang Pintu Gerbang Pantai Barat Indonesia*. Padang: Sumatera Offset
- The Netherlands Indies "A Review of The Country It's Economics and Commerce" Vol III 1935 Publisher: 6 Kolff & Co. Batavia, Java, N, 1 Issued by the Departement of Economic Affair, Editorial Commitee Press: Schoolwey 8 Batavia c (JAVA)
- Thung Ju Lan (ed). 2000. *Etnisitas dan Integrasi di Indonesia: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta : PMB-LIPI
- Twang Peck Yang. 2005. *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950*. Yogyakarta: Niagara
- Uli Kozok. 2006. *Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah : Naskah Melayu yang tertua*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Victor Purcell, (terj) Nik Hasnaa Nik Mahmud. 1997. *Orang-orang Cina di Tanah Melayu*. Universiti Teknologi Malaysia: Cetak Ratu SDN, BHD
- Yerry Wirawan. 2013. *Sejarah Masyarakat Tionghoa Makassar Dari Abad ke 17 Hingga Ke-20*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Yin Cheong Cheng. 2005. *New Paradigm for Reengineering Education : Globalization, Localization and Individualization*. Dordrecht : Springer

Wawancara

Gho Tjeng Li, *Wawancara*, Padang tanggal 6 Oktober 2017

Indra, *Wawancara*, Padang, 6 Oktober 2017

Marga Lie & Kweek, *Wawancara*, 21 Agustus 2017

Marga Lie dan Kwee, *Wawancara*, 21 Agustus 2017.

Pengurus Himpunan Keluarga Lim, *Wawancara*, Padang 15 November 2017.

Pengurus Marga Ong, *Wawancara*, Padang 17 November 2017

